DATA DAN INFORMASI

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2016

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

DATA DAN INFORMASI

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2016

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jakarta, Desember 2016

DATA DAN INFORMASI

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

Penyusun & Penyunting:
Subbagian Data dan Informasi
Bagian Program dan Evaluasi
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Desain sampul & *layout:*
Tenang Carles Rinaldi Silitonga, S.Komp.

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti
Blok I Lantai 7, Cq. Bagian Program dan Evaluasi
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp/Fax: (021) 5730289/ (021) 5734632
Email: datainformasi.planologi@gmail.com

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 ini disusun sebagai bentuk implementasi Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang tepat, akurat, dan terkini, khususnya dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan kepada masyarakat.

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja setiap eselon II lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang meliputi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I sampai dengan XXII.

Kami menyadari penyusunan buku ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakannya.

Jakarta, Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v

BAB I. TUJUAN, ARAHAN KEBIJAKAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI 1
A. Tujuan dan Arahan Kebijakan 1
B. Tugas dan Fungsi 2

BAB II. PROGRAM DAN KEGIATAN 5
A. Program 5
B. Kegiatan 5

BAB III. KEMAJUAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 9
A. Kemajuan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 9
B. Kemajuan Kegiatan Prioritas Tahun 2016 10

DAFTAR TABEL

HALAMAN

I. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

Tabel I.1 Progres Persetujuan Substansi Kehutanan dalam Usulan Revisi RTRWP 12
Tabel I.2 Kebijakan dan Strategi RKTN 2011 – 2030 19
Tabel I.3 Hasil Analisis Kawasan Berdasarkan Fungsi (Juta Hektar) dalam Dokumen RKTN 2011 – 2030 22
Tabel I.4 Luas Arahan Pemanfaatan pada Tahun 2030 (Juta Hektar) 23

II. PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Tabel II.1 Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Perkembangan SK 27
Tabel II.2 Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan 28
Tabel II.3 Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas 29
Tabel II.4 Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan 30
Tabel II.5 Perkembangan Tata Batas IUPHHK-HA 31
Tabel II.6 Perkembangan Tata Batas IUPHHK-HT 32
Tabel II.7 Perubahan Fungsi 33
Tabel II.8 Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi (Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan) 53
Tabel II.9 Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/Pertanian (Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan) 54
Tabel II.10 Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan 55
Tabel II.11 Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/Pertanian (Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan) Per Komoditi 56

III. PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Tabel III.1 Penetapan Wilayah KPH 58
Tabel III.2 Perkembangan Penetapan Wilayah KPH Konservasi 60
Tabel III.3 Perkembangan Penetapan Wilayah KPH Model 67
Tabel III.4 Perkembangan Kelembagaan KPH Model 74
Tabel III.5 Daftar Penetapan Fasilitasi KPH Tahun 2015 dan 2016 78
Tabel III.6 Kelembagaan KPH Penetapan Fasilitasi Tahun 2015 84

IV. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Tabel IV.1 Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi Tambang dan Non Tambang 89
Tabel IV.2 Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang 90
Tabel IV.3 Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi Komoditas Tambang 91

Tabel IV.4 Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey Eksplorasi/Sub Kegiatan Non Tambang Tahun 2016 92
Tabel IV.5 Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Komoditas Tambang..... 93
Tabel IV.6 Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Komoditas/Sub Kegiatan Non Tambang 94
Tabel IV.7 Perkembangan Lahan Kompensasi (S/D Tahap Berita Acara Serah Terima) 95
Tabel IV.8 Rekapitulasi Laporan Perkembangan Penyetoran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan 96

V. INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Tabel V.1 Perkembangan Pemeriksaan Hasil Penafsiran Citra Satelit pada Unit IUPHHK-HA..... 97
Tabel V.2 Perkembangan Pemeriksaan Hasil Penafsiran Citra Satelit pada Unit IUPHHK-HTI..... 98
Tabel V.3 Peta Tematik Non Kehutanan Tahun 2016..... 99
Tabel V.4 Perkembangan Pendokumentasian Peta Dasar Tahun 2016..... 100

VI. PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Tabel VI.1 Daftar Penerbitan Surat Keputusan dan Rekomendasi dari Kegiatan AMDAL dan UKL-UPL pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan..... 103
Tabel VI.2 Perkembangan Penerbitan SK Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup..... 112

VII. PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Tabel VII.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 116
Tabel VII.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis S/D Oktober 2016..... 118
Tabel VII.3 Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem di Indonesia 120

VIII. DUKUNGAN MANAJEMEN

Tabel VIII.1 Kegiatan Pokok dan Indikator Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 132
Tabel VIII.2 Alokasi dan Serapan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2016 133
Tabel VIII.3 Peraturan Perundang-Undangan 134
Tabel VIII.4 Proyek Bantuan Luar Negeri Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2012-2016 138
Tabel VIII.5 Rekapitulasi Sebaran PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan..... 140
Tabel VIII.6 Rekapitulasi Sebaran PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)..... 141
Tabel VIII.7 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan 142
Tabel VIII.8 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan..... 143
Tabel VIII.9 Sarana dan Prasarana..... 145

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1. Alur Proses Perubahan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP 11
Gambar 2. Luas Kawasan Hutan Indonesia 24
Gambar 3. Skema Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 24
Gambar 4. Alur Proses Pelepasan Kawasan Hutan 25
Gambar 5. Tahapan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) 26
Gambar 6. Penggunaan Kawasan Hutan (Skema Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Non Kehutanan) 87
Gambar 7. Penggunaan Kawasan Hutan (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) 88
Gambar 8. Proses Penyusunan dan Penilaian AMDAL serta Izin Lingkungan (PP 27/2012) 101
Gambar 9. Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Izin Lingkungan (PP 27/2012).. 102

BAB I

TUJUAN, ARAHAN KEBIJAKAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI

A. Tujuan dan Arahan Kebijakan

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2015-2019 adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian Lingkungann Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 adalah: (1). Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2). Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3). Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Sedangkan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan.

Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam upaya pencapaian dari seluruh sasaran strategis tersebut, namun sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, peran dan fokus utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah memastikan kawasan hutan yang mantap yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan

daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah menyelenggarakan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan,dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor;
6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Selain satker Eselon II di pusat, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Adapun kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPKH Wilayah I Medan berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumut dan Sumbar.
2. BPKH Wilayah II Palembang berkedudukan di Palembang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumsel.
3. BPKH Wilayah III Pontianak berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
4. BPKH Wilayah IV Samarinda berkedudukan di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

5. BPKH Wilayah V Banjarbaru berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Selatan.
6. BPKH Wilayah VI Manado berkedudukan di Manado dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
7. BPKH Wilayah VII Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8. BPKH Wilayah VIII Denpasar berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali dan NTB.
9. BPKH Wilayah IX Ambon berkedudukan di Kota Ambon dengan wilayah kerja Provinsi Maluku.
10. BPKH Wilayah X Jayapura berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerja Provinsi Papua.
11. BPKH Wilayah XI Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Pulau Jawa dan Madura.
12. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang berkedudukan di Tanjung Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kepulauan Riau.
13. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.
14. BPKH Wilayah XIV Kupang berkedudukan di Kupang dengan wilayah kerja Provinsi NTT.
15. BPKH Wilayah XV Gorontalo berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo.
16. BPKH Wilayah XVI Palu berkedudukan di Palu dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
17. BPKH Wilayah XVII Manokwari berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja Provinsi Papua Barat.
18. BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh.
19. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru dengan wiilayah kerja Provinsi Riau.
20. BPKH Wilayah XX Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah kerja Provinsi Lampung dan Bengkulu.
21. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
22. BPKH Wilayah XXII Kendari berkedudukan di Kendari dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionanl (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 yang menyatakan bahwa satu eselon I bertanggung jawab terhadap 1 (satu) program. Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah **"Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan".**

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya rentang papulasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama kementerian tahun 2015-2019 adalah: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah jenis dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.

B. Kegiatan

Program kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 harus selaras dengan yang diamanatkan oleh UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu: 1) Inventarisasi Hutan; 2) Pengukuhan Kawasan Hutan; 3) Penatagunaan Kawasan Hutan; 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; 5) Penyusunan Rencana Kehutanan; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 1) Inventarisasi lingkungan hidup, 2) penetapan wilayah ekoregion, 3) penyusunan RPPLH, 4) pencegahan pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL serta izin lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dijabarkan lebih lanjut kedalam 7 (tujuh) kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan sasaran terselesaikannya penetapan seluruh kawasan;
2. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan sasaran data dan informasi sumber daya hutan terbarukan di seluruh KPH;

3. Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dengan sasaran:
   - Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi;
   - Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan pangan, Energi dan Air dengan layanan Menimal 80%;
4. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, dengan sasaran:
   - Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas
   - Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD
   - Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau
5. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dengan sasaran Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan;
6. Kegiatan Dukungan Manjemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan dengan sasaran Tata Kelola Pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78.00(A) di tahun 2019;
7. Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dengan sasaran Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan yang didukung kegiatan pada Rencana Kerja 2016 antara lain:
   1) Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan: Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi, Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%;
      a. Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH 34 Provinsi;
      b. Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan di 34 Provinsi;
      c. Good Governance Kegiatan Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai minimal 78.00(A) di tahun 2019;
      d. Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 109 KPH;
      e. Tersedianya Data dan Informasi pembangunan 600 KPH dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di 34 Provinsi;
      f. Tersedianya Sistem jaringan komunikasi Data Kehutanan dan Informasi Perencanaan Kawasan Hutan;
      g. Terselenggaranya pengendalian penataan ruang kawasan hutan berbasis 600 KPH;
      h. Tercapainya Pembayaran PNBP penggunaan Kawasan hutan minimal 80%;
      i. Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
      j. Tersedianya Data Informasi Bidang Penggunaan Kawasan Hutan;
   2) Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Sasaran Inventarisasi Sumber Daya Hutan, Data dan Informasi SDH yang terbarukan diseluruh KPH:

a. Terselenggaranya Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH;
b. Tersedianya Data dan Informasi Dasar Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH;
c. Terselenggaranya Penyiapan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional;
d. Good Governance Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan sesuai kerangka Reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai minimal 78.00 (A) di tahun 2019;

3) Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sasaran Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, terselesaikannya penetapan seluruh kawasan;

a. Terselesaikannya subtansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan;
b. Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan, Penatagunaan Kawasan Hutan;
c. Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan 6000 Km;
d. Good Governance Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai kerangka Reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai minimal 78.00 (A) di tahun 2019;
e. Terselenggaranya 100% Proses Perubahan Fungsi/Peruntukan Kawasan Hutan Parsial;

4) Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor;

Sasaran Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Terlaksananya analisis Lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas serta rencana kegiatan, Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD, Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan Penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau;

a. Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun;
b. Jumlah KLHS yang ter-review kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun;
c. Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024 dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional;
d. Jumlah Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah Daerah (34 RPPLH Provinsi);
e. Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah Daerah (40 RPPLH Kab/Kota);
f. Jumlah penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan Ekoregion sampai tingkat skala 1:50.000 terbaharui setiap tahun;

g. Jumlah satuan peta Ekoregion pada skala 1:50.000;
h. Jumlah lokasi/area/kawasan yang tersedia valuasi ekonomi SDA LH-nya;
i. Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau;

5) Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
Sasaran Kegiatan Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan;
   a. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100%);
   b. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100%);
   c. Jumlah KPA berliansi dan pemeriksa UKL UPL. Daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 Daerah);

6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas pelaksanaan lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
Sasaran Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78.00 (A) di tahun 2019:
   a. Nilai sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan minimal 78.00 (A) di tahun 2019;

7) Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Planologi Kehutanan BPKH I s/d XXII
Sasaran Kegiatan Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan;
   a. Penataan Batas Kawasan Hutan Sepanjang 40.000 Km;
   b. Jumlah KPH yang memiliki rencana Pengelolaan 409 KPH;
   c. Jumlah Klaster yang telah di Inventarisasi SDH sebanyak 1650 Klaster;

BAB III

KEMAJUAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

A. Kemajuan Kegiatan Prioritas Tahun 2015

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015
1.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
	a. Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal Kawasan 80% b. Kawasan Hutan melalui Tata Batas kawasan Hutan 40.000 km	80% 40.000 Km	100% 6.000 Km	104,12%) 6.848,35 Km
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
	a. Data dan Informasi potensi sumber daya hutan 600 KPH	600 KPH	209 KPH	100%
3.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
	a.Pembentukan 409 Unit KPH b. Penata ruang Wilayah 34 Prov	409 Unit 34 Prov	109 unit KPH 34 Prov	109 KPH 34 Prov (100%)
4.	Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
	a. Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD.DT sebanyak 100 KLHS pertahun	100 KLHS	1 KLHS	1 KLHS
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
	a.Penilaian Dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-ULP serta penerbitan izin lingkungan selesai	100 %	100%	100 %

B. Kemajuan Kegiatan Prioritas Tahun 2016 S/D Desember 2016

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016
1.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
	a. Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal Kawasan 80% b. Kawasan Hutan melalui Tata Batas kawasan Hutan 40.000 km	80% 40.000 Km	65% 6.000 Km	93,94% (124,19%) 6.600,34 Km (104,32%)
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
	a. Data dan Informasi potensi sumber daya hutan 600 KPH	600 KPH	358 KPH	358 KPH 100% (Bulan Desember)
3.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
	a.Pembentukan 409 Unit KPH b. Penata ruang Wilayah 34 Prov	409 Unit 34 Prov	100 unit KPH 34 Prov	100 KPH 34 Prov (100%)
4.	Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
	a. Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD.DT sebanyak 100 KLHS pertahun	100 KLHS	100 KLHS	30 KLHS sesuai ketersediaan dana TA 2016
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
	a.Penilaian Dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-ULP serta penerbitan izin lingkungan selesai	100 %	100%	100 %

Sedangkan kemajuan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara lengkap terperinci pada tabel terlampir.

PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

DATA DAN INFORMASI
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

GAMBAR 1. ALUR PROSES PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP

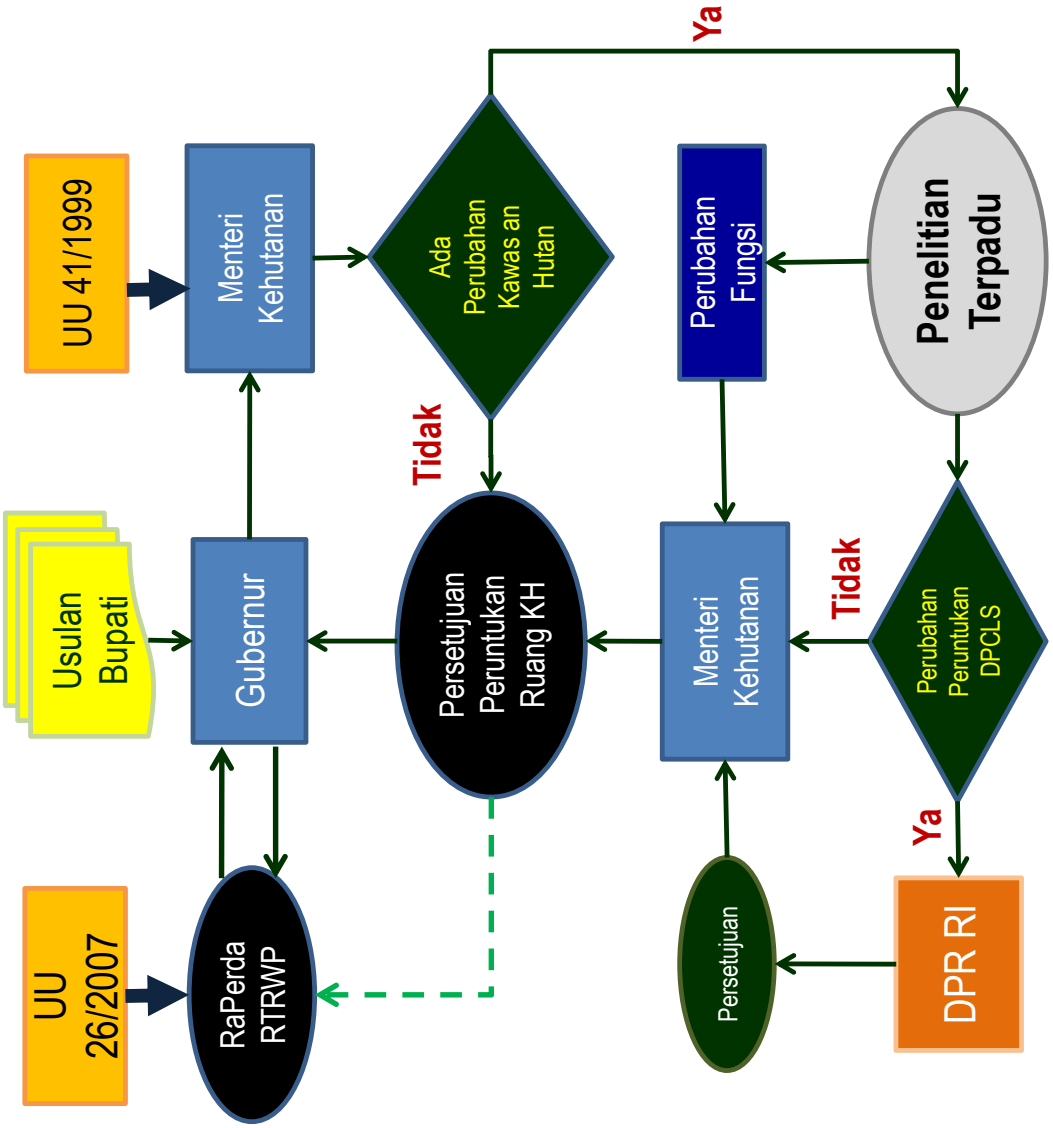

TABEL I.1 PROGRES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN DALAM USULAN REVISI RTRWP

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Aceh	Peruntukan : 131.717 Ha Fungsi : 179.536 Ha Penunjukan : 31.275 Ha	Peruntukan : 80.256 Ha Fungsi : 130.542 Ha Penunjukan : 26.461 Ha SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Persub : S.33/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2014. Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS sudah di Include-kan seluas 37.640 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Aceh. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
2	Sumatera Utara	Peruntukan : 1.269.284 Ha Fungsi : 296.263 Ha Penunjukan : 35.429 Ha	Peruntukan : 642.716 Ha Fungsi : 207.362 Ha Penunjukan : 17.894 Ha Persub : S.407/Menhut-VII/2014, 18 September 2014	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti keputusan MA no 47p/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
3	Sumatera Barat	Peruntukan : 211.386 Ha Fungsi : 216.189 Ha Penunjukan : 13.544 Ha	Peruntukan : 126.286 Ha Fungsi : 147.213 Ha Penunjukan : 9.906 Ha SK.304/Menhut-II/2011; 9 Juni 2011 dan SK. 141/Menhut-II/2012; 15 Maret 2012 (DPR setuju untuk areal DPCLS) Persub : S.628/Menhut-VII/2009; 12 Agustus 2009	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan Keputusan Menhutbun No. 422/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
4	Riau	Peruntukan : 3.530.696 Ha Fungsi : 1.087.707 Ha Penunjukan : 46.914 Ha	Peruntukan : 1.703.374 Ha Fungsi : 717.543 Ha Penunjukan : 1.152 Ha SK.673/Menhut-II/2014, 8 Agustus 2014, menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI terdapat tambahan perubahan peruntukan seluas 65.125 ha ➔ SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 jo SK.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/2016	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau. 2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/ PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menlhk/ Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menlhk/ Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 4. Persub S.438/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
				5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016. 6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
5	Kepulauan Riau	Peruntukan : 532.954 Ha Fungsi : 58.723 Ha Penunjukan : 2.370 Ha	Peruntukan : 399.078 Ha Fungsi : 146.962 Ha Penunjukan : 2.370 Ha SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri. 2. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI No. 0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014, telah diterbitkan Keutusan Menteri LHK No SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri 3. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.91/Menlhk-II/2015 tanggal 6 Maret 2015. 4. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
6	Jambi	Peruntukan : 107.047 Ha Fungsi : 72.245 Ha Penunjukan : 10.908 Ha	Peruntukan : 14.048 Ha Fungsi : 20.529 Ha SK.727/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub : S.11/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013 Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tgl 24 September 2014 (DPCLS sudah di Include-kan seluas 336 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Jambi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
7	Bengkulu	Peruntukan : 102.835 Ha Fungsi : 29.458 Ha Penunjukan : 101 Ha	Peruntukan : 2.192 Ha Fungsi : 31.013 Ha Penunjukan : 101 Ha SK.643/Menhut-II/2011; 10 November 2011 Persub : S.58/Menhut-VII/2012; 30 Januari 2012	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.784/Menhut-II/2012 tanggal27 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan Menhutbun No.421/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
8	Kepulauan Bangka Belitung	Peruntukan : 133.590 Ha Fungsi : 9.361Ha Penunjukan : 3.218Ha	Peruntukan : 19.131 Ha Fungsi : 10.878 Ha Penunjukan : 3.210 Ha SK. 798/Menhut-II/2012; 27 Desember 2012 Persub : S.110/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013	1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan No. SK.357/Menhut-II/2004 tanggal1 Oktober 2004. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
9	Sumatera Selatan	Peruntukan : 410.550 Ha Fungsi : 82.825Ha Penunjukan : 47.463Ha	Peruntukan : 230.204 Ha Fungsi : 44.299 Ha Penunjukan : 41.191 Ha SK.822/Menhut-II/2013; 19 November 2013 Persub : S.32/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2104 Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS pertama sudah di Include-kan seluas 19.045 ha)	1. Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK nomor SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 mengenai Kawasan Hutan Prov. Sumsel. 3. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
10	Lampung	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.519/Menhut-VII/2009; 6 Juli 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
11	DKI Jakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.97/Menhut-VII/2011; 3 Maret 2011	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
12	Jawa Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.276/Menhut-VII/2010; 10 Juni 2010	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
13	Banten	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.277/Menhut-VII/2010; 10 Juni 2011	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
14	Jawa Tengah	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.933/Menhut-VII/2009; 11 Desember 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
15	DI. Yogyakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.932/Menhut-VII/2009; 11 Desember 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
16	Jawa Timur	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.581/Menhut-VII/2010; 11 November 2010	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Perubahan Keputusan Menhutbun No. 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
17	Bali	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.728/Menhut-VII/2009; 14 September 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
18	Nusa Tenggara Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.727/Menhut-VII/2009; 14 September 2009	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
19	Nusa Tenggara Timur	Peruntukan : 213.195 Ha Fungsi : 21.461 Ha Penunjukan : 24.518 Ha	Peruntukan : 54.163 Ha Fungsi : 12.168 Ha Penunjukan : 11.811 Ha SK. 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 Persub : S.582/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/6/2016 tgl 13 Juni 2016	1. Pemerintah NTT telah mengajukan usulan perubahan Kawasan hutan sesuai Surat Gubernur NTT : • Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013 tanggal 11 Oktober 2013. • Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013 tanggal 20 November 2013 • Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tanggal 5 Juni 2014 • Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015 tanggal 15 April 2015. 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016; 11 Mei 2016 3. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.237/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016.
20	Kalimantan Barat	Peruntukan : 2.355.730 Ha Fungsi : 727.727Ha Penunjukan : 236.133Ha	Peruntukan : 554.137 Ha Fungsi : 352.772 Ha Penunjukan : 52.386 Ha SK.936/Menhut-II/2013, 20 Desember 2013. Persub No : S.26/Menhut-VII/2014; 10 Januari 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 69.294 Ha.
21	Kalimantan Tengah	Peruntukan : 2.922.312 Ha Fungsi : 3.900.656Ha Penunjukan : 944.715Ha	Peruntukan : 1.168.656 Ha Fungsi : 689.666 Ha Penunjukan : 29.672 Ha SK.292/Menhut-II/2011; 31 Mei 2011. Persub No : S.431/Menhut-VII/2012; 28 September 2012.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Keputusan Mentan No. 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
22	Kalimantan Timur	Peruntukan : 2.534.518 Ha	Peruntukan : 469.352 Ha	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.718/Menhut-

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		Fungsi : 625.326 Ha Penunjukan : 172.830 Ha	Fungsi : 276.240 Ha Penunjukan : 11.732 Ha SK.554/Menhut-II/2013; 2 Agustus 2013. Persub No : S.519/Menhut-VII/2013; 5 September 2013.	II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
23	Kalimantan Selatan	Peruntukan : 270.293 Ha Fungsi : 47.851 Ha Penunjukan : 280.319 Ha	Peruntukan : 59.503 Ha Fungsi : 99.594 Ha Penunjukan : 39.747 Ha SK.432/Menhut-II/2009; 22 Juli 2009. Persub No : S.518/Menhut-VII/2009; 6 Juli 2009.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
24	Gorontalo	Peruntukan : 35.832 Ha Fungsi : 95.395 Ha Penunjukan : 5.951 Ha	Peruntukan : 23.604 Ha Fungsi : 55.553 Ha Penunjukan : 3.787 Ha SK.324/Menhut-II/2010; 25 Mei 2010. Persub No : S.238/Menhut-VII/2010; 14 Mei 2010.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
25	Sulawesi Utara	Peruntukan : 48.591 Ha Fungsi : 7.250 Ha Penunjukan : 2.589 Ha	Peruntukan : 7.037 Ha Fungsi : 761 Ha Penunjukan : 290 Ha SK.434/Menhut-II/2013; 17 Juni 2013. Persub No : S.521/Menhut-VII/2013; 5 September 2013.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
26	Sulawesi Tengah	Peruntukan : 982.823 Ha Fungsi : 321.446 Ha Penunjukan : 1.204 Ha	Peruntukan : 101.071 Ha Fungsi : 42.788 Ha Penunjukan : 91 Ha SK.635/Menhut-II/2013; 24 September 2013 Sebagaimana telah diperbaharui melalui SK.708/Menhut-II/2014; 22 Agustus 2014. Persub No. S.884/Menhut-VII/2014; 1 September 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
27	Sulawesi Selatan	Tidak ada usulan perubahan	KSA/KPA : 851.277 ha HL : 1.232.683 ha HPT : 494.846 ha HP : 124.024 ha HPK : 22.976 ha SK. 434/Menhut-II/2009; 23 Juli 2009.	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
28	Sulawesi Tenggara	Peruntukan : 310.165 Ha Fungsi : 304.924 Ha	Peruntukan : 110.105 Ha Fungsi : 115.111 Ha SK.465/Menhut-II/2011; 9 Agustus 2011. Persub No : S. 61/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai SK .465/Menhut-II/2011, tanggal 9 Agustus 2011. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 49.195 Ha.
29	Sulawesi Barat	Peruntukan : 168.860 Ha Fungsi : 294.630 Ha	Peruntukan : 73.556 Ha Fungsi : 251.600 Ha SK.726/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub No : S. 62/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
30	Maluku	Peruntukan :1.525.376 Ha Fungsi : 296.545 Ha Penunjukan : 7.691 Ha	Peruntukan : 364.115 Ha Fungsi : 20.668 Ha Penunjukan : 3.313 Ha SK. 871/Menhut-II/2013; 6 Desember 2013. Persub No. S.27/Menhut-VII/2014; 10 Januari 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
31	Maluku Utara	Peruntukan : 950.736 Ha Fungsi : 384.773 Ha Penunjukan : 24.719 Ha	Peruntukan : 273.361 Ha Fungsi : 92.222 Ha Penunjukan : 5.081 Ha SK.490/Menhut-II/2012; 5 September 2012 Persub No : S.427/Menhut-VII/2012; 26 September 2012	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.302/Menhut-II/2014 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
32	Papua	Peruntukan : 1.278.623 Ha Fungsi : 6.199.496 Ha Penunjukan : 48.160 Ha	Peruntukan : 376.385 Ha Fungsi : 5.736.830 Ha Penunjukan : 45.258 Ha SK.458/Menhut-II/2012; 15 Agustus 2012 Persub No : S. 409/Menhut-VII/2012; 11 September 2011	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menhutbun No. 891/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah TK I Irian Jaya. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
33	Papua Barat	Peruntukan : 979.452 Ha Fungsi : 1.032.759 Ha Penunjukan : 23.870 Ha	Peruntukan : 243.045 Ha Fungsi : 438.220 Ha Penunjukan : 23.934 Ha SK.710/Menhut-II/2014; 27 Agustus 2014 Persub No. S.406/Menhut-VII/2014; 18	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
			September 2014	3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 50.356 Ha.

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d November 2016

TABEL I.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI RKTN 2011 - 2030

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6
Pembaharuan sistem	Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan perundangan (cth: Revisi Peraturan Kehutanan Terkait perijinan).	√			
	Transformasi teknologi dan kelembagaan	√			
	Perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan	√			
	Pembangunan *baseline* sistem informasi kehutanan	√			
	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan	√			
Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan	Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)	√			
	Penyelesaian review RTRWP tepat waktu	√			
	Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan	√	√		
	Peningkatan produktifitas hutan	√	√	√	√
	Penerapan multi sistem dalam pengelolaan kawasan hutan (cth: *Joint Production*)	√	√	√	√
	Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan	√	√	√	√
	Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi	√	√	√	√
	Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	√	√	√	√
	Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	√	√	√	√
	Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK	√	√	√	√
	Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	√	√	√	√
	Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)	√	√	√	√

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6
Pengembangan sistem insentif dan disinsentif	Pengalokasian DAK-Kehutanan dan dana Dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (perencanaan, pengelolaan)		√	√	√
	Pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya	√	√	√	√
	Insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verfikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan	√	√	√	√
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Penetapan berbagai tema riset (cth: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan)	√	√	√	√
	Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan	√	√	√	√
	Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan	√	√	√	√
	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.	√	√	√	√
Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH)	√	√		
	Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi	√	√	√	√
	Pemberian kewenangan yang lebih jelas terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi	√	√		
Peningkatan Koordinasi lintas sektor/ kementerian	Peningkatan pemanfaatan potensi penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait (cth: pemanfaatan sarjana penggerak desa)	√	√	√	√
	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan (cth: transportasi menuju taman nasional)	√	√	√	
	Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan	√	√		
	Promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK	√	√	√	√
	Penggunaan PDB Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi nasional		√	√	√

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terintegrasi	√	√	√	√
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan	√	√	√	√
	Peningkatan peran penyuluh kehutanan	√	√	√	√
	Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan	√	√	√	√
	Peningkatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah	√	√	√	√
	Pengembangan SDM Kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah	√	√	√	√
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan pusat dan daerah	√	√	√	√
	Standardisasi kompetensi SDM Kehutanan	√	√	√	√
Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global	Peningkatan kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan	√	√	√	√
	Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global	√	√	√	√
	Peningkatan peran kehutanan Indonesia dalam kepemimpinan regional dan global	√	√	√	√
Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan	Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten	√	√	√	√
	Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum	√	√	√	√

Sumber : Dokumen RKTN 2011-2030

TABEL I.3 HASIL ANALISIS KAWASAN BERDASARKAN FUNGSI (JUTA HEKTAR) DALAM DOKUMEN RKTN 2011 - 2030

Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan				
	HK	HL	HP		
			Tetap	Terbatas	Konversi
Kawasan untuk Konservasi	23,20	-	-	-	-
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	-	22,91	1,45	0,61	3,42
Kawasan untuk Rehabilitasi	3,62	4,14	2,78	2,23	0,75
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	-	-	26,18	20,17	8,18
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	-	1,81	2,19	1,45	1,53
Kawasan untuk Non Kehutanan	-	-	-	-	4,06
Jumlah	**26,82**	**28,86**	**32,60**	**24,46**	**17,94**

Sumber : Dokumen RKTN 2011-2030

TABEL I.4 LUAS ARAHAN PEMANFAATAN PADA TAHUN 2030 (JUTA HEKTAR)

Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan					Jumlah
	HK	HL	HP			
			Tetap	Terbatas	Konversi	
Kawasan untuk Konservasi	23,20	-	-	-	-	23,20
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	-	22,91	1,45 (+3,42)	0,61	Arahan menjadi HP	28,40
Kawasan untuk Rehabilitasi	3,62	3,32	2,23 (+0,60)	1,78	80% sisa arahan menjadi HP	11,55
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	-	-	20,93 (+6,55)	16,14	80% sisa arahan menjadi HP	43,62
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	-	1,44	1,76 (+1,22)	1,15	80% sisa arahan menjadi HP	5,57
Kawasan untuk Non Kehutanan						18,34
Jumlah	**26,82**	**27,67**	**26,37 (+11,79)**	**19,68**	**-**	
Luas Efektif Kawasan Hutan	**112,34 (85% dari sisa luas total kawasan saat ini)**					

Sumber: Dokumen RKTN Tahun 2011-2030

PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

DATA DAN INFORMASI
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

GAMBAR 2. LUAS KAWASAN HUTAN INDONESIA

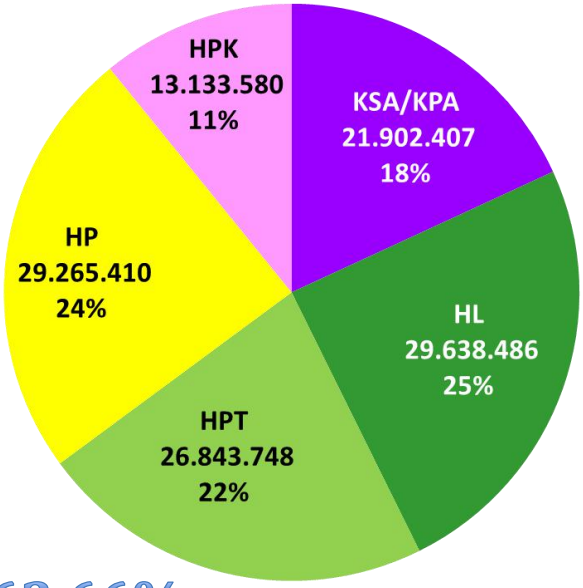

KSA/KPA	21.902.407	18,13%
HL	29.638.486	24,54%
HPT	26.843.748	22,22%
HP	29.265.410	24,23%
HPK	13.133.580	10,87%

63,66%
120.783.631

± **63,66 %** dari luas daratan Indonesia

Luas kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan konservasi perairan seluas ± 5.531.934 Ha

Luas daratan Indonesia 1.890.739 km2)
(SK Kepala BIG Nomor 20 Tahun 2013)

GAMBAR 3. SKEMA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

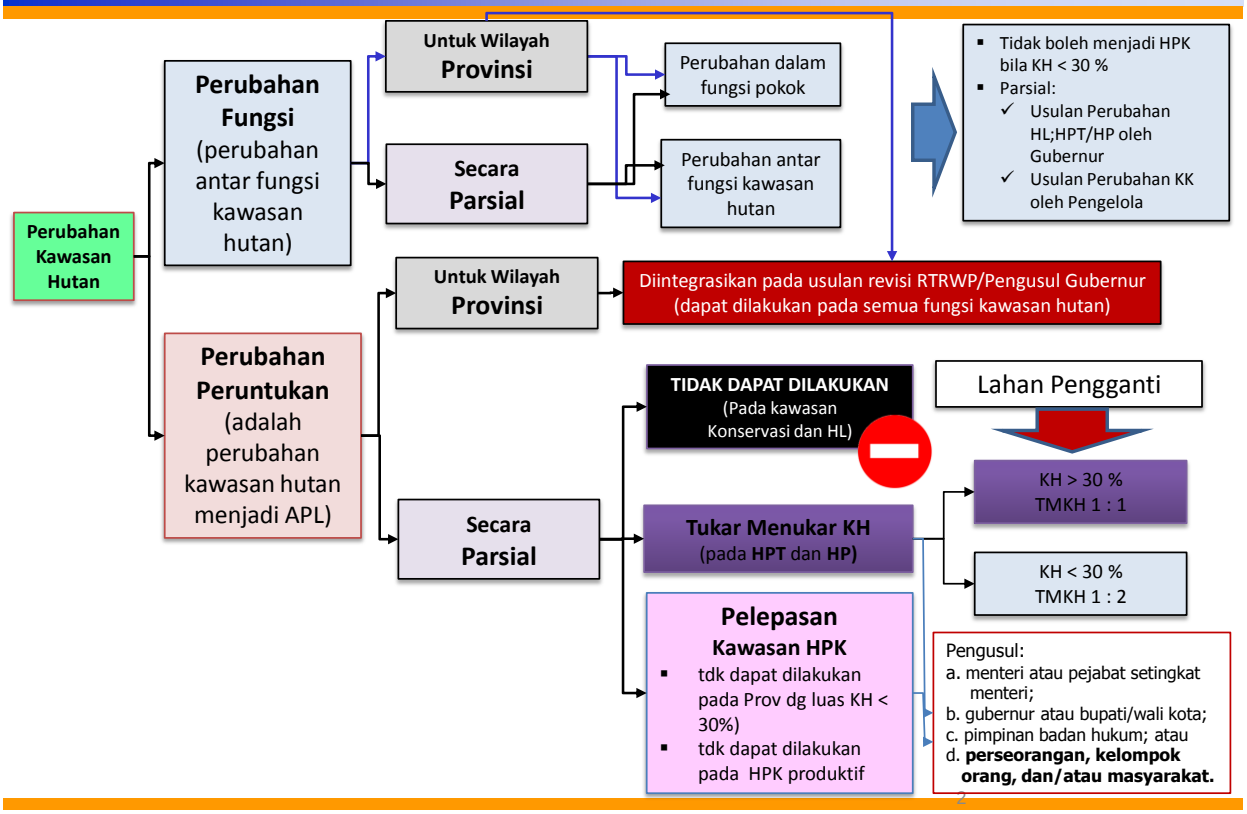

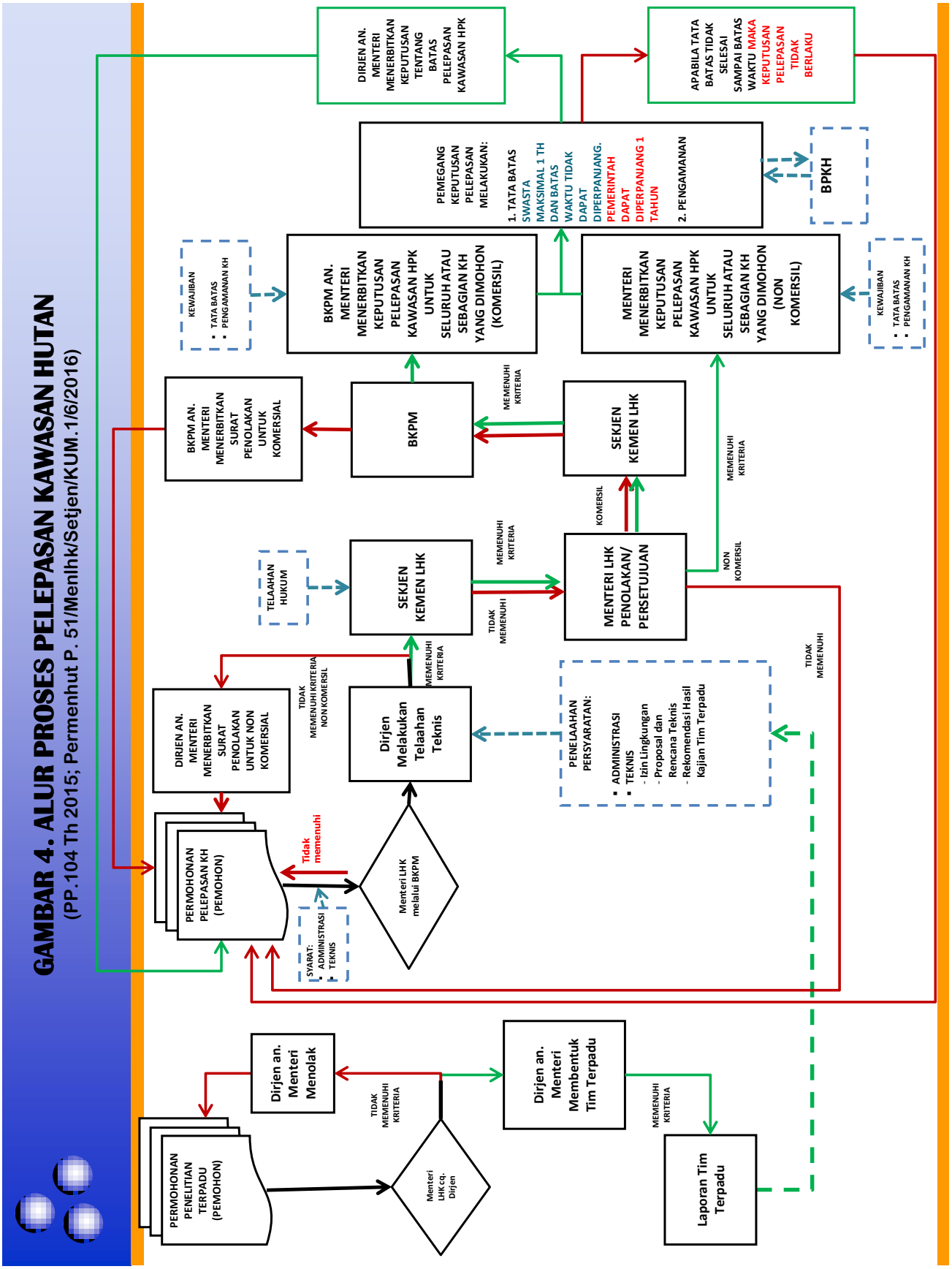
GAMBAR 4. ALUR PROSES PELEPASAN KAWASAN HUTAN
(PP.104 Th 2015; Permenhut P. 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016)
PERMOHONAN PENELITIAN TERPADU (PEMOHON)
Dirjen an. Menteri Menolak
TIDAK MEMENUHI KRITERIA
Menteri LHK cq. Dirjen
Dirjen an. Menteri Membentuk Tim Terpadu
MEMENUHI KRITERIA
Laporan Tim Terpadu
PERMOHONAN PELEPASAN KH (PEMOHON)
Tidak memenuhi
SYARAT:
ADMINISTRASI
TEKNIS
Menteri LHK melalui BKPM
DIRJEN AN. MENTERI MENERBITKAN SURAT PENOLAKAN UNTUK NON KOMERSIAL
TIDAK MEMENUHI KRITERIA NON KOMERSIL
Dirjen Melakukan Telaahan Teknis
MEMENUHI KRITERIA
PENELAAHAN PERSYARATAN:
ADMINISTRASI
TEKNIS
- Izin Lingkungan
- Proposal dan Rencana Teknis
- Rekomendasi Hasil Kajian Tim Terpadu
TIDAK MEMENUHI
TELAAHAN HUKUM
SEKJEN KEMEN LHK
MEMENUHI KRITERIA
TIDAK MEMENUHI
MENTERI LHK PENOLAKAN/ PERSETUJUAN
KOMERSIL
NON KOMERSIL
SEKJEN KEMEN LHK
MEMENUHI KRITERIA
BKPM
BKPM AN. MENTERI MENERBITKAN SURAT PENOLAKAN UNTUK KOMERSIAL
KEWAJIBAN
TATA BATAS
PENGAMANAN KH
BKPM AN. MENTERI MENERBITKAN KEPUTUSAN PELEPASAN KAWASAN HPK UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN KH YANG DIMOHON (KOMERSIL)
MENTERI MENERBITKAN KEPUTUSAN PELEPASAN KAWASAN HPK UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN KH YANG DIMOHON (NON KOMERSIL)
KEWAJIBAN
TATA BATAS
PENGAMANAN KH
PEMEGANG KEPUTUSAN PELEPASAN MELAKUKAN:
1. TATA BATAS SWASTA MAKSIMAL 1 TH DAN BATAS WAKTU TIDAK DAPAT DIPERPANJANG. PEMERINTAH DAPAT DIPERPANJANG 1 TAHUN
2. PENGAMANAN
BPKH
DIRJEN AN. MENTERI MENERBITKAN KEPUTUSAN TENTANG BATAS PELEPASAN KAWASAN HPK
APABILA TATA BATAS TIDAK SELESAI SAMPAI BATAS WAKTU MAKA KEPUTUSAN PELEPASAN TIDAK BERLAKU

GAMBAR 5. TAHAPAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (TMKH)

(PP.104 Th.2015; Permenhut P. 32/Menhut-II/2010 jo P. 27/Menhut-II/2014)

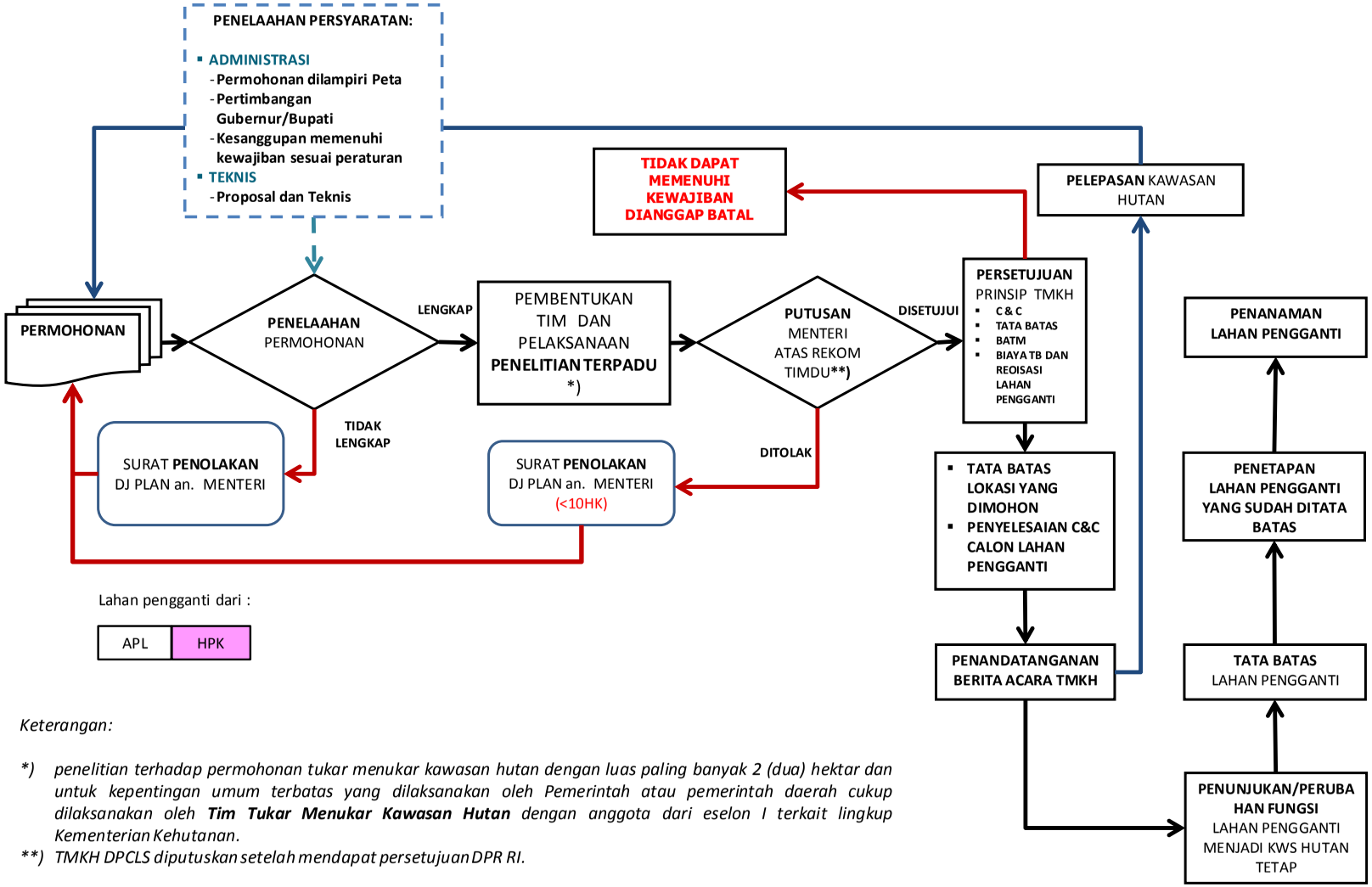

Keterangan:

) penelitian terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah cukup dilaksanakan oleh **Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan anggota dari eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan.*

***) TMKH DPCLS diputuskan setelah mendapat persetujuan DPR RI.*

TABEL II.1 LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI KEHUTANAN PERKEMBANGAN SK

No	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI			HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan
				Perairan	Daratan	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	D. I. Aceh	103/MenLHK-II/2015	02 April 2015	0,00	1.058.144,00	1.058.144,00	1.788.265,00	141.771,00	554.339,00	15.409,00	3.557.928,00	3.557.928,00
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24 Juni 2014	0,00	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.684,00	3.055.794,00	3.055.794,00
3	Sumatera Barat	35/Menhut-II/2013	15 Januari 2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00	2.380.058,00
4	Riau	314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016	20 April 2016	0,00	633.420,00	633.420,00	234.015,00	1.026.442,00	2.327.882,00	1.212.809,00	5.434.568,00	5.434.568,00
5	Jambi	863/Menhut-II/2014	29 September 2014	0,00	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00	2.098.535,00
6	Sumatera Selatan	454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016	17 Juni 2016	49.104,00	741.681,00	790.785,00	578.279,00	213.918,00	1.713.880,00	160.996,00	3.408.754,00	3.457.858,00
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	0,00	462.965,00	462.965,00	250.750,00	173.280,00	25.873,00	11.763,00	924.631,00	924.631,00
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23 Agustus 2000	0,00	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	0,00	1.004.735,00	1.004.735,00
9	Kep. Bangka Belitung	798/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	0,00	35.454,00	35.454,00	185.531,00	0,00	432.884,00	693,00	654.562,00	654.562,00
10	Kepulauan Riau	76/MenLHK-II/2015	06 Maret 2015	0,00	12.294,72	12.294,72	97.662,65	118.833,75	78.830,37	74.510,24	382.131,73	382.131,73
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02 Agustus 2000	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	0,00	158,35	0,00	475,45	108.475,45
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04 Juli 2003	0,00	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	0,00	816.603,00	816.603,00
13	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01 Oktober 2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	0,00	647.133,00	757.250,00
14	D.I Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29 Juni 2000	0,00	910,34	910,34	2.057,90	0,00	13.851,28	0,00	16.819,52	16.819,52
15	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21 Juli 2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	0,00	782.772,00	0,00	1.357.640,00	1.361.146,00
16	Banten	419/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	0,00	201.787,00	253.254,00
17	B a l i	433/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	0,00	127.271,01	130.686,01
18	N T B	598/Menhut-II/2009	02 Oktober 2009	11.121,00	168.044,00	179.165,00	430.485,00	286.700,00	150.609,00	0,00	1.035.838,00	1.046.959,00
19	N T T	357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/ 2016	11 Mei 2016	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	288.214,00	78.494,00	1.485.917,00	1.742.399,00
20	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014	02 September 2014	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.127.365,00	197.918,00	8.198.656,00	8.389.601,00
21	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25 September 2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00
22	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	0,00	213.285,00	213.285,00	526.425,00	126.660,00	762.188,00	151.424,00	1.779.982,00	1.779.982,00
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014	29 Agustus 2014	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.848.243,00	5.045.879,00	4.077.346,00	179.699,00	13.855.833,00	13.855.833,00
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02 September 2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00	764.739,00
25	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014	29 September 2014	340.119,00	648.374,00	988.493,00	1.276.087,00	1.390.971,00	401.814,00	217.322,00	3.934.568,00	4.274.687,00
26	Sulawesi Selatan	434/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	606.804,00	244.463,00	851.267,00	1.232.683,00	494.846,00	124.024,00	22.976,00	2.118.992,00	2.725.796,00
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09 Agustus 2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00
28	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	0,00	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00
29	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29 September 2014	0,00	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.092.376,00
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29 September 2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00	3.919.617,00
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01 Mei 2013	0,00	218.499,00	218.499,00	584.058,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00
32	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22 September 2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.787,00	9.713.137,00
33	Papua	782/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00	30.387.499,00
				5.321.321,00	**22.113.098,99**	**27.434.419,99**	**29.674.495,37**	**26.794.137,01**	**29.239.263,10**	**12.835.518,24**	**120.656.512,71**	**125.977.833,71**

catatan :

Luas kawasan hutan perfungsi didasarkan/mencuplik pada lembar SK kawasan hutan yang di terbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D Juni 2016

TABEL II.2 PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN

No.	Provinsi	Realisasi s/d Tahun 2015		Per November Tahun 2016				Realisasi s/d November Tahun 2016	
		Batas Luar	Batas Fungsi	Batas Luar		Total Batas Luar	Batas Fungsi	Total Batas Luar	Batas Fungsi
				SEMENTARA	DEFINITIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	Aceh	4.583,63	1.233,43	283,50	165,55	165,55	-	4.749,18	1.233,43
2	Sumatera Utara	8.679,32	2.010,96	-	556,35	556,35	-	9.235,67	2.010,96
3	Sumatera Barat	4.002,41	1.578,70	-	-	-	-	4.002,41	1.578,70
4	Riau	8.760,42	1.724,09	-	213,14	213,14	-	8.973,56	1.724,09
5	Jambi	3.736,06	800,17	3,39		-	-	3.736,06	800,17
6	Sumatera Selatan	5.161,76	1.051,58	-	48,00	48,00	-	5.209,76	1.051,58
7	Bengkulu	1.524,49	489,85	-	5,00	5,00	-	1.529,49	489,85
8	Lampung	3.273,02	25,01	-	-	-	-	3.273,02	25,01
9	Kep. Bangka Belitung	548,20	66,00	107,56		-	-	548,20	66,00
10	Kepulauan Riau	672,31	861,91	517,33	478,13	478,13	-	1.150,44	861,91
11	DKI Jakarta	44,00	-	-	-	-	-	44,00	-
12	Jawa Barat	20.190,45	17,27	-	16,60	16,60	-	20.207,05	17,27
13	Jawa Tengah	19.064,65	-	-	-	-	-	19.064,65	-
14	D.I. Yogyakarta	276,28	-	-	-	-	-	276,28	-
15	Jawa Timur	19.394,80	43,56	-	-	-	-	19.394,80	43,56
16	Banten	46,91	-	-	-	-	-	46,91	-
17	Bali	1.610,00	240,12	-	-	-	-	1.610,00	240,12
18	Nusa Tenggara Barat	4.806,47	856,16	-	122,68	122,68	-	4.929,15	856,16
19	Nusa Tenggara Timur	5.276,35	13,30	-	-	-	-	5.276,35	13,30
20	Kalimantan Barat	9.828,86	8.660,30	607,35	671,22	671,22	19,11	10.500,08	8.679,41
21	Kalimantan Tengah	3.969,90	3.668,22	418,05	485,08	485,08	87,45	4.454,98	3.755,67
22	Kalimantan Selatan	11.508,82	3.341,58	115,75	113,65	113,65	93,90	11.622,47	3.435,48
23	Kalimantan Timur	9.395,16	11.275,91	-	287,77	287,77	7,03	9.682,92	11.282,95
24	Sulawesi Utara	2.775,56	7.773,10	61,44	62,81	62,81	-	2.838,37	7.773,10
25	Sulawesi Tengah	11.423,67	6.614,62	246,16	238,00	238,00	-	11.661,67	6.614,62
26	Sulawesi Selatan	710,63	1.653,77	-	-	-	-	710,63	1.653,77
27	Sulawesi Tenggara	5.789,45	4.228,80	-	-	-	-	5.789,45	4.228,80
28	Gorontalo	5.888,82	1.013,53	130,90	137,90	137,90	-	6.026,72	1.013,53
29	Sulawesi Barat	794,94	1.329,52	223,64	118,91	118,91	-	913,85	1.329,52
30	Maluku	7.962,38	4.070,25	-	-	-	-	7.962,38	4.070,25
31	Maluku Utara	373,37	1.935,91	125,13	81,98	81,98	77,57	455,35	2.013,48
32	Papua Barat	1.367,01	2.505,18	252,23	-	-	-	1.367,01	2.505,18
33	Papua	12.093,19	12.587,22	101,96	90,75	90,75	-	12.183,94	12.587,22
JUMLAH		**195.533,29**	**81.670,03**	**3.194,38**	**3.893,51**	**3.893,51**	**285,06**	**199.426,80**	**81.955,09**

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Cat:

(-) tidak ada data

Total Batas Luar yang dipakai adalah Batas Luar Definitif

TABEL II.3 PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS

NO	PROVINSI	Realisasi s/d Tahun 2015		Per November Tahun 2016		Realisasi s/d November Tahun 2016	
		BA	KM	BA	KM	BA	KM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	71	5.807,32			71	5.807,32
2	Sumatera Utara	88	13.218,76			88	13.218,76
3	Sumatera Barat	172	6.350,62			172	6.350,62
4	Riau	122	11.589,34	9	144.221,30	131	155.810,64
5	Jambi	149	129.398,83			149	129.398,83
6	Sumatera Selatan	193	7.545,27			193	7.545,27
7	Bengkulu	120	2.467,04			120	2.467,04
8	Lampung	80	4.166,59	10	50.833,24	90	54.999,83
9	Kep. Bangka Belitung	64	51.381,25			64	51.381,25
10	Kepulauan Riau	8	115,79			8	115,79
11	DKI Jakarta	7	-	-	-	7	-
12	Jawa Barat	127	520,44	5	23,13	132	543,57
13	Jawa Tengah	57	85,58	1	15,01	58	100,59
14	D.I. Yogyakarta	5	-	-	-	5	-
15	Jawa Timur	35	534,65	1	3,41	36	538,06
16	Banten	-	-	-	-	-	-
17	Bali	40	1.625,80	-	-	40	1.625,80
18	Nusa Tenggara Barat	100	5.365,80	-	-	100	5.365,80
19	Nusa Tenggara Timur	103	7.247,82	12	155,76	115	7.403,58
20	Kalimantan Barat	536	43.150,50	5	296,87	541	43.447,37
21	Kalimantan Tengah	116	12.920,82	21	1.063,00	137	13.983,82
22	Kalimantan Selatan	132	11.584,77	8	371,70	140	11.956,47
23	Kalimantan Timur	576	54.235,62			576	54.235,62
24	Sulawesi Utara	73	6.953,03	1	49,79	74	7.002,82
25	Sulawesi Tengah	272	15.586,33			272	15.586,33
26	Sulawesi Selatan	140	10.457,65			140	10.457,65
27	Sulawesi Tenggara	130	11.643,73			130	11.643,73
28	Gorontalo	56	1.579,66			56	1.579,66
29	Sulawesi Barat	11	1.315,32			11	1.315,32
30	Maluku	190	9.689,87			190	9.689,87
31	Maluku Utara	43	1.505,90			43	1.505,90
32	Papua Barat	191	16.247,35			191	16.247,35
33	Papua	110	10.832,31	1	15,41	111	10.847,72
JUMLAH		4.117	455.123,78	74	197.048,61	4.191	652.172,39

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Cat:

(-) tidak ada data

TABEL II.4 PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN

NO	PROVINSI	Realisasi s/d Tahun 2015		Per November Tahun 2016		Realisasi s/d November Tahun 2016	
		UNIT	Ha	UNIT	Ha	UNIT	Ha
1	2	11	12	11	12	11	12
1	Nangroe Aceh Darussalam	19	919.878,95	-	-	19	919.878,95
2	Sumatera Utara	43	1.716.511,12	-	-	43	1.716.511,12
3	Sumatera Barat	51	1.299.438,37	-	-	51	1.299.438,37
4	Riau	55	2.188.291,01	-	-	55	2.188.291,01
5	Jambi	30	1.035.773,86	-	-	30	1.035.773,86
6	Sumatera Selatan	53	3.144.052,63	-	-	53	3.144.052,63
7	Bengkulu	54	689.972,63	-	-	54	689.972,63
8	Lampung	27	576.071,52	-	-	27	576.071,52
9	Kepulauan Bangka Belitung	76	527.221,26	-	-	76	527.221,26
10	Kepulauan Riau	28	109.060,97	-	-	28	109.060,97
11	DKI Jakarta	4	474,69	-	-	4	474,69
12	Jawa Barat	118	595.215,14	5,00	17.302,03	123	612.517,17
13	Jawa Tengah	101	451.519,76	32,00	279.698,52	133	731.218,28
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	10	7.529,09	-	-	10	7.529,09
15	Jawa Timur	70	274.653,36	43,00	480.037,61	113	754.690,97
16	Banten	10	156.753,65	9,00	81.484,80	19	238.238,45
17	Bali	40	193.727,58	-	-	40	193.727,58
18	Nusa Tenggara Barat	63	1.177.956,31	4,00	8.584,41	67	1.186.540,72
19	Nusa Tenggara Timur	91	772.928,76	44,00	171.207,19	135	944.135,95
20	Kalimantan Barat	152	6.135.968,46	4,00	74.549,16	156	6.210.517,62
21	Kalimantan Tengah	21	3.674.223,21	2,00	104.723,64	23	3.778.946,85
22	Kalimantan Selatan	43	1.529.903,48	1,00	57.541,50	44	1.587.444,98
23	Kalimantan Timur	94	10.221.279,30	2,00	130.089,68	96	10.351.368,98
24	Kalimantan Utara	9	231.750,78	2,00	77.456,20	11	309.206,98
25	Sulawesi Utara	59	291.587,52	5,00	118.948,44	64	410.535,96
26	Sulawesi Tengah	65	2.925.364,98	-	-	65	2.925.364,98
27	Sulawesi Selatan	66	1.963.859,45	3,00	103.354,19	69	2.067.213,64
28	Sulawesi Tenggara	47	3.180.312,96	-	-	47	3.180.312,96
29	Gorontalo	36	1.116.550,06	2,00	29.516,34	38	1.146.066,40
30	Sulawesi Barat	16	702.267,44	3,00	312.615,37	19	1.014.882,81
31	Maluku	127	2.704.363,05	-	-	127	2.704.363,05
32	Maluku Utara	58	1.340.131,16	-	-	58	1.340.131,16
33	Papua Barat	43	7.365.599,09	-	-	43	7.365.599,09
34	Papua	93	23.035.391,22	1,00	137.226,54	94	23.172.617,76
JUMLAH		**1.872**	**82.255.582,81**	**161**	**2.047.109,08**	**2.034**	**84.439.918,43**

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Cat:

(-) tidak ada data

TABEL II.5 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA

NO	PROVINSI	Realisasi s/d Tahun 2015	Per November Tahun 2016	Realisasi s/d Tahun 2016
		KM	KM	KM
1	2	3	4	5
1	Aceh	2.366,97	107,15	2.474,12
2	Sumatera Utara	1.973,28	-	1.973,28
3	Sumatera Barat	1.698,74	-	1.698,74
4	Riau	7.648,64	-	7.648,64
5	Jambi	3.161,87	-	3.161,87
6	Sumatera Selatan	2.554,95	-	2.554,95
7	Bengkulu	356,98	-	356,98
8	Lampung	52,35	-	52,35
9	Kep. Bangka Belitung	0,00	-	-
10	Kepulauan Riau	0,00	-	-
11	DKI Jakarta	0,00	-	-
12	Jawa Barat	0,00	-	-
13	Jawa Tengah	0,00	-	-
14	D.I. Yogyakarta	0,00	-	-
15	Jawa Timur	0,00	-	-
16	Banten	0,00	-	-
17	Bali	0,00	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	457,78	-	457,78
19	Nusa Tenggara Timur	0,00	-	-
20	Kalimantan Barat	9.629,87	148,05	9.777,92
21	Kalimantan Timur	14.073,51	410,49	14.484,00
22	Kalimantan Selatan	1.559,10	-	1.559,10
23	Kalimantan Tengah	14.616,14	149,60	14.765,74
24	Sulawesi Utara	1.613,78	-	1.613,78
25	Sulawesi Tengah	3.852,04	-	3.852,04
26	Sulawesi Selatan	1.188,61	-	1.188,61
27	Sulawesi Tenggara	920,05	-	920,05
28	Gorontalo	0,00	-	-
29	Sulawesi Barat	0,00	-	-
30	Maluku	7.275,38	-	7.275,38
31	Maluku Utara	246,47	-	246,47
32	Papua Barat	11.456,82	-	11.456,82
33	Papua	114,49	134,12	248,61
Jumlah		**86.817,82**	**949,41**	**87.767,23**

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Cat:

(-) tidak ada data

TABEL II.6 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HT

NO	PROVINSI	S/D Tahun 2015	Tahun 2016	S/D Tahun 2016
		KM	KM	KM
1	2	3	4	5
1	Aceh	1.066,00	-	1.066,00
2	Sumatera Utara	1.832,73	-	1.832,73
3	Sumatera Barat	2.189,16	-	2.189,16
4	Riau	2.215,01	1.145,03	3.360,04
5	Jambi	1.369,04	-	1.369,04
6	Sumatera Selatan	2.077,22	113,383	2.190,60
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-
16	Banten	-	-	-
17	Bali	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	231,47	-	231,47
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	391,81	479,38	871,19
21	Kalimantan Timur	2.575,34	316,37	2.891,71
22	Kalimantan Selatan	581,68	-	581,68
23	Kalimantan Tengah	427,15	154,66	581,81
24	Sulawesi Utara	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	-	-	-
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-
28	Gorontalo	101,32	-	101,32
29	Sulawesi Barat	-	-	-
30	Maluku	162,00	-	162,00
31	Maluku Utara	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-
33	Papua	-	-	-
Jumlah		**15.222,93**	**2.212,82**	**17.433,76**

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Cat:

(-) tidak ada data

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

1). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	70.755	-	-	70.755,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	40.390	-	-	40.390,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	32.686	-	-	32.685,70
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	11.076	-	-	11.075,56
15	D.I. Yogyakarta	1.001	-	-	1.000,66
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3.155	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	10.659	-	-	10.659,00
27	Sulawesi Selatan	22.063	-	-	22.063,10
28	Sulawesi Tenggara	4.000	-	-	4.000,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	153.575	-	-	153.575,00
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**349.359,02**	**-**	**-**	**349.359,02**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

2). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	2.725,00	-	-	2.725,00
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	6.351,22	-	-	6.351,22
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	583,00	-	-	583,00
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	5.170,00	-	-	5.170,00
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	1.942,00	-	-	1.942,00
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.990,00	-	165,00	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	8.750,00	-	-	8.750,00
22	Kalimantan Timur	2.460,00	-	-	2.460,00
23	Kalimantan Selatan	11.926,54	-	-	11.926,54
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	295,40	-	-	295,40
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**43.193,16**	**-**	**165,00**	**43.358,16**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

3). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	20.290,00	-	-	20.290,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	55,00	-	-	55,00
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	2.958,00	2.958,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	48.021,12	-	-	48.021,12
21	Kalimantan Tengah	53.125,00	-	-	53.125,00
22	Kalimantan Timur	59.285,00	-	-	59.285,00
23	Kalimantan Selatan	56.007,21	-	-	56.007,21
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	1.962,75	-	-	1.962,75
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	6.549,76	-	-	6.549,76
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**245.295,84**	**-**	**2.958,00**	**248.253,84**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

4). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	6.164	-	-	6.163,75
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	137.376	-	-	137.376,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	20.700	-	-	20.700,00
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	41.026	-	-	41.025,56
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	649,00	649,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	193	-	-	193,00
27	Sulawesi Selatan	145	-	-	145,00
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	7.650	-	-	7.650,00
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**213.253,31**	**-**	**649,00**	**213.902,31**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

5). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	14.747,00	-	-	14.747,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	13.388,00	-	-	13.388,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	1.218,43	-	1.218,43
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	234,50	-	-	234,50
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	3.200,00	-	-	3.200,00
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	1.030,00	-	-	1.030,00
JUMLAH		**32.599,50**	**1.218,43**	**-**	**33.817,93**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

6). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	213.221,00	-	-	213.221,00
3	Sumatera Barat	11.148,00	-	-	11.148,00
4	Riau	194.440,00	-	-	194.440,00
5	Kepulauan Riau	342,82	-	-	342,82
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.710,00	-	-	2.710,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	20.160,00	-	-	20.160,00
22	Kalimantan Timur	77.010,00	-	-	77.010,00
23	Kalimantan Selatan	31.790,00	-	-	31.790,00
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**550.821,82**	**-**	**-**	**550.821,82**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

7). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	14.780	-	-	14.780,00
5	Kepulauan Riau	12.950	-	-	12.950,00
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	133.075	-	-	133.075,00
22	Kalimantan Timur	31.685	-	-	31.685,00
23	Kalimantan Selatan	5.900	-	-	5.900,00
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**198.390,00**	**-**	**-**	**198.390,00**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

8). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	43.100,00	-	-	43.100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	-	-	3.242,00	3.242,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	25.560,00	-	-	25.560,00
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	24.804,80	-	-	24.804,80
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	617,00	-	-	617,00
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	352,62	-	-	352,62
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	600.250,00	-	-	600.250,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	11.759,00	-	-	11.759,00
27	Sulawesi Selatan	10.355,00	-	-	10.355,00
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	6.075,00	-	-	6.075,00
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**722.873,42**	**-**	**3.242,00**	**726.115,42**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

9). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	11.595	-	-	11.595,00
23	Kalimantan Selatan	66.000	-	-	66.000,00
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**77.595,00**	**-**	**-**	**77.595,00**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

10). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	1.200,00	-	-	1.200,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	59.120,00	-	-	59.120,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**60.320,00**	**-**	**-**	**60.320,00**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

11). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	800,00	-	-	800,00
3	Sumatera Barat	9.840,00	-	-	9.840,00
4	Riau	6.000,00	-	-	6.000,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	29.924,85	-	-	29.924,85
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	261,00	-	76.532,00	76.793,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	6.303,00	7.730,57	-	14.033,57
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	64,00	-	-	64,00
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	3.915,00	-	-	3.915,00
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	2.436,00	-	-	2.436,00
JUMLAH		**59.543,85**	**7.730,57**	**76.532,00**	**143.806,42**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

12). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	5.920,00	-	-	5.920,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	58.450,00	-	3.297,00	61.747,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	3.221,00	-	-	3.221,00
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**67.591,00**	**-**	**3.297,00**	**70.888,00**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

13). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	12.150	-	-	12.150,00
4	Riau	49.700	-	-	49.700,00
5	Kepulauan Riau	3.902	-	-	3.902,00
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	1.820	-	-	1.820,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	18.445	-	-	18.445,00
29	Sulawesi Barat	9.125	-	-	9.125,00
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	2.856	-	-	2.856,00
JUMLAH		**97.998,00**	**-**	**-**	**97.998,00**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

14). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	180,00	-	-	180,00
3	Sumatera Barat	29.486,00	-	-	29.486,00
4	Riau	133.238,00	-	-	133.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	15.269,75	-	-	15.269,75
21	Kalimantan Tengah	84.948,00	-	-	84.948,00
22	Kalimantan Timur	53.760,00	-	-	53.760,00
23	Kalimantan Selatan	38.630,00	-	-	38.630,00
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	17.555,00	-	-	17.555,00
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	2.860,00	-	-	2.860,00
32	Papua	234.730,00	89.951	-	324.681,00
33	Papua Barat	4.076,00	-	-	4.076,00
JUMLAH		**614.732,75**	**89.951,00**	**-**	**704.683,75**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

15). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	21.750,00	-	-	21.750,00
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	79,75	-	-	79,75
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	49.400,00	-	-	49.400,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	6.572,00	-	6.572,00
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**71.229,75**	**6.572,00**	**-**	**77.801,75**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

16). PERKEMBANGAN MUTASI ANTAR KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.688,65	-	-	5.688,65
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	-	-	28.238	28.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	27.200,00	-	-	27.200,00
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	14.295,75	-	-	14.295,75
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	6,50	-	-	6,50
15	D.I. Yogyakarta	283,58	-	-	283,58
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	71.645,64	-	71.645,64
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	300.040,00	-	-	300.040,00
22	Kalimantan Timur	61.850,00	-	-	61.850,00
23	Kalimantan Selatan	7.563,60	-	-	7.563,60
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	24.669,00	-	-	24.669,00
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	15.381,90	-	-	15.381,90
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	15,00	15,00
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**456.978,98**	**71.645,64**	**28.253,00**	**556.877,62**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

17). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	490,00	-	-	980,00
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	4.158,00	4.158,00
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	27.594,89	745,00	-	55.934,78
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**28.084,89**	**745,00**	**4.158,00**	**61.072,78**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

18). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONSERVASI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	169,95	-	-	339,90
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	25,00	-	-	50,00
23	Kalimantan Selatan	465,00	-	-	930,00
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**659,95**	**-**	**-**	**1.319,90**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

19). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	3.738,00	3.738,00
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**-**	**-**	**3.738,00**	**3.738,00**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :
- *: Nihil/Tidak ada kegiatan*

TABEL II.7 PERUBAHAN FUNGSI

20). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	9.477,00	9.477,00
13	Banten	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
JUMLAH		**-**	**-**	**9.477,00**	**9.477,00**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.8 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		S/D TAHUN 2016	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	Aceh	12	39.376,65	0	0	0	0	12	39.376,65
2	Sumatera Utara	12	28.054,00	0	0	0	0	12	28.054,00
3	Sumatera Barat	10	17.433,85	0	0	1	900,75	11	18.334,60
4	Riau	12	68.812,98	0	0	0	0	12	68.812,98
5	Jambi	14	78.412,53	0	0	0	0	14	78.412,53
6	Sumatera Selatan	33	122.140,80	0	0	0	0	33	122.140,80
7	Bengkulu	5	14.327,45	0	0	0	0	5	14.327,45
8	Lampung	16	134.147,20	0	0	0	0	16	134.147,20
9	Kep. Bangka Belitung	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	2	7.530,00	0	0	0	0	2	7.530,00
11	DKI Jakarta	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	D.I. Yogyakarta	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	2	2.950,00	0	0	0	0	2	2.950,00
19	Nusa Tenggara Timur	2	1.137,00	0	0	0	0	2	1.137,00
20	Kalimantan Barat	17	28.804,72	0	0	0	0	17	28.804,72
21	Kalimantan Tengah	34	71.387,87	0	0	0	0	34	71.387,87
22	Kalimantan Selatan	9	31.916,00	0	0	0	0	9	31.916,00
23	Kalimantan Timur	7	36.600,08	0	0	0	0	7	36.600,08
24	Kalimantan Utara	2	3.291,00	0	0	0	0	2	3.291,00
25	Sulawesi Utara	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	18	21.558,15	0	0	0	0	18	21.558,15
27	Sulawesi Selatan	6	4.015,35	0	0	0	0	6	4.015,35
28	Sulawesi Tenggara	21	37.035,71	0	0	0	0	21	37.035,71
29	Gorontalo	3	5.089,56	0	0	1	571,74	4	5.661,30
30	Sulawesi Barat	2	2.486,00	0	0	1	1244,78	3	3.730,78
31	Maluku	3	5.664,58	0	0	0	0	3	5.664,58
32	Maluku Utara	11	19.654,14	0	0	1	1057,16	12	20.711,30
33	Papua	16	92.336,70	0	0	0	0	16	92.336,70
34	Papua Barat	8	16.397,74	0	0	0	0	8	16.397,74
JUMLAH		**277**	**890.560,07**	**0**	**0,00**	**4**	**3.774,43**	**281**	**894.334,49**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan

0 : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.9 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN/PERTANIAN (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		S/D TAHUN 2016	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	Aceh	58	265.743,70	0	0	0	0	58	265.743,70
2	Sumatera Utara	27	142.762,33	0	0	0	0	27	142.762,33
3	Sumatera Barat	27	164.385,89	0	0	1	5.370,25	28	169.756,14
4	Riau	139	1.555.141,30	1	3.393,00	0	0	140	1.558.534,30
5	Jambi	44	366.925,98	0	0	0	0	44	366.925,98
6	Sumatera Selatan	43	358.320,27	0	0	0	0	43	358.320,27
7	Bengkulu	11	57.581,25	0	0	0	0	11	57.581,25
8	Lampung	8	83.964,15	0	0	0	0	8	83.964,15
9	Kep. Bangka Belitung	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10	Kepulauan Riau	9	65.027,87	0	0	0	0	9	65.027,87
11	DKI Jakarta	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12	Jawa Barat	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	Jawa Tengah	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14	D.I. Yogyakarta	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15	Jawa Timur	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16	Banten	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	Bali	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	3	846,86	0	0	0	0	3	846,86
19	Nusa Tenggara Timur	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
20	Kalimantan Barat	24	273.271,77	2	5.427,30	0	0	26	278.699,07
21	Kalimantan Tengah	89	896.363,17	4	26.421,68	7	26.772,94	100	949.557,79
22	Kalimantan Selatan	18	214.204,83	0	0	0	0	18	214.204,83
23	Kalimantan Timur	57	494.474,79	0	0	0	0	57	494.474,79
24	Kalimantan Utara								
25	Sulawesi Utara	1	2.000,00	0	0	0	0	1	2.000,00
26	Sulawesi Tengah	9	78.532,90	0	0	0	0	9	78.532,90
27	Sulawesi Selatan	3	4.584,50	0	0	0	0	3	4.584,50
28	Sulawesi Tenggara	3	20.784,20	0	0	1	4.003,45	4	24.787,65
29	Gorontalo	6	62.829,68	0	0	0	0	6	62.829,68
30	Sulawesi Barat	10	103.776,71	0	0	0	0	10	103.776,71
31	Maluku	13	13.044,07	0	0	0	0	13	13.044,07
32	Maluku Utara	11	59.949,14	0	0	0	0	11	59.949,14
33	Papua	34	894.324,13	0	0	1	12.245,80	35	906.569,93
34	Papua Barat	19	352.752,34	2	31.917,40	0	0	21	384.669,74
JUMLAH		**666**	**6.531.591,83**	**9**	**67.159,38**	**10**	**48.392,44**	**685**	**6.647.143,65**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Keterangan :

0 : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.10 PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

NO	PROPINSI	TAHUN 2015				S/D TAHUN 2015				TAHUN 2016				S/D TAHUN 2016			
		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar	
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13.571,00	0	0	1	13.571	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	1	277,30	1	271,10	0	0	1	12.781,10	1	277,30	2	13.052,20
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	1	13.414,00	1	13.414,00	0	0	0	0	1	13.414,00	1	13.414,00
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	1	1.373,67	1	1.308	3	2.837	2	1.338	0	0,00	0	0	3	2.837,34	2	1.338,00
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	1	850,50	1	119,60	0	0	0	0	1	850,50	1	119,60
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	10	5.268,88	10	1.126,58	0	0	0	0	10	5.268,88	10	1.126,58
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	7	362,22	6	121,89	1	177,8	1	163,9	8	540,02	7	285,79
14	D.I. Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0	23	1.773,07	22	1.152,48	5	93,86	5	65,92	28	1.866,93	27	1.218,40
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B a l i	1	84,14	1	62,14	16	187,14	16	138,14	0	0,00	0	0,00	16	187,14	16	138,14
18	N T B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	N T T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	2	1.198,00	1	578,80	0	0	0	0	2	1.198,00	1	578,80
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	**2**	**1.457,81**	**2**	**1.370,14**	**64**	**26.168,45**	**60**	**18.260,59**	**7**	**13.842,66**	**7**	**13.010,92**	**71**	**40.011,11**	**67**	**31.271,51**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data S/D November 2016

Ket :

TM : Tanah Masuk / *Compensated area for forest*

TK : Tanah Keluar / Converted forest area for non forest

0 : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.11 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN/PERTANIAN (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN) PER KOMODITI

NO	PERUNTUKAN	KOMODITI	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		S/D TAHUN 2016	
			UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	FASUM/FASOS /RELIGI	LOKASI PEMAKAMAN, PARIWISATA ALAM	2	129,44	0	0	0	0	2	129,44
2	FOOD ESTATE	TEBU	13	251.334,75	0	0	1	4.003,45	14	255.338,20
		PADI	0	0,00	1	2614	0	0	1	2.614,00
3	INDUSTRI	PABRIK KELAPA SAWIT	0	0,00	0	0,00	1	99,77	1	99,77
4		PABRIK PULP DAN PEMUKIMAN	1	1.200,00	0	0	0	0	1	1.200,00
5		PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU	1	341,22	0	0	0	0	1	341,22
6		PEMBANGUNAN PABRIK	1	227,29	0	0	0	0	1	227,29
7		PENAMPUNGAN SISA TAMBANG	1	33.982,00	0	0	0	0	1	33.982,00
8		PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN SARANA PRASARANA	1	1.432,22	0	0	0	0	1	1.432,22
9		SARANA INDUSTRI PULP DAN KERTAS	1	1.348,00	0	0	0	0	1	1.348,00
10		PERKEMBANGAN INDUSTRI TERPADU	1	4.260,56	1	3.393,00	0	0	2	7.653,56
11		PERKEMBANGAN PARIWISATA	1	21.829,12	0	0	0	0	1	21.829,12
12	LAIN-LAIN	PENGEMBANGAN WILAYAH	1	17.203,00	0	0	1	5.370,25	2	22.573,25
13	PERIKANAN	PERIKANAN	1	7.864,84	0	0	0	0	1	7.864,84
14		TAMBAK INTI RAKYAT	1	607,00	0	0	0	0	1	607,00
15		TAMBAK UDANG	1	200,00	0	0	0	0	1	200,00
16	PERKEBUNAN	COKLAT	13	137.169,62	0	0	0	0	13	137.169,62
17		COKLAT DAN BUAH-BUAHAN	1	500,00	0	0	0	0	1	500,00
18		COKLAT, LADA, TANAMAN PANGAN	1	8.996,06	0	0	0	0	1	8.996,06
19		KAKAO DAN KOPI ARABIKA	1	3.520,10	0	0	0	0	1	3.520,10
20		KARET	19	96.340,19	0	0	0	0	19	96.340,19
21		KARET DAN COKLAT	23	182.650,73	0	0	0	0	23	182.650,73
22		KARET DAN KENAF	1	10.934,80	0	0	0	0	1	10.934,80
23		KARET DAN LADA	1	2.000,00	0	0	0	0	1	2.000,00
24		KARET, COKLAT, KELAPA HIBRIDA	7	70.153,18	0	0	0	0	7	70.153,18
25		KARET, KAKAO, LADA	1	370,00	0	0	0	0	1	370,00
26		KARET, KELAPA	1	28.717,50	0	0	0	0	1	28.717,50
27		KARET, KELAPA SAWIT DAN UBI KAYU	1	8.498,00	0	0	0	0	1	8.498,00
28		KARET,COKLAT,BUAH-BUAHAN	1	4.942,60	0	0	0	0	1	4.942,60
29		KEDELAI	1	920,00	0	0	0	0	1	920,00
30		KELAPA & KAKAO	1	734,60	0	0	0	0	1	734,60
31		KELAPA HIBRIDA	3	66.859,65	0	0	0	0	3	66.859,65
32		KELAPA HIBRIDA DAN KAKAO	6	39.672,90	0	0	0	0	6	39.672,90
33		KELAPA HIBRIDA DAN KARET	1	6.466,70	0	0	0	0	1	6.466,70
34		KELAPA SAWIT	484	4.982.778,30	7	61.152,38	5	38.624,03	496	5.082.554,71
35		KELAPA SAWIT DAN COKLAT	3	16.920,00	0	0	0	0	3	16.920,00
36		KELAPA SAWIT DAN JARAK	1	9.987,00	0	0	0	0	1	9.987,00
37		KELAPA SAWIT KAKAO, KELAPA HIBRIDA	3	23.626,60	0	0	0	0	3	23.626,60

NO	PERUNTUKAN	KOMODITI	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		S/D TAHUN 2016	
			UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
38		KELAPA SAWIT, COKLAT DAN KARET	5	39.424,10	0	0	0	0	5	39.424,10
39		KELAPA SAWIT, DAN KARET	14	193.624,13	0	0	0	0	14	193.624,13
40		KELAPA, COKLAT, LADA	2	15.725,00	0	0	0	0	2	15.725,00
41		KOPI ARABIKA	1	7.740,00	0	0	0	0	1	7.740,00
42		LANDREFORM	1	758,00	0	0	0	0	1	758,00
43		PALA	1	2.365,00	0	0	0	0	1	2.365,00
44		PERKEBUNAN	28	152.433,49	0	0	0	0	28	152.433,49
45		PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN	1	1.233,13	0	0	0	0	1	1.233,13
46		PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	1	17.202,36	0	0	0	0	1	17.202,36
47		PERKEBUNAN NANAS	1	7.941,00	0	0	0	0	1	7.941,00
48		PERKEBUNAN PERCOBAAN BALITBANG	1	2.640,30	0	0	0	0	1	2.640,30
49		PERTANIAN, PERKEBUNAN	1	73,90	0	0	0	0	1	73,90
50		CACAO DAN KOPI ARABICA	1	3.680,00	0	0	0	0	1	3.680,00
51	PERMUKIMAN	TANAH KAS DESA	1	31.737,90	0	0	0	0	1	31.737,90
52	PERTANIAN LAINNYA	HARAMAY	1	7.333,65	0	0	0	0	1	7.333,65
53		PERKEBUNAN HARAMAY	1	597,00	0	0	0	0	1	597,00
54	PETERNAKAN	PETERNAKAN	1	403,00	0	0	0	0	1	403,00
55		PETERNAKAN SAPI	1	1.000,00	0	0	1	95	2	1.094,62
56	PERMUKIMAN DAN PERTANIAN	PEMUKIMAN, USAHA PERTANIAN/PERKEBUNAN	1	957,49	0	0	0	0	1	957,49
57	TRANSPORTASI/PERHUBUN	PELABUHAN CPO	1	4,41	0	0	0	0	1	4,41
58	GAN	BANDAR UDARA	0	0	0	0	1	200,32	1	200,32
		JUMLAH	**666**	**6.531.591,83**	**9**	**67.159,38**	**10**	**48.392,44**	**685**	**6.647.143,65**

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data November 2016

Keterangan :

0 : Nihil/Tidak ada kegiatan

PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

DATA DAN INFORMASI
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

TABEL III.1. PENETAPAN WILAYAH KPH

NO	PROVINSI	PENETAPAN KPH			
		SURAT KEPUTUSAN	LUAS (± ha)		
1	2	3	4		
1	Aceh	SK.932/Menhut-II/2014	KPHP 0 unit	=	-
		31 Desember 2014	KPHL 6 unit	=	2.521.333,000
			Jumlah 6 unit		**2.521.333,000**
2	Sumatera Utara	SK.102/Menhut-II/2010	KPHP 19 unit	=	1.831.884,000
		5 Maret 2010	KPHL 14 unit	=	1.364.497,000
			Jumlah 33 unit		**3.196.381,000**
3	Sumatera Barat	SK.798/Menhut-II/2009	KPHP 4 unit	=	483.915,000
		7 Desember 2009	KPHL 7 unit	=	1.195.649,000
			Jumlah 11 unit		**1.679.564,000**
4	***Kepulauan Riau***	***SK.452/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016***	***KPHP 5 unit***	**=**	***262.855,000***
		17 Juni 2016	***KPHL 1 unit***	**=**	***32.472,000***
			Jumlah 6 unit		***295.327,000***
5	Jambi	SK.77/Menhut-II/2010	KPHP 16 unit	=	1.442.969,000
		10 Februari 2010	KPHL 1 unit	=	15.965,000
			Jumlah 17 unit		**1.458.934,000**
6	Bengkulu	SK.91/Menhut-II/2010	KPHP 2 unit	=	147.729,000
		19 Februari 2010	KPHL 5 unit	=	324.935,000
			Jumlah 7 unit		**472.664,000**
7	Kepulauan Bangka Belitung	SK.797/Menhut-II/2009	KPHP 11 unit	=	548.169,000
		7 Desember 2009	KPHL 2 unit	=	93.632,000
			Jumlah 13 unit		**641.801,000**
8	Sumatera Selatan	SK.76/Menhut-II/2010	KPHP 14 unit	=	2.059.461,000
		10 Februari 2010	KPHL 10 unit	=	498.846,000
			Jumlah 24 unit		**2.558.307,000**
9	Lampung	SK.68/Menhut-II/2010	KPHP 7 unit	=	241.223,000
		28 Januari 2010	KPHL 9 unit	=	277.690,000
			Jumlah 16 unit		**518.913,000**
10	DI Yogyakarta	SK.439/Menhut-II/2007	KPH 1 unit	=	16.358,600
		13 Desember 2007			
			Jumlah		**16.358,600**
11	Bali	SK.800/Menhut-II/2009	KPHP 3 unit	=	104.392,420
		7 Desember 2009	KPHK 1 unit	=	1.373,500
			Jumlah		**105.765,920**
12	Nusa Tenggara Barat	SK.337/Menhut-VII/2009	KPHP 12 unit	=	440.993,000
		15 Juni 2009	KPHL 11 unit	=	448.217,000
			Jumlah 23 unit		**889.210,000**
13	Nusa Tenggara Timur	SK.591/Menhut-II/2010	KPHP 9 unit	=	558.353,000
		19 Oktober 2010	KPHL 13 unit	=	689.609,000
			Jumlah 22 unit		**1.247.962,000**
14	Kalimantan Barat	SK.67/Menhut-II/2010	KPHP 29 unit	=	5.601.268,000
		28 Januari 2010	KPHL 5 unit	=	1.372.345,000
			Jumlah 34 unit		**6.973.613,000**

NO	PROVINSI	PENETAPAN KPH			
		SURAT KEPUTUSAN	LUAS (± ha)		
1	2	3	4		
15	Kalimantan Selatan	SK.78/Menhut-II/2010	KPHP 7 unit	=	1.072.343,000
		10 Februari 2010	KPHL 3 unit	=	331.418,000
			Jumlah 10 unit		**1.403.761,000**
16	Kalimantan Tengah	SK.02/Menhut-II/2012	KPHP 29 unit	=	8.056.081,000
		09 Januari 2012	KPHL 4 unit	=	454.443,000
			Jumlah 33 unit		**8.510.524,000**
17	Kalimantan Timur dan	SK.674/Menhut-II/2011	KPHP 30 unit	=	11.832.454,000
	Kalimantan Utara	1 Desember 2011	KPHL 4 unit	=	734.685,000
			Jumlah 34 unit		**12.567.139,000**
18	Gorontalo	SK.65/Menhut-II/2010	KPHP 4 unit	=	340.741,000
		28 Januari 2010	KPHL 3 unit	=	240.759,000
			Jumlah 7 unit		**581.500,000**
19	Sulawesi Utara	SK.796/Menhut-VII/2009	KPHP 5 unit	=	346.781,000
		7 Desember 2009	KPHL 4 unit	=	83.207,000
			Jumlah 9 unit		**429.988,000**
20	Sulawesi Tengah	SK.79/Menhut-II/2010	KPHP 5 unit	=	717.427,000
		10 Februari 2010	KPHL 16 unit	=	2.481.659,000
			Jumlah 21 unit		**3.199.086,000**
21	Sulawesi Selatan	SK.88/Menhut-II/2011	KPHP 3 unit	=	308.569,000
		09 Maret 2011	KPHL 7 unit	=	1.505.921,000
			Jumlah 10 unit		**1.814.490,000**
22	Sulawesi Tenggara	SK.338/Menhut-VII/2009	KPHP 15 unit	=	1.028.833,000
		15 Juni 2009	KPHL 10 unit	=	1.028.089,000
			Jumlah 25 unit		**2.056.922,000**
23	Sulawesi Barat	SK.799/Menhut-VII/2009	KPHP 3 unit	=	379.153,000
		7 Desember 2009	KPHL 10 unit	=	720.674,000
			Jumlah 13 unit		**1.099.827,000**
24	Maluku	SK.66/Menhut-II/2010	KPHP 17 unit	=	1.968.571,000
		28 Januari 2010	KPHL 5 unit	=	239.293,000
			Jumlah 22 unit		**2.207.864,000**
25	Maluku Utara	SK.73/Menhut-II/2010	KPHP 11 unit	=	1.249.230,000
		8 Februari 2010	KPHL 5 unit	=	519.194,000
			Jumlah 16 unit		**1.768.424,000**
26	Papua	SK.481/Menhut-II/2009	KPHP 31 unit	=	10.776.722,000
		18 Agustus 2009	KPHL 25 unit	=	7.403.479,000
			Jumlah 56 unit		**18.180.201,000**
27	Papua Barat	SK.744/Menhut-II/2009	KPHP 16 unit	=	4.214.122,000
		19 Oktober 2009	KPHL 5 unit	=	1.190.623,000
			Jumlah 21 unit		**5.404.745,000**

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 6 Desember 2016

TABEL III.2. PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI

NO	KPHK	LOKASI/ALAMAT/KABUPATEN	PROVINSI	ARAHAN PENCADANGAN KPHK	PENETAPAN WILAYAH KPHK	
					Surat Keputusan	Luas (± ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	TN. Berbak	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur	Jambi	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009 4 Desember 2009	SK.774/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	62.700,00
2	TN. Ujung Kulon	Pandeglang	Banten	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009 4 Desember 2009	SK.775/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	122.956,00
3	TN. G. Halimun Salak	Lebak, Bogor, Sukabumi	Banten & Jawa Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009 4 Desember 2009	SK.776/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	113.357,00
4	TN. Meru Betiri	Jember, Banyuwangi	Jawa Timur	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009 4 Desember 2009	SK.779/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	58.000,00
5	TN. Alas Purwo	Banyuwangi	Jawa Timur	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009 4 Desember 2009	SK.801/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	43.420,00
6	TN. Bali Barat	Buleleng, Jembrana	Bali	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009 4 Desember 2009	SK.780/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	19.002,89
7	TN. G. Rinjani	Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah	NTB	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009 4 Desember 2009	SK.781/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	41.330,00
8	TN. Tanjung Puting	Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009	SK.777/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	415.040,00
9	TN. Kutai	Kutai Tengah, Kutai Timur	Kalimantan Timur	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009 4 Desember 2009	SK.778/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	198.629,00
10	TN. Bunaken	Minahasa, Kota Manado	Sulawesi Utara	Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1062/VII-WP3H/2009 *4 Desember 2009*	SK.782/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	89.065,00
11	TN. Bogani Nani Wartabone	*Bolaang Mongondow* *Bone Bolango*	*Sulawesi Utara* *Gorontalo*	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan* *No. S.1006/VII-WP3H/2010* *17 Desember 2010*	SK.716/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	287.115,00
12	TN. Bantimurung Bulusaraung	Maros, Pangkajene Kep, Bone	Sulawesi Selatan	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan* *No. S.1006/VII-WP3H/2010* *17 Desember 2010*	SK.717/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	43.750,00
13	TN. Manupeu Tanah Daru	Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur	NTT	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan* *No. S.1006/VII-WP3H/2010* *17 Desember 2010*	SK.719/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	87.984,00
14	TN. Laiwangi Wanggameti	Sumba Timur	NTT	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan* *No. S.1006/VII-WP3H/2010* *17 Desember 2010*	SK.714/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	47.014,00

NO	KPHK	LOKASI/ALAMAT/KABUPATEN	PROVINSI	ARAHAN PENCADANGAN KPHK	PENETAPAN WILAYAH KPHK	
					Surat Keputusan	Luas (± ha)
1	2	3	4	5	6	7
15	TN. Way Kambas	Lampung Timur, Lampung Tengah	Lampung	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1006/VII-WP3H/2010 17 Desember 2010*	SK.712/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	130.000,00
16	TN. G. Palung	Kayung Utara, Ketapang	Kalimantan Barat	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1006/VII-WP3H/2010 17 Desember 2010*	SK.721/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	90.000,00
17	TN. D. Sentarum	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1006/VII-WP3H/2010 17 Desember 2010*	SK.715/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	132.000,00
18	TN. Baluran	Situbondo	Jawa Timur	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1006/VII-WP3H/2010 17 Desember 2010*	SK.718/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	25.000,00
19	TN. G. Merapi	*Sleman* *Klaten, Boyolali, Magelang*	*DIY* *Jawa Tengah*	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1006/VII-WP3H/2010 17 Desember 2010*	SK.713/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	6.410,00
20	TN. Bukit Dua Belas	Tebo, Batang Hari, Sarolangun	Jambi	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1006/VII-WP3H/2010 17 Desember 2010*	SK.720/Menhut-II/2010 29 Desember 2010	60.500,00
21	TN. Sembilang	Banyuasin	Sumatera Selatan	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.748/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	202.896,31
22	TN. Karimun Jawa	Jepara	Jawa Tengah	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.749/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	111.625,00
23	TN. Bukit Baka Bukit Raya	*Sintang, Melawi* *Katingan*	*Kalimantan Barat* *Kalimantan Tengah*	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.750/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	181.090,00
24	TN. G. Merbabu	Magelang, Semarang, Boyolali	Jawa Tengah	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.751/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	5.725,00
25	TN. Kayan Mentarang	Malinau, Nunukan	Kalimantan Timur	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.752/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	1.360.500,00
26	TN. Komodo	Manggarai Barat	NTT	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.753/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	173.300,00
27	TN. Kelimutu	Ende	NTT	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.754/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	5.356,50
28	TN. Rawaaopa Watumohai	Konawe, Konawe Selatan, Kolaka	Sulawesi Tenggara	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.755/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	105.194,00

NO	KPHK	LOKASI/ALAMAT/KABUPATEN	PROVINSI	ARAHAN PENCADANGAN KPHK	PENETAPAN WILAYAH KPHK	
					Surat Keputusan	Luas (± ha)
1	2	3	4	5	6	7
29	TN. Manusela	Maluku Tengah	Maluku	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.756/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	189.000,00
30	TN. Aketajawe Lolobata	Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kota Tidore	Maluku Utara	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1516/VII-WP3H/2011 29 Desember 2011*	SK.757/Menhut-II/2011 30 Desember 2011	167.300,00
31	TN. Batang Gadis	Mandailing Natal	Sumatera Utara	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1514/VII-WP3H/2012 26 Desember 2012*	SK.786/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	72.150,00
32	TN. Siberut	Kep. Mentawai	Sumatera Barat	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1514/VII-WP3H/2012 26 Desember 2012*	SK.787/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	190.500,00
33	TN. Tesso Nilo	Pelalawan, Indragiri Hulu	Riau	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1514/VII-WP3H/2012 26 Desember 2012*	SK.788/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	38.576,00
34	TN. Bukit Tigapuluh	Indragiri Hulu, Indragiri Hilir Tebo, Tanjung Jabung Barat	Riau Jambi	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1514/VII-WP3H/2012 26 Desember 2012*	SK.789/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	144.223,00
35	TN. G. Ciremai	Kuningan, Majalengka	Jawa Barat	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1514/VII-WP3H/2012 26 Desember 2012*	SK 790/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	15.500,00
36	TN. Sebangau	Katingan, Pulang Pisau, Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1514/VII-WP3H/2012 26 Desember 2012*	SK.791/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	568.700,00
37	TN. Lorentz	Paniai, Puncak Jaya, Mimika, Asmat, Jaya Wijaya	Papua	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1514/VII-WP3H/2012 26 Desember 2012*	SK.792/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	2.354.644,00
38	TN. Wasur	Merauke	Papua	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1514/VII-WP3H/2012 26 Desember 2012*	SK 793/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	413.810,00
39	Rawa Singkil	Aceh Selatan	Aceh	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2013 23 Desember 2013*	SK.980/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	102.500
40	Kerumutan	Indragiri Hulu	Riau	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2013 23 Desember 2013*	SK.981/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	120.000
41	Arau Hilir	Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, Kota Padang, Pesisir Selatan dan Solok	Padang	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2013 23 Desember 2013*	SK.982/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	105.375
42	Danku Bentayan	Musi Banyuasin dan Banyuasin	Sumatera Selatan	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2013 23 Desember 2013*	SK.983/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	89.574

NO	KPHK	LOKASI/ALAMAT/KABUPATEN	PROVINSI	ARAHAN PENCADANGAN KPHK	PENETAPAN WILAYAH KPHK	
					Surat Keputusan	Luas (± ha)
1	2	3	4	5	6	7
43	Guntur-Papandayan	Garut dan Kab, Bandung	Jawa Barat	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2013 23 Desember 2013*	SK.984/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	15.318
44	Tambora	Dompu dan Bima	Nusa Tenggara Barat	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan, No. S.1684/VII-WP3H/2013, 23 Desember 2013*	SK.985/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	78.116
45	Ruteng	Manggarai	Nusa Tenggara Timur	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan, No. S.1684/VII-WP3H/2013, 23 Desember 2013*	SK.986/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	32.248
46	Gunung Melintang	Sambas	Kalimantan Barat	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2013 23 Desember 2013*	SK.987/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	25.125
47	Morowali	Morowali dan Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2013 23 Desember 2013*	SK.988/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	209.400
48	Towuti	Luwuk Timur	Sulawesi Tengah	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2013 23 Desember 2013*	SK.989/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	209.400
49	Nantu	Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo	Gorontalo	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2013 23 Desember 2013*	SK.990/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	31.215
50	Jayawijaya	Jayawijaya	Papua	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1684/VII-WP3H/2014 24 Desember 2013*	SK.991/Menhut-II/2013 *27 Desember 2013*	800.000
51	*Pararawen*	*Barito Utara*	*Kalimantan Tengah*	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016*	*SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016*	*5.855*
52	*Lamandau*	*Kotawaringin Barat dan Sukamara*	*Kalimantan Tengah*	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016*	*SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016*	*61.425*
53	*Bedugul-Sangeh*	*Badung, Buleleng, dan Tabanan*	*Bali*	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016*	*SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016*	*3.635*
54	*Bukit Kaba*	*Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Rejang Lebong*	*Bengkulu*	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016*	*SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016*	*15.133*
55	*Enggano*	*Bengkulu Utara*	*Bengkulu*	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016*	*SK.723/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016*	*9.281*
56	*Pati Barat*	*Jepara*	*Jawa Tengah*	*Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016*	*SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016*	*1.426*

NO	KPHK	LOKASI/ALAMAT/KABUPATEN	PROVINSI	ARAHAN PENCADANGAN KPHK	PENETAPAN WILAYAH KPHK	
					Surat Keputusan	Luas (± ha)
1	2	3	4	5	6	7
57	Sorong Klamono	Kota Sorong dan Kabupaten Sorong	Papua Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	2.990
58	Cilacap	Cilacap	Jawa Tengah	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	982
59	Morowali	Morowali Utara dan Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	216.908
60	Arfak	Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak	Papua Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016, 11 Mei 2016	SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	68.325
61	Waigeo	Raja Ampat	Papua Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	264.073
62	Bukit Rimbang Bukit Baling	Kampar dan Kuantan Singingi	Riau	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	142.156
63	Pamona	Poso dan Morowali Utara	Sulawesi Tengah	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	35.125
64	Gunung Meja Sidei Kaironi	Manokwari dan Tambraw	Papua Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	968
65	Bakiriang	Banggai	Sulawesi Tengah	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	17.479
66	Pangi Binangga	Parigi Moutong, Sigi, Donggala, dan Toli-Toli	Sulawesi Tengah	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 , 11 Mei 2016	SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	70.997
67	Gunung Tinombala	Buol, Toli-Toli, dan Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	38.608
68	Giam Siak Kecil-Bukit Batu	Bengkalis dan Siak	Riau	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	99.858
69	Kuala Lupak	Barito Kuala dan Banjar	Kalimantan Selatan	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	4.008
70	Gunung Dako	Toli-Toli dan Buol	Sulawesi Tengah	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	21.659

NO	KPHK	LOKASI/ALAMAT/KABUPATEN	PROVINSI	ARAHAN PENCADANGAN KPHK	PENETAPAN WILAYAH KPHK	
					Surat Keputusan	Luas (± ha)
1	2	3	4	5	6	7
71	Kintamani	Bangli	Bali	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	2.649
72	Bolmalit-Maghlit	Sorong Selatan	Papua Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.364/PKTL/REN/PLA.0/5/2016 11 Mei 2016	SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Juni 2016	9.194
73	Barumun	Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 2 September 2016	36.261
74	SICIKE CIKE	Pakpak Bharat	Sumatera Utara	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	6.144
75	KAWAH IJEN	Banyuwangi dan Bondowoso	Jawa Timur	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	2.575
76	DATARAN TINGGI YANG	Bondowoso, Jember, Probolinggo, dan Situbondo	Jawa Timur	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	12.865
77	CYCLOOPS YOUTEFA	Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	Papua	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	33.289
78	MUARA KAMAN SEDULANG	Kutai Timur dan Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	65.445
79	TALIABU	Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula	Maluku	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	13.114
80	JAKARTA	Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016, 1 Agustus 2016	SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	242
81	KEPULAUAN KRAKATAU	Lampung Selatan	Lampung	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	13.365
82	LAMBUSANGO	Kabupaten Buton dan Kota Baubau	Sulawesi Tenggara	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	28.595
83	PEROPA	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	44.012
84	DURIAN LUNCUK	Sarolangun dan Batanghari	Jambi	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	111

NO	KPHK	LOKASI/ALAMAT/KABUPATEN	PROVINSI	ARAHAN PENCADANGAN KPHK	PENETAPAN WILAYAH KPHK	
					Surat Keputusan	Luas (± ha)
1	2	3	4	5	6	7
85	MUARA KENDAWANGAN	Ketapang	Kalimantan Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	147.614
86	GUNUNG NYIUT	Landak, Bengkayang, dan Sanggau	Kalimantan Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	91.759
87	SIMPANG TILU	Bandung, Garut, Cianjur	Jawa Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	23.356
88	BURANGRANG TANGKUBAN PERAHU	Purwakarta, Subang, dan Bandung Barat	Jawa Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	4.772
89	MOYO	Sumbawa dan Dompu	Nusa Teggara Barat	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	30.945
90	PADANG SUGIHAN	Banyuasin dan Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	88.148
91	HARLU	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	3.681
92	GUNUNG MUTIS	Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	12.315
93	PULAU WEH	Kota Sabang	Aceh	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	6.481
94	LINGGA ISAQ	Aceh Tengah dan Aceh Timur	Aceh	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	86.634
95	TANGKOKO	Kota Bitung	Sulawesi Utara	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	8.545
96	YOGYAKARTA	Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman	D.I. Yogyakarta	Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.693/PKTL/REN/PLA.0/8/2016 1 Agustus 2016	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 20 September 2016	632

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 6 Desember 2016

TABEL III.3 PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL

NO	PROVINSI	KPH MODEL	KABUPATEN/ KOTA	PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL					
				SURAT KEPUTUSAN	HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI	LUAS TOTAL (± ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aceh	KPHL Unit III Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Luwes, Kota Langsa	SK.992/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	406.273	276.118	-		682.391
2	Sumatera Utara	KPHP Mandailing Natal	Mandailing Natal	SK.332/Menhut-II/2010 25 Mei 2010	12.681	14.704	131.781		159.166
3	Sumatera Utara	KPHL Tobasamosir	Toba Samosir	SK.866/Menhut-II/2013 05 Desember 2013	75.762	5.191	6.294	-	87.247
4	Sumatera Utara	KPHL Unit XXII	Toba Samosir dan	SK.993/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	65.038	-	51.189	-	116.227
5	Riau	KPHP Tasik Besar Serkap	Pelalawan, Siak	SK.509/Menhut-II/2010 21 September 2010	-	491.768	2.660	18.848	513.276
6	Riau	KPHP Tebing Tinggi	Kepulauan Meranti	SK.343/Menhut-II/2011 28 Juni 2011	412	-	69.335	-	69.747
7	Riau	KPHP Kampar Kiri	Kampar	SK.640/Menhut-II/2011 07 Nopember 2011	24.028	-	119.755	-	143.783
8	Riau	KPHP Minas Tahura	Siak, Kampar	SK.765/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	-	-	140.562	6172 (tahura)	146.734
9	Kep.Riau	KPHL Karimun	Karimun	SK.442/Menhut-II/2012 09 Agustus 2012	9.605	-	8.002	-	17.607
10	Sumatera Barat	KPHL Sijunjung	Sijunjung	SK.331/Menhut-II/2010 25 Mei 2010	83.952	40.785	25.755	-	150.492
11	Sumatera Barat	KPHL Solok (Unit VI)	Solok	SK.42/Menhut-II/2012 02 Februari 2012	114.061	3.481	12.804	-	130.346
12	Sumatera Barat	KPHP Dharmasraya	Dharmasraya	SK. 695/Menhut-II/2013 21 Oktober 2013	-	17.721	15.829	-	33.550
13	Sumatera Barat	KPHL Pesisir selatan	Pesisir Selatan	SK. 696/Menhut-II/2013 21 Oktober 2013	9.091	4.563	46.274	-	59.928
14	Sumatera Barat	KPHL 50 Kota	50 Kota	SK.44/Menhut-II/2012 02 Februari 2012	94.883	5.286	17.383	-	117.552
15	Sumatera Barat	KPHL Bukit Barisan	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar	SK.867/Menhut-II/2013 05 Desember 2013	69.504	16.759	245		86.508
16	Jambi	KPHL Sungai Beram Hitam	Tanjung Jabung Barat	SK.787/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	15.965	-	-	-	15.965

NO	PROVINSI	KPH MODEL	KABUPATEN/ KOTA	PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL					
				SURAT KEPUTUSAN	HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI	LUAS TOTAL (± ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Jambi	KPHP Limau (Unit VII)	Sarolangun	SK.714/Menhut-II/2011 19 Desember 2011	54.793	43.807	22.502	-	121.102
18	Jambi	KPHP Merangin	Merangin	SK.43/Menhut-II/2012 02 Februari 2012	36.088	9.944	30.105	-	76.137
19	Jambi	KPHP Kerinci	Kerinci	SK.960/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	-	34250	-	-	34250
20	Bengkulu	KPHP Muko-Muko	Muko-Muko	SK.330/Menhut-II/2010 25 Mei 2010	-	11.937	66.337	-	78.274
21	Bengkulu	KPHL Bukit Balai Rejang	Rejang Lebong	SK.994/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	16.059				16.059
22	Bengkulu	KPHP Bengkulu Utara	Bengkulu Utara	SK.995/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	165	9546	42640		52.351
23	Bangka Belitung	KPHP Sungai Sembulan	Bangka Tengah	SK.329/Menhut-II/2010 25 Mei 2010	5.185	34.228	-	-	39.413
24	Bangka Belitung	KPHP Rambat Menduyung	Bangka Barat	SK.763/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	8.803	50.819	-	-	59.622
25	Bangka Belitung	KPHP Gunung Duren	Belitung Timur	SK.764/Menhut-II/2012 27 Desember 2012	12.615	45.620	-	-	58.235
26	Bangka Belitung	KPHP Sigambir-Kotawaringin	Bangka	SK.962/Menhut-II/2013 27 Desember 2012	4.769	30.169	-	-	34.938
27	Sumatera Selatan	KPHP Lalan	Musi Banyuasin	SK.789/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	-	-	265.953	-	265.953
28	Sumatera Selatan	KPHP Lakitan	Musi Rawas	SK.790/Menhut-II/2009 07 Desember 2009		76.776	-	-	76.776
29	Sumatera Selatan	KPHP Rawas	Musi Rawas	SK.688/Menhut-II/2012 29 Nopember 2012	-	89.511	32.074	-	121.585
30	Sumatera Selatan	KPHP Meranti	Musi Rawas	SK.689/Menhut-II/2012 29 Nopember 2012	20.082	134.597	97.588	-	252.267
31	Sumatera Selatan	KPHP Benakat (Unit XIV)	Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat	SK.827/Menhut-II/2013 19 Nopember 2013	-	256.594	-	-	256.594
32	Sumatera Selatan	KPHL Banyuasin	Banyuasin	SK.961/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	69147	5660	-		74807
33	Lampung	KPHL Batu Tegi	Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat	SK.650/Menhut-II/2010 22 Nopember 2010	58.162	-	-	-	58.162
34	Lampung	KPHP Reg. 47 Way Terusan	Lampung Tengah	SK 794/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	-	12.500	-	-	12.500

NO	PROVINSI	KPH MODEL	KABUPATEN/ KOTA	PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL					
				SURAT KEPUTUSAN	HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI	LUAS TOTAL (± ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Lampung	KPHL Kota Agung Utara (Unit X)	Tanggamus	SK.379/Menhut-II/2011 18 Juli 2011	56.020	-	-	-	56.020
36	Lampung	KPHP Gedong Wani (Unit XVI)	Lampung Selatan, Lampung Timur	SK.427/Menhut-II/2011 27 Juli 2011	-	30.243	-	-	30.243
37	Lampung	KPHL Rajabasa	Lampung Selatan	SK.367/Menhut-II/2011 07 Juli 2011	5.160	-	-	-	5.160
38	Lampung	KPHL Muara Dua	Tulang Bawang Dan Way Kanan	SK.236/Menhut-II/2012 10 Mei 2012	-	49.134	-	-	49.134
39	Lampung	KPHL Pesawaran	Pesawaran	SK.438/Menhut-II/2012 09 Agustus 2012	9.944	1.260	-	-	11.204
40	Lampung	KPHP Bukit Punggur	Way Kanan	SK.439/Menhut-II/2012 09 Agustus 2012	19.131	21.995	-	-	41.126
41	Lampung	KPHP Sungai Buaya	Mesuji	SK.996/Menhut-II/2013 27 Desember 2012	-	44249	-	-	44249
42	DIY	KPHP Yogyakarta	Kulon Progo, Bantul Dan Gunung Kidul	SK.721/Menhut-II/2011 20 Desember 2011	2.312,80	13.411,70	-	-	15.724,50
43	Bali	KPHL Bali Barat	Jembrana, Buleleng, Tabanan	SK.784/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	59.848	1.892	1.610	-	63.350
44	Bali	KPHL Bali Timur	Buleleng, Karang Asem	SK.621/Menhut-II/2011 01 Nopember 2011	21.891	1.087	-	-	22.978
45	Bali	KPHL Bali Tengah	Buleleng, Bangli	SK.620/Menhut-II/2011 01 Nopember 2011	14.651	-	-	-	14.651
46	NTB	KPHL Rinjani Barat	Lombok Barat, Lombok Utara	SK.785/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	28.911	5.075	6.977	-	40.963
47	NTB	KPHP Batu Lanteh	Batu Lanteh	SK.342/Menhut-II/2011 28 Juni 2011	14.303	14.842	3.631	-	32.776
48	NTB	KPHL Rinjani Timur	Lombok Limur	SK.225/Menhut-II/2012 04 Mei 2012	31.987	5.602	-	-	37.589
49	NTB	KPHL Ampang	Sumbawa	SK.751/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	24.168	8.261	6.252	-	38.681
50	NTB	KPHL Maria	Bima, Kota Bima	SK.752/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	8.515	4.554	14.563	-	27.632
51	NTB	KPHL Tastura	Lombok Tengah	SK.971/Menhut-II/2013 27 Desember 2012	11.153	5.000			16.153
52	NTB	KPHP Sejorong	Sumbawa Barat	SK.963/Menhut-II/2013 27 Desember 2012	15762	5274	19952		40988

NO	PROVINSI	KPH MODEL	KABUPATEN/ KOTA	PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL					
				SURAT KEPUTUSAN	HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI	LUAS TOTAL (± ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	NTB	KPHP Tambora Utara	Bima, Dompu	SK.970/Menhut-II/2013 27 Desember 2012	-	14769	12151		26920
54	NTT	KPHP Rote Ndao	Rote Ndao	SK.333/Menhut-II/2010 25 Mei 2010	15.509	25.221	-	-	40.730
55	NTT	KPHL Mutis Timau	Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	SK.41/Menhut-II/2012 02 Februari 2012	97.005	-	18.375	-	115.380
56	NTT	KPHL Alor Pantar	Alor	SK.767/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	59.419	22.938	21.977	-	104.334
57	NTT	KPHL Flores Timur	Flores Timur	SK.972/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	39.856	1.793	13.759		55.408
58	NTT	KPHP Manggarai Barat	Manggarai Barat	SK.973/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	27.113	18.613	14.571		60.297
59	Kalimantan Barat	KPHP Sintang	Sintang	SK.791/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	10.420	46.473	-	-	56.893
60	Kalimantan Barat	KPHP Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	SK.380/Menhut- II/2011 18 Juli 2011	224.522	83.241	150.262	-	458.025
61	Kalimantan Barat	KPHP Kedawangan	Ketapang	SK.680/Menhut-II/2012 23 Nopember 2012	16.268	162.583	-	-	178.851
62	Kalimantan Timur	KPHP Berau Barat	Berau	SK.649/Menhut-II/2010 22 Nopember 2010	247.025	118.261	410.253	-	775.539
63	Kalimantan Utara	KPHP Malinau (Unit X)	Malinau	SK.224/Menhut-II/2012 04 Mei 2012	220.723	110.518	384.271	-	715.512
64	Kalimantan Utara	KPHP Kayan (Unit V)	Bulungan	SK.223/Menhut-II/2012 04 Mei 2012	168.198	9.776	309.868	-	487.842
65	Kalimantan Utara	KPHL Tarakan	Kota Tarakan	SK.783/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	2.400	-	2.223	-	4.623
66	Kalimantan Timur	KPHP Meratus	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan	SK.768/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	-	274.159	113.329	-	387.488
67	Kalimantan Timur	KPHP Kendilo	Paser	SK.966/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	44.152	61.051	34.032	-	139.235
68	Kalimantan Selatan	KPHP Banjar	Banjar	SK.793/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	42.090	72.513	25.354	-	139.957
69	Kalimantan Selatan	KPHP Tanah Laut	Tanah Laut	SK.440/Menhut-II/2012 09 Agustus 2012	15.862	71.490	5.289	-	92.641
70	Kalimantan Selatan	KPHP Pulau Laut & Sibuku Unit III	Kota Baru	SK.226/Menhut-II/2012 04 Mei 2012	12.863	99.395	-	-	112.258

NO	PROVINSI	KPH MODEL	KABUPATEN/ KOTA	PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL					
				SURAT KEPUTUSAN	HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI	LUAS TOTAL (± ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Kalimantan Selatan	KPHL Hulu Sungai Selatan	Hulu Sungai Selatan	SK.750/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	21.221	11.530	52	-	32.803
72	Kalimantan Selatan	KPHP Tabalong	Tabalong	SK.997/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	48.776	44.759	23.822	-	117.357
73	Kalimantan Tengah	KPHL Kapuas	Kapuas	SK.247/Menhut-II/2011 02 Mei 2011	105.372	-	-	-	105.372
74	Kalimantan Tengah	KPHP Seruyan Unit XXI	Seruyan	SK.716/Menhut-II/2011 19 Desember 2011	38.970	6.112	328.827	-	373.909
75	Kalimantan Tengah	KPHP Lamandau	Lamandau	SK.717/Menhut-II/2011 19 Desember 2011	25.432	19.906	180.951	-	226.289
76	Kalimantan Tengah	KPHP Kotawaringin Barat	Kotawaringin Barat	SK.749/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	9.672	257.160	49.303	-	316.135
77	Kalimantan Tengah	KPHL Gerbang Barito	Barito Selatan	SK.964/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	90.361	43.345	20.961	-	154.667
78	Kalimantan Tengah	KPHP Murung Raya	Murung Raya	SK.965/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	103.578	205.729	598.948	-	908.255
79	Kalimantan Tengah	KPHP Gunung Mas	Gunung Mas	SK.974/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	57.337	50.107	187.291	-	294.735
80	Sulawesi Utara	KPHP Poigar	Bolaangmongondow, Minahasa Selatan	SK.788/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	5.265	19.739	16.594	-	41.598
81	Gorontalo	KPHL Pohuwato Unit III	Pohuwato	SK.334/Menhut-II/2010 25 Mei 2010	59.301	13.605	43.369	-	116.275
82	Gorontalo	KPHP Boalemo Unit V	Boalemo	SK.402/Menhut-II/2011 21 Juli 2011	29.383	12.403	55.140	-	96.926
83	Gorontalo	KPHP Gorontalo Utara	Gorontalo Utara	SK.766/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	18.632	15.759	71.417	-	105.808
84	Gorontalo	KPHP Gorontalo	Gorontalo	SK.976/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	13.126	17.781	40.775	-	71.682
85	Sulawesi Tengah	KPHP Dampelas Tinombo	Donggala, Parigi Moutong	SK.792/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	21.017	10.244	69.651	-	100.912
86	Sulawesi Tengah	KPHP Rano Patanu	Poso	SK.639/Menhut-II/2011 07 Nopember 2011	46.341	28.740	62.349	-	137.430
87	Sulawesi Tengah	KPHP Dolago Tanggunung	Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Kota Palu	SK.755/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	67.794	19.008	57.548	-	144.350
88	Sulawesi Tengah	KPHP Pogugul	Buol	SK.756/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	44.257	54.008	101.268	-	199.533

NO	PROVINSI	KPH MODEL		PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL					
			KABUPATEN/ KOTA	SURAT KEPUTUSAN	HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI	LUAS TOTAL (± ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	Sulawesi Tengah	KPHP Balantak	Banggai	SK.754/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	30.418	28.049	58.936	-	117.403
90	Sulawesi Tengah	KPHP Toili Baturube	Banggai, Tojo Una-Una Morowali	SK.967/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	126.447	55.389	94.800	-	276.636
91	Sulawesi Tengah	KPHP Unit XVII Tojo Una-Una	Tojo Una-Una	SK.968/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	39.921	10.827	61.744	-	112.492
92	Sulawesi Barat	KPHL Mapili	Polewali Mandar	SK.651/Menhut-II/2010 22 Nopember 2010	53.485	-	23.711	-	77.196
93	Sulawesi Barat	KPHL Lariang Unit II	Mamuju Utara	SK.60/Menhut-II/2011 28 Februari 2011	34.512	2.394	21.010	-	57.916
94	Sulawesi Barat	KPHL Mamasa Tengah	Mamasa	SK.340/Menhut-II/2011 27 Juni 2011	33.218	-	4.744	-	37.962
95	Sulawesi Barat	KPHP Mamasa Barat	Mamasa	SK.341/Menhut-II/2011 27 Juni 2011	17.352	-	36.203	-	53.555
96	Sulawesi Barat	KPHL Ganda Dewata	Mamuju, Mamasa	SK.441/Menhut-II/2012 09 Agustus 2012	157.598	-	-	-	157.598
97	Sulawesi Barat	KPHL Malunda	Majene	SK.753/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	45.109	-	6.962	-	52.071
98	Sulawesi Barat	KPHP Budong-Buddong	Mamuju, Mamuju Tengah	SK.998/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	5.463	36.461	86.172	-	128.096
99	Sulawesi Tenggara	KPHP Lakompa Unit III	Buton	SK.795/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	12.432	11.880	6.288	-	30.600
100	Sulawesi Tenggara	KPHP Unit XXIV	Konawe Selatan, Kota Kendari	SK.61/Menhut-II/2011 28 Februari 2011	41.405	89.343	3.671	-	134.419
101	Sulawesi Tenggara	KPHP Bombana	Bombana	SK.426/Menhut-II/2011 27 Juli 2011	23.659	74.514	17.953	-	116.126
102	Sulawesi Tenggara	KPHL Konawe	Konawe Selatan, Kota Kendari	SK.762/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	96.941	8.018	35.668	-	140.627
103	Sulawesi Tenggara	KPHL Peropa'Ea Gantara	Buton Utara	SK.975/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	15.157	-	2.571	-	17.728
104	Sulawesi Selatan	KPHP Jeneberang	Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Takalar	SK.715/Menhut-II/2011 19 Desember 2011	60.451	45.471	54.932	-	160.854
105	Sulawesi Selatan	KPHL Larona Malili	Luwu Timur	SK.722/Menhut-II/2011 20 Desember 2011	156.593	6.391	79.008	-	241.992
105	Sulawesi Selatan	KPHP Awota	Wajo	SK.979/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	5.539	13.532	-	-	19.071

NO	PROVINSI	KPH MODEL	KABUPATEN/ KOTA	PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL					
				SURAT KEPUTUSAN	HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI	LUAS TOTAL (± ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	Maluku Utara	KPHP Gunung Sinopa	Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan	SK.337/Menhut-II/2010 25 Mei 2010	21.056	9.604	13.917	-	44.577
108	Maluku Utara	KPHP Bacan	Halmahera Selatan	SK.969/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	62.836	7.760	70.212	-	140.808
109	Maluku	KPHP Wae Sapalewa	Maluku Tengah	SK.336/Menhut-II/2010 25 Mei 2010	4.545	34.609	27.903	-	67.057
110	Maluku	KPHP Wae Apu	Buru	SK.770/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	73.478	62.921	96.033	-	232.432
111	Maluku	KPHP Wae Tina	Buru, Buru Selatan	SK.977/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	51.599	86.938	65.847	-	204.384
112	Maluku	KPHP Wae Bubi	Seram Bagian Selatan	SK.978/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	12.666	11.059	42.739	-	66.464
113	Papua Barat	KPHP Sorong	Sorong	SK.701/Menhut-II/2010 20 Desember 2010	11.789	111.444	100.136	-	223.369
114	Papua Barat	KPHP Sorong Selatan	Sorong Selatan	SK.771/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	121.361	73.189	88.710	-	283.260
115	Papua Barat	KPHL Kota Sorong (remu)	Kota Sorong	SK.999/Menhut-II/2013 27 Desember 2013	41.635	6.602	-	6.173	12.775
116	Papua	KPHL Biak Numfor	Biak Numfor	SK.648/Menhut-II/2010 22 Nopember 2010	120.340	30.527	55.149	-	206.016
117	Papua	KPHP Yapen	Kepulauan Yapen	SK.786/Menhut-II/2009 07 Desember 2009	15.100	90.767	-	-	105.867
118	Papua	KPHP Keerom	Keerom	SK.282/Menhut-II/2013 19 Nopember 2013	49.196	93.930	30.330	-	173.456
119	Papua	KPHP Waropen	Waropen	SK.760/Menhut-II/2012 26 Desember 2012	83.372	97.691	5.899	-	186.962
120	Papua	KPHL Memberamo	Sarmi, Jayapura	SK.829/Menhut-II/2013 19 Nopember 2013	50.492	46.105	159.271	-	255.868

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 6 Desember 2016

TABEL III.4 PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KPH MODEL

NO.	LOKASI/ NAMA KPH MODEL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
1	KPHL Unit III Aceh	Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Langsa	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013
2	KPHP Mandailing Natal	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Perbup Mandailing Natal No 81 Tahun 2011
3	KPHL Unit XII	Sumatera Utara	Toba Samosir, Labuhan Batu Utara	Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2014
4	*KPHL Tobasamosir*	*Sumatera Utara*	*Toba Samosir*	*Perda Toba Samosir No. 1 Tahun 2015*
5	KPHP Dharmasraya	Sumatera Barat	Dharmasraya	Peraturan Bupati Dharmasraya No.29 Tahun 2013
6	KPHP Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.95 Tahun 2013
7	KPHL Bukit Barisan	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Tanah Datar	Peraturan Gubernur Sumatera barat No 24 Tahun 2014
8	KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	Peraturan Bupati Lima Puluh kota Nomor 122 Tahun 2011
9	KPHL Sijunjung	Sumatera Barat	Sijunjung	Peraturan bupati Sijunjung No 18 tahun 2011
10	KPHL Solok (unit VI)	Sumatera Barat	Solok	Peraturan Bupati Solok 56 tahun 2011
11	KPHL Banyuasin	Sumatera Selatan	Banyuasin	Peraturan Bupati Banyuasin No.420 Tahun 2013
12	KPHP Meranti	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2011
13	KPHP Rawas	Sumatera Selatan	Musi Rawas	Peraturan Bupati Musi Rawas No. 27 Tahun 2010
14	KPHP Unit VII Benakat	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Lahat	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No,16 Tahun 2013
15	*KPHP Lakitan Unit VI*	*Sumatera Selatan*	*Musi Rawas*	*Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2015*
16	KPHP Lalan	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2011
17	KPHL Karimun	Kepulauan Riau	Karimun	Keputusan Bupati Karimun No.97 Tahun 2012
18	KPHP Minas Tahura	Riau	Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru	Peraturan Gubernur Riau No.10 Tahun 2014
19	*KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII)*	*Riau*	*Kampar*	*Perbup Kampar No. 1 Tahun 2013*
20	KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)	Riau	Kepulauan Meranti	Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 tahun 2011
21	*KPHP Tasik Besar Serkap*	*Riau*	*Pelalawan, Siak*	*Peraturan Gubernur Riau No.10 Tahun 2014*
22	KPHP Sigambir-Kotawaringin	Kep. Bangka Belitung	Bangka	Peraturan Bupati Bangka No.19 Tahun 2012
23	KPHP Sungai Sembulan	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	Peraturan Bupati Bangka Tengah No 10 tahun 2011
24	KPHP Rambat Menduyung	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	Peraturan Bupati Bangka Barat No.19 Tahun 2012
25	KPHP Gunung Duren	Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur	Parturan Bupati Belitung Timur No.22 Tahun 2012
26	KPHP Bengkulu Utara	Bengkulu	Bengkulu Utara	Peraturan Bupati Bengkulu Utara No.20 Tahun 2013
27	*KPHP Muko-Muko*	*Bengkulu*	*Muko-Muko*	*Perda Kab.Mukomuko No. 13 Tahun 2013*
28	KPHL Bukit Balai Rejang	Bengkulu	Rejang Lebong	Peraturan Bupati Rejang Lebong No.27 Tahun 2013
29	KPHP Kerinci	Jambi	Kerinci	Peraturan Bupati Kerinci No.14 Tahun 2013
30	KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai	Jambi	Merangin	Perbup Merangin No 33 tahun 2011
31	KPHP Limau unit VII	Jambi	Sarolangun	PerBup Sarolangun No 15 Tahun 2012
32	KPHL Sungai Beram Hitam	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 18 Tahun 2010

NO.	LOKASI/ NAMA KPH MODEL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
33	*KPHL Pesawaran*	*Lampung*	*Pesawaran*	*Perda Kabupaten Pesawaran No. 16 Tahun 2014*
34	KPHP Bukit Punggur	Lampung	Way Kanan	Peraturan Bupati Way Kanan No.12 Tahun 2013
35	*KPHL Batu Tegi*	*Lampung*	*Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus*	*Peraturan Gubernur Lampung No. 49 Tahun 2015*
36	KPHL Rajabasa (Unit XIV)	Lampung	Lampung Selatan	Perbup Lampung Selatan No 26 Tahun 2011
37	*KPHP Gedong Wani (Unit XVI)*	*Lampung*	*Lampung Selatan, Lampung Timur*	*Peraturan Gubernur Lampung No. 49 Tahun 2015*
38	KPHP Register 47 Way Terusan	Lampung	Lampung Tengah	Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 10 tahun 2008
39	KPHP Sungai Buaya	Lampung	Mesuji	Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji No. 16 Tahun 2012
40	KPHL Kotaagung Utara (Unit X)	Lampung	Tanggamus	Perda Kabupaten Tanggamus no 21 tahun 2011
41	*KPHP Muara Dua*	*Lampung*	*Tulang Bawang, Way Kanan*	*Peraturan Gubernur Lampung No. 49 Tahun 2015*
42	KPHP Yogyakarta	DI Yogyakarta	Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo	Peraturan Gubernur DIY No. 50 Tahun 2008 Peraturan Gubernur DIY No 36 Tahun 2008
43	KPHL Bali Tengah (Unit II)	Bali	Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung	Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2008
44	KPHL Bali Timur (Unit III)	Bali	Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung	Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2008
45	KPHL Bali Barat	Bali	Jembrana, Buleleng, Tabanan	Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2008
46	KPHP Tambora Utara	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu	Peraturan Gubernur NTB No.23 Tahun 2008
47	KPHP Maria Unit XXIII	Nusa Tenggara Barat	Bima dan Kota Bima	Peraturan Gubernur NTB No.23 Tahun 2008
48	KPHL Ampang	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008
49	KPHL Rinjani Barat	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat, Lombok Utara	Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 13 Tahun 2014
50	KPHL Tastura	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Peraturan Bupati Lombok Tengah No.37 Tahun 2013
51	KPHL Rinjani Timur	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Peraturan Bupati Lombok Timur No.13 Tahun 2012
52	KPHP Batulanteh (Unit IX)	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Perda Kab.Sumbawa No.11 Tahun 2013
53	KPHP Sejorong	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	Peraturan Bupati Sumbawa Barat No.20 Tahun 2012
54	KPHP Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012
55	*KPHL Alor Pantar*	*Nusa Tenggara Timur*	*Alor*	*Perda Kab. Alor No. 13 Tahun 2014*
56	KPHL Mutis Timau (Unit XIX)	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Utara, Timour Tengah Selatan	Peraturan Daerah Prov NTT No.2 Tahun 2012
57	KPHP Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 29 Tahun 2013
58	KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX)	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Peraturan Bupati Kapuas Hulu No.35 Tahun 2011
59	KPHP Kendawangan	Kalimantan Barat	Ketapang	Surat Penunjukan Bupati Kendawangan No.522/2722/dkn/2012
60	KPHP Sungai Merakai	Kalimantan Barat	Sintang	Peraturan Bupati Sintang No. 62 Tahun 2010
61	KPHP Berau Barat	Kalimantan Timur	Berau	Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2011
62	KPHP Kayan	Kalimantan Utara	Bulungan	Peraturan Bupati Bulungan No.27 Tahun 2009
63	KPHP Meratus	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara,	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.77 Tahun 2013
64	KPHL Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Peraturan Walikota Tarakan No. 67 Tahun 2009
65	KPHP Malinau	Kalimantan Utara	Malinau	Peraturan Bupati Malinau No.199 Tahun 2013
66	KPHP Kendilo	Kalimantan Timur	Paser	Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2013
67	KPHP Banjar	Kalimantan Selatan	Banjar	Peraturan Bupati Banjar No. 13 Tahun 2009
68	KPHL Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No 33 Tahun 2012
69	KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III)	Kalimantan Selatan	Kota baru	Peraturan Bupati Kota Baru No.37 Tahun 2012

NO.	LOKASI/ NAMA KPH MODEL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
70	KPHP Tanah Laut	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Peraturan Bupati Tanah Laut No.48 Tahun 2011
71	*KPHP Tabalong*	*Kalimantan Selatan*	*Tabalong*	*Perbup Tabalong No.15 Tahun 2014*
72	KPHL Gerbang Barito	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan No.24 Tahun 2013
73	KPHP Gunung Mas	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	Peraturan Bupati Gunung Mas No.17 Tahun 2012
74	KPHP Kota Waringin Barat	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2013
75	KPHP Lamandau	Kalimantan Tengah	Lamandau	Peraturan Bupati Lamandau No.10 Tahun 2012
76	KPHL Kapuas	Kalimantan Tengah	Kapuas	Peraturan Bupati Kapuas No.197 Tahun 2011
77	KPHP Murung Raya	Kalimantan Tengah	Murung Raya	Peraturan Bupati Murung Raya No.7 Tahun 2013
78	KPHP Seruyan (Unit XXI)	Kalimantan Tengah	Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan No 26 Tahun 2012
79	*KPHP Poigar*	*Sulawesi Utara*	*Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan*	*Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 24 Tahun 2016*
80	KPHP Bolaemo (Unit V)	Gorontalo	Boalemo	Peraturan Bupati Boalemo No. 12 Tahun 2011
81	KPHP Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo	Peraturan Bupati Gorontalo No.17 Tahun 2013
82	KPHP Gorontalo Utara	Gorontalo	Gorontalo Utara	Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.6 Tahun 2012
83	KPHL Unit III Pohuwato	Gorontalo	Pohuwato	Peraturan Bupati Pohuwato No. 9 Tahun 2008
84	KPHP Toili Baturube	Sulawesi Tengah	Banggai, Tojo Una-Una Morowali	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2012
85	KPHP Unit XVII Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Peraturan Bupati Tojo Una-Una No.21 Tahun 2014
86	KPHP Dampelas Tinombo	Sulawesi Tengah	Donggala, Parigi, Moutong	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2012
87	KPHP Balantak	Sulawesi Tengah	Banggai	Keputusan Bupati Banggai No 821.2/698/Dishut
88	KPHP Pogogul	Sulawesi Tengah	Buol	Keputusan Bupati Buol No.800/10-71/Dishut
				Peraturan Bupati Buol No.04/Dishut Tahun 2013
89	KPHP Dolago Tanggunung	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Kota Palu	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.45 Tahun 2012
90	KPHP Sintuwu Maroso/Rano Patanu	Sulawesi Tengah	Poso	Peraturan Bupati Poso No.54 Tahun 2011
91	*KPHL Ganda Dewata*	*Sulawesi Barat*	*Mamuju, Mamasa*	*Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.7e Tahun 2013*
92	KPHL Malunda	Sulawesi Barat	Majene	Peraturan Bupati Majene No.1 Tahun 2012
93	KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII)	Sulawesi Barat	Mamasa	Peraturan Bupati Mamasa No.8 Tahun 2010
				Keputusan Bupati Mamasa No, 522.7/Kpts-126/X/2010
94	KPHP Mamasa Barat (Unit VII)	Sulawesi Barat	Mamasa	Peraturan Bupati Mamasa No.8 Tahun 2010
				Keputusan Bupati Mamuju Utara No 542 Tahun 2010
95	KPHL Unit II Lariang	Sulawesi Barat	Mamuju Utara	Keputusan Bupati Mamuju Utara No. 015 Tahun 2011
96	*KPHP Budong-Buddong*	*Sulawesi Barat*	*Mamuju, Mamuju Tengah*	*Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 7e Tahun 2013*
97	KPHL Mapili	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Keputusan Bupati Polewali Mandar No. 91 Tahun 2010
98	KPHP Tina Orima bombana	Sulawesi Tenggara	Bombana	Peraturan Bupati Bombana No.17 Tahun 2012
99	KPHP Unit III Lakompa	Sulawesi Tenggara	Buton	Peraturan Bupati Buton No. 5 Tahun 2011
100	KPHL Peropa'Ea Gantara	Sulawesi Tenggara	Buton Utara	Peraturan Bupati Buton Utara No.22 Tahun 2013
101	KPHL Konawe	Sulawesi Tenggara	Konawe	Peraturan Bupati Konawe No.6 Tahun 2013
102	KPHP Unit XXIV Gularaya	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan, Kota Kendari	Peraturan Gubernur Sultra No.42 Tahun 2011
103	KPHP Jeneberang (Unit IX)	Sulawesi Selatan	Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Takalar, Jeneponto	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.29 Tahun 2012
104	KPHL Larona Malili (Unit I)	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur No.38 Tahun 2011
105	KPHP Awota	Sulawesi Selatan	Wajo	Peraturan Bupati Wajo No.14 Tahun 2014
106	KPHP Bacan	Maluku Utara	Halmahera Selatan	Peraturan Bupati Halmahera Selatan No.11 Tahun 2013

NO.	LOKASI/ NAMA KPH MODEL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
107	KPHP Gunung Sinopa	Maluku Utara	Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan	Peraturan Gubernur Maluku Utara No.7 Tahun 2011
108	KPHP Wae Apu	Maluku	Buru	Peraturan Bupati Buru No.37 Tahun 2012
109	KPHP Wae Sapalewa	Maluku	Maluku Tengah	Peraturan Bupati Maluku Tengah No. 03 Tahun 2012
110	KPHP Wae Bubi	Maluku	Seram Bagian Timur	Peraturan Bupati Seram Bagian Timur No.06 Tahun 2013
111	*KPHP Wae Tina*	*Maluku*	*Buru, Buru Selatan*	*Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 23 Tahun 2014*
112	KPHP Sorong Selatan	Papua Barat	Sorong Selatan	Peraturan Bupati Sorong Selatan No.07 Tahun 2013
113	KPHL Kota Sorong (remu)	Papua Barat	Kota Sorong	Peraturan Walikota Sorong No.11 Tahun 2013
114	*KPHP Sorong*	*Papua Barat*	*Sorong*	*Perda Kabupaten Sorong No. 14 Tahun 2011*
115	*KPHL Biak Numfor*	*Papua*	*Biak Numfor*	*Perda Kab. Biak Numfor No.28 Tahun 2011*
116	KPHP Keerom	Papua	Keerom	Surat Keputusan Bupati Keerom No.10 Tahun 2012
117	KPHP Waropen	Papua	Waropen	Keputusan Bupati Kabupaten Waropen No.7 Tahun 2012
118	KPHP Yapen	Papua	Kepulauan Yapen	Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen No. 16 Tahun 2010
119	*KPHP Memberamo*	*Papua*	*Sarmi, Jayapura*	*Peraturan Gubernur Papua No 19 Tahun 2014*

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 6 Desember 2016

TABEL III.5 DAFTAR PENETAPAN FASILITASI KPH TAHUN 2015 DAN 2016

NO	PROVINSI	UNIT KPH	TAHUN PENETAPAN FASILITASI	SURAT KEPUTUSAN		Luas Total (ha)
				NO SK	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	UNIT I KPHL	2015	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	568.250
2	Aceh	UNIT II KPHL	2015	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	253.948
3	Aceh	UNIT IV KPHL	2015	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	402.986
4	Aceh	UNIT V KPHL	2015	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	290.162
5	Aceh	UNIT VI KPHL	2015	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	310.552
6	Sumatera Utara	UNIT XVI KPHL	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	72.166
7	Sumatera Utara	UNIT XVII KPHP	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	86.555
8	Sumatera Utara	UNIT XVIII KPHL	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	49.415
9	Sumatera Utara	UNIT XX KPHP	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	88.931
10	Sumatera Utara	UNIT XXIII KPHL	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	64.937
11	Sumatera Utara	UNIT XXIV KPHL	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	124.347
12	Sumatera Utara	UNIT XXV KPHL	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	60.396
13	Sumatera Utara	UNIT XXVI KPHL	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	174.395
14	Sumatera Utara	UNIT XXVII KPHP	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	38.071
15	Sumatera Utara	UNIT XXVIII KPHP	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	127.758
16	Sumatera Utara	UNIT XXXI KPHP	2015	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	270.460
17	Sumatera Selatan	UNIT II KPHP	2015	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	62.486
18	Sumatera Selatan	UNIT XII KPHL	2015	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	26.052
19	Sumatera Selatan	UNIT XIII KPHL	2015	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	69.431
20	Sumatera Selatan	UNIT XIV KPHP	2015	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	179.044
21	Sumatera Selatan	UNIT XV KPHL	2015	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	94.847
22	Sumatera Selatan	UNIT XVI KPHL	2015	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	29.706
23	Kep. Riau	UNIT III KPHP	2015	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	98.752
24	Kep. Riau	UNIT IV KPHP	2015	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.756
25	Riau	UNIT V KPHP	2015	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	23.438
26	Riau	UNIT VII KPHP	2015	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	102.958
27	Riau	UNIT XIV KPHP	2015	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	67.118
28	Riau	UNIT XX KPHP	2015	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	168.458
29	Riau	UNIT XXI KPHP	2015	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	124.109
30	Riau	UNIT XXX KPHP	2015	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	150.718
31	Riau	UNIT XXXI KPHL	2015	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	88.870
32	Kep. Bangka Belitung	UNIT II KPHP	2015	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	103.539
33	Kep. Bangka Belitung	UNIT III KPHP	2015	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	89.310
34	Kep. Bangka Belitung	UNIT VIII KPHP	2015	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	171.189
35	Kep. Bangka Belitung	UNIT X KPHL	2015	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	97.508

NO	PROVINSI	UNIT KPH	TAHUN PENETAPAN FASILITASI	SURAT KEPUTUSAN		Luas Total (ha)
				NO SK	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7
36	Bengkulu	UNIT III KPHL	2015	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	96.125
37	Bengkulu	UNIT IV KPHL	2015	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	82.242
38	Bengkulu	UNIT V KPHL	2015	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	48.686
39	Bengkulu	UNIT VI KPHL	2015	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	78.232
40	Jambi	UNIT IX KPHP	2015	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	142.967
41	Jambi	UNIT X KPHP	2015	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	103.650
42	Lampung	UNIT II KPHL	2015	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	42.074
43	Lampung	UNIT VII KPHL	2015	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	24.337
44	Lampung	UNIT VIII KPHL	2015	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	21.117
45	Lampung	UNIT XV KPHL	2015	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	24.285
46	Nusa Tenggara Barat	UNIT XVI KPHL	2015	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	25.422
47	Nusa Tenggara Barat	UNIT XX KPHP	2015	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	45.663
48	Nusa Tenggara Timur	UNIT II KPHL	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	17.736
49	Nusa Tenggara Timur	UNIT III KPHL	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	50.952
50	Nusa Tenggara Timur	UNIT IV KPHL	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	35.734
51	Nusa Tenggara Timur	UNIT IX KPHL	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	49.182
52	Nusa Tenggara Timur	UNIT V KPHP	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	32.791
53	Nusa Tenggara Timur	UNIT VI KPHP	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	57.740
54	Nusa Tenggara Timur	UNIT VII KPHL	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	36.999
55	Nusa Tenggara Timur	UNIT XI KPHL	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	20.647
56	Nusa Tenggara Timur	UNIT XX KPHP	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	69.461
57	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXI KPHP	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	105.632
58	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXII KPHL	2015	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.537
59	Kalimantan Barat	UNIT XXIII KPHP	2015	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	189.599
60	Kalimantan Barat	UNIT XXIV KPHP	2015	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	179.461
61	Kalimantan Barat	UNIT XXV KPHP	2015	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	318.717
62	Kalimantan Utara	UNIT VII KPHP	2015	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	120.789
63	Kalimantan Timur	UNIT XXIX KPHP	2015	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	109.314
64	Kalimantan Timur	UNIT XXVI KPHP	2015	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	979.933
65	Kalimantan Timur	UNIT XXVII KPHP	2015	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	263.467
66	Kalimantan Timur	UNIT XXX KPHL	2015	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	15.130
67	Kalimantan Timur	UNIT XXXII KPHP	2015	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	333.166
68	Kalimantan Timur	UNIT XXXIII KPHP	2015	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	255.245
69	Kalimantan Selatan	UNIT IX KPHL	2015	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	62.186
70	Kalimantan Selatan	UNIT VI KPHP	2015	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	262.919
71	Kalimantan Tengah	UNIT III KPHP	2015	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	59.185
72	Kalimantan Tengah	UNIT V KPHP	2015	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	334.069
73	Kalimantan Tengah	UNIT XIV KPHP	2015	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	48.400
74	Kalimantan Tengah	UNIT XXIX KPHP	2015	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	200.518

NO	PROVINSI	UNIT KPH	TAHUN PENETAPAN FASILITASI	SURAT KEPUTUSAN		Luas Total (ha)
				NO SK	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7
75	Kalimantan Tengah	UNIT XXXI KPHP	2015	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	378.819
76	Sulawesi Utara	UNIT VI KPHL	2015	SK.625/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	27.101
77	Gorontalo	UNIT VII KPHP	2015	SK.639/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	35.784
78	Sulawesi Tengah	UNIT II KPHP	2015	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	162.785
79	Sulawesi Tengah	UNIT VII KPHP	2015	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	109.923
80	Sulawesi Tengah	UNIT XIV KPHP	2015	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	190.830
81	Sulawesi Tengah	UNIT XXI KPHP	2015	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	117.079
82	Sulawesi Barat	UNIT IV KPHP	2015	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	63.110
83	Sulawesi Barat	UNIT VI KPHP	2015	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	156.917
84	Sulawesi Tenggara	UNIT V KPHP	2015	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	12.179
85	Sulawesi Tenggara	UNIT VI KPHP	2015	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	73.726
86	Sulawesi Tenggara	UNIT XI KPHP	2015	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.580
87	Sulawesi Tenggara	UNIT XII KPHP	2015	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	47.088
88	Sulawesi Tenggara	UNIT XIII KPHL	2015	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	125.717
89	Sulawesi Tenggara	UNIT XIV KPHL	2015	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	163.744
90	Sulawesi Tenggara	UNIT XIX KPHP	2015	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	113.580
91	Sulawesi Tenggara	UNIT XXV KPHL	2015	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	10.022
92	Sulawesi Selatan	UNIT X KPHP	2015	SK.616/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	20.901
93	Maluku Utara	UNIT IV KPHP	2015	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	199.327
94	Maluku Utara	UNIT IX KPHP	2015	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	17.998
95	Maluku Utara	UNIT XVI KPHP	2015	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	168.726
96	Maluku	UNIT I KPHP	2015	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	144.539
97	Maluku	UNIT XIV KPHL	2015	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	10.288
98	Maluku	UNIT XVI KPHL	2015	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	11.836
99	Maluku	UNIT XVIII KPHP	2015	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	132.339
100	Maluku	UNIT XXI KPHP	2015	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	70.159
101	Maluku	UNIT XXII KPHP	2015	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	-
102	Papua Barat	UNIT I KPHL	2015	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	192.142
103	Papua Barat	UNIT IV KPHP	2015	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	139.738
104	Papua Barat	UNIT XV KPHP	2015	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	640.508
105	Papua Barat	UNIT XVI KPHP	2015	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	209.554
106	Papua	UNIT II KPHL	2015	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	359.135
107	Papua	UNIT LI KPHP	2015	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	666.097
108	Papua	UNIT VI KPHL	2015	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	273.223
109	Papua	UNIT X KPHL	2015	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	627.940
110	Papua	UNIT XLII KPHL	2015	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	139.928
111	Papua	UNIT XLIII KPHP	2015	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	257.531
112	Papua	UNIT XXII KPHP	2015	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	185.260
113	Papua	UNIT XXVIII KPHP	2015	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	47.726

NO	PROVINSI	UNIT KPH	TAHUN PENETAPAN FASILITASI	SURAT KEPUTUSAN		Luas Total (ha)
				NO SK	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7
114	Papua	UNIT XXXV KPHL	2015	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	299.129
115	Sumatera Utara	UNIT I KPHP	2016	SK.831/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	69.878
116	Sumatera Utara	UNIT II KPHL	2016	SK.831/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	80.002
117	Sumatera Utara	UNIT XII KPHP	2016	SK.831/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	56.223
118	Sumatera Utara	UNIT XV KPHP	2016	SK.831/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	89.851
119	Sumatera Barat	UNIT I KPHL	2016	SK.832/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	323.510
120	Sumatera Barat	UNIT III KPHL	2016	SK.832/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	62.368
121	Sumatera Selatan	UNIT XIX KPHP	2016	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	32.419
122	Sumatera Selatan	UNIT XX KPHP	2016	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	27.076
123	Sumatera Selatan	UNIT XXI KPHP	2016	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	44.592
124	Sumatera Selatan	UNIT XXII KPHP	2016	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	91.392
125	Sumatera Selatan	UNIT XXIII KPHP	2016	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	206.254
126	Sumatera Selatan	UNIT XXIV KPHP	2016	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	407.604
127	Kalimantan Barat	UNIT XIII KPHL	2016	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	56.013
128	Kalimantan Barat	UNIT XVI KPHL	2016	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	324.662
129	Kalimantan Barat	UNIT I KPHP	2016	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	127.794
130	Kalimantan Barat	UNIT VIII KPHP	2016	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	94.544
131	Kalimantan Barat	UNIT XV KPHP	2016	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	207.079
132	Kalimantan Barat	UNIT XXX KPHP	2016	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	70.458
133	Kalimantan Barat	UNIT XXXI KPHP	2016	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	261.701
134	Kalimantan Barat	UNIT XXXIII KPHP	2016	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	318.804
135	Kalimantan Timur	UNIT XXII KPHL	2016	SK.835/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	658.129
136	Kalimantan Selatan	UNIT VIII KPHL	2016	SK.836/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	141.349
137	Sulawesi Utara	UNIT V KPHL	2016	SK.837/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	13.356
138	Sulawesi Utara	UNIT VIII KPHL	2016	SK.837/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	27.101
139	Sulawesi Utara	UNIT IX KPHL	2016	SK.837/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	13.272
140	Maluku Utara	UNIT XII KPHP	2016	SK.838/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	170.442
141	Sulawesi Selatan	UNIT V KPHL	2016	SK.839/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	143.751
142	Sulawesi Selatan	UNIT VI KPHL	2016	SK.839/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	59.954
143	Sulawesi Selatan	UNIT VII KPHL	2016	SK.839/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	130.508
144	Sulawesi Barat	UNIT IX KPHL	2016	SK.840/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	51.086
145	Nusa Tenggara Barat	UNIT VI KPHL	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	32.340
146	Nusa Tenggara Barat	UNIT VII KPHL	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	40.645
147	Nusa Tenggara Barat	UNIT VIII KPHL	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	44.461
148	Nusa Tenggara Barat	UNIT XII KPHL	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	74.733
149	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIX KPHL	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	44.082
150	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXII KPHL	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	43.399
151	Nusa Tenggara Barat	UNIT X KPHP	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	55.226

NO	PROVINSI	UNIT KPH	TAHUN PENETAPAN FASILITASI	SURAT KEPUTUSAN		Luas Total (ha)
				NO SK	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7
152	Nusa Tenggara Barat	UNIT XI KPHP	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	64.134
153	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIII KPHP	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	33.610
154	Nusa Tenggara Barat	UNIT XV KPHP	2016	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	42.630
155	Maluku	UNIT V KPHL	2016	SK.842/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	92.022
156	Maluku	UNIT XV KPHL	2016	SK.842/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	10.067
157	Maluku	UNIT XII KPHP	2016	SK.842/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	193.041
158	Papua	UNIT LVI KPHL	2016	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	363.877
159	Papua	UNIT III KPHP	2016	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	194.846
160	Papua	UNIT XXIII KPHP	2016	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	122.820
161	Papua	UNIT XXV KPHP	2016	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	354.901
162	Papua	UNIT XLVII KPHP	2016	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	461.382
163	Papua	UNIT XLVIII KPHP	2016	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	573.543
164	Papua	UNIT XLIX KPHP	2016	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	539.996
165	Papua	UNIT LIII KPHP	2016	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	649.375
166	Kepulauan Riau	UNIT II KPHL	2016	SK.844/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	32.472
167	Kepulauan Riau	UNIT V KPHP	2016	SK.844/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	61.403
168	Jambi	UNIT VIII KPHP	2016	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	110.372
169	Jambi	UNIT XII KPHP	2016	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	79.305
170	Jambi	UNIT XIII KPHP	2016	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	103.528
171	Jambi	UNIT XIV KPHP	2016	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	80.852
172	Jambi	UNIT XV KPHP	2016	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	91.626
173	Jambi	UNIT XVI KPHP	2016	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	122.504
174	Kepulauan Bangka Belitung	UNIT VI KPHP	2016	SK.846/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	27.199
175	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIV KPHL	2016	SK.847/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	116.160
176	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVII KPHP	2016	SK.847/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	113.398
177	Gorontalo	UNIT II KPHL	2016	SK.848/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	90.644
178	Sulawesi Tengah	UNIT III KPHL	2016	SK.849/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	134.726
179	Sulawesi Tengah	UNIT VIII KPHL	2016	SK.849/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	220.766
180	Sulawesi Tengah	UNIT V KPHP	2016	SK.849/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	111.273
181	Papua Barat	UNIT VI KPHL	2016	SK.850/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	225.183
182	Papua Barat	UNIT XII KPHL	2016	SK.850/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	256.207
183	Riau	UNIT I KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	110.513
184	Riau	UNIT II KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	141.080
185	Riau	UNIT III KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	131.825
186	Riau	UNIT IV KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	80.347
187	Riau	UNIT VI KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	224.663
188	Riau	UNIT XII KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	149.905
189	Riau	UNIT XIX KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	87.370
190	Riau	UNIT XV KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	35.000

NO	PROVINSI	UNIT KPH	TAHUN PENETAPAN FASILITASI	SURAT KEPUTUSAN		Luas Total (ha)
				NO SK	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7
191	Riau	UNIT XXIII KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	69.397
192	Riau	UNIT XXIX KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	67.827
193	Riau	UNIT XXV KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	42.898
194	Riau	UNIT XXVII KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	231.490
195	Riau	UNIT XXVIII KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	61.182
196	Riau	UNIT XXXII KPHP	2016	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	96.697
197	Lampung	UNIT XI KPHL	2016	SK.852/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	47.746
198	Lampung	UNIT XIII KPHL	2016	SK.852/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	8.025
199	Kalimantan Tengah	UNIT IV KPHL	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	7.804
200	Kalimantan Tengah	UNIT VII KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	158.785
201	Kalimantan Tengah	UNIT X KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	244.231
202	Kalimantan Tengah	UNIT XI KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	274.875
203	Kalimantan Tengah	UNIT XVII KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	681.864
204	Kalimantan Tengah	UNIT XVIII KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	140.418
205	Kalimantan Tengah	UNIT XIX KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	366.726
206	Kalimantan Tengah	UNIT XXIV KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	92.242
207	Kalimantan Tengah	UNIT XXV KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	157.199
208	Kalimantan Tengah	UNIT XXVII KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	302.601
209	Kalimantan Tengah	UNIT XXVIII KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	144.535
210	Kalimantan Tengah	UNIT XXX KPHP	2016	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	217.832
211	Sulawesi Tenggara	UNIT XVI KPHL	2016	SK.854/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	126.917
212	Sulawesi Tenggara	UNIT XX KPHL	2016	SK.854/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	230.547
213	Sulawesi Tenggara	UNIT XXI KPHL	2016	SK.854/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	65.901
214	Sulawesi Tenggara	UNIT VIII KPHP	2016	SK.854/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	18.588

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 6 Desember 2016

TABEL III.6 KELEMBAGAAN KPH PENETAPAN FASILITASI TAHUN 2016

No	Nama KPH	Tahun Fasilitasi	Provinsi	Struktur Organisasi KPH	No SK KELEMBAGAAN
1	KPHL Lintas Kabupaten Unit I	2015	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
2	KPHL Lintas Kabupaten Unit II	2015	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
3	KPHL Lintas Kabupaten Unit IV	2015	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
4	KPHL Lintas Kabupaten Unit VI	2015	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
5	KPHL Lintas Kabupaten Unit V	2015	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
6	KPHL Lintas Kabupaten	2015	Bengkulu		
7	KPHL Bengkulu Selatan	2015	Bengkulu		
8	KPHL Kaur	2015	Bengkulu		
9	KPHL Seluma	2015	Bengkulu	UPTD	Peraturan Bupati Seluma No. 22 Tahun 2014
10	KPHP Bone Bolango	2015	Gorontalo	UPTD	Perbup Bone Bolango No. 9 Tahun 2014
11	KPHP Tebo Timur	2015	Jambi	UPTD	SK Bupati Tebo No. 64 Tahun 2014
12	KPHP Tebo Barat	2015	Jambi	UPTD	SK Bupati Tebo No. 64 Tahun 2014
13	***KPHP Menukung***	2015	***Kalimantan Barat***	***UPTD***	***Peraturan Bupati Melawi No. 17 Tahun 2014***
14	***KPHP Sokan***	2015	***Kalimantan Barat***	***UPTD***	***Peraturan Bupati Melawi No. 17 Tahun 2014***
15	***KPHP Belimbing***	2015	***Kalimantan Barat***	***UPTD***	***Peraturan Bupati Melawi No. 17 Tahun 2014***
16	***KPHL Hulu Sungai Tengah***	2015	***Kalimantan Selatan***	***UPTD***	***Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 46 Tahun 2014***
17	***KPHP Tanah Bumbu***	2015	***Kalimantan Selatan***	***UPTD***	***Perbup Tanah Bumbu No.49 Tahun 2014***
18	***KPHP Palangkaraya***	2015	***Kalimantan Tengah***	***UPTD***	***Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015***
19	***KPHP Barito Utara***	2015	***Kalimantan Tengah***	***UPTD***	***Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015***
20	***KPHP Barito Timur***	2015	***Kalimantan Tengah***	***UPTD***	***Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015***
21	***KPHP Kotawaringin Timur***	2015	***Kalimantan Tengah***		
22	***KPHP Pulang Pisau***	2015	***Kalimantan Tengah***	***UPTD***	***Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015***
23	KPHP DAS Belayan	2015	Kalimantan Timur	UPTD	Perbup Kutai Kartanegara No. 25 Tahun 2013
24	KPHP Santan	2015	Kalimantan Timur	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 77 Tahun 2013
25	KPHL Sungai Wain-Sungai Manggar	2015	Kalimantan Timur	UPTD	Peraturan Walikota BPN
26	KPHP Bongan	2015	Kalimantan Timur	UPTD	Pergub Kalimantan Timur No. 77 Tahun 2013
27	KPHP Telakai	2015	Kalimantan Timur	UPTD	Perbup Paser No. 17 Tahun 2013
28	***KPHP Delta Mahakam***	2015	***Kalimantan Timur***	***UPTD***	***Perbup Kutai Kartanegara No. 25 Tahun 2013***
29	KPHP Tana Tidung	2015	Kalimantan Utara		
30	KPHP Jebu Bembang Antan	2015	Kep. Bangka Belitung	UPTD	Peraturan Bupati Bangka Barat No.19 Tahun 2012
31	KPHP Bubus Panca	2015	Kep. Bangka Belitung	UPTD	Peraturan Bupati Bangka No. 19 Tahun 2012
32	KPHP Bangka Selatan	2015	Kep. Bangka Belitung		
33	KPHL Belitung	2015	Kep. Bangka Belitung		
34	KPHP Lingga	2015	Kep. Riau		
35	KPHP Bintan Tanjung Pinang	2015	Kep. Riau		
36	KPHL Liwa	2015	Lampung	UPTD	Peraturan Bupati Lampung Barat No. 29 Tahun 2014
37	***KPHL UNIT VII Way Waya / KPHL Sendang Agung***	2015	***Lampung***	***UPTD***	***Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 6 tahun 2016***
38	KPHL Tangkit Tebak	2015	Lampung		
39	KPHL Gunung Balak	2015	Lampung	UPTD	Peraturan Bupati Lampung Timur No. 11 Tahun 2013
40	KPHP Wae Mala-Wae Mikona	2015	Maluku		
41	KPHP Bungal	2015	Maluku		
42	KPHP P. Molkar - P. Trangan	2015	Maluku		
43	KPHL Kota Ambon	2015	Maluku		
44	KPHL Maluku Tenggara	2015	Maluku		
45	KPHP Unit XXII	2015	Maluku		
46	KPHP Halmahera Timur	2015	Maluku Utara		
47	KPHP Kepulauan Sula	2015	Maluku Utara		
48	KPHP Oba	2015	Maluku Utara	UPTD	Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 17 Tahun 2014
49	KPHL Toffo Pajo	2015	Nusa Tenggara Barat	SKPD	Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No.10 Tahun 2013
50	KPHP Madapangga Rompu	2015	Nusa Tenggara Barat	UPTD	Peraturan Bupati Bima Nomor 26 Tahun 2014
51	KPHL Manggarai Timur	2015	Nusa Tenggara Timur		
52	KPHL Sumba Barat Daya	2015	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Daerah Kabupaten SBD Nomor 16 Tahun 2014
53	KPHL Manggarai	2015	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Bupati Manggarai No.14 Tahun 2014
54	KPHL Ngada	2015	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Bupati Kabupaten Ngada Nomor 40 Tahun 2014
55	KPHL Lembata	2015	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Daerah Kab. Lembata No.3 Tahun 2014
56	KPHP Nagekeo	2015	Nusa Tenggara Timur		
57	KPHP Ende	2015	Nusa Tenggara Timur		
58	KPHL Sikka	2015	Nusa Tenggara Timur		
59	KPHP Timor Tengah Selatan	2015	Nusa Tenggara Timur		
60	KPHP Timor Tengah Utara	2015	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 9 Tahun 2015
61	KPHL Belu	2015	Nusa Tenggara Timur		
62	KPHL Nabire	2015	Papua		
63	KPHP Boven Digoel	2015	Papua		
64	KPHL Mimika	2015	Papua	SKPD	Perda Kabupaten MImika No. 8 Tahun 2014
65	KPHP Nduga	2015	Papua	UPTD	Perbup Nduga No. 04 Tahun 2015
66	KPHP Sarmi	2015	Papua		
67	KPHL Pegunungan Bintang	2015	Papua		
68	KPHL Intan Jaya	2015	Papua		
69	KPHL Jayawijaya	2015	Papua	UPTD	Perbup Jayawijaya No. 10 Tahun 2014
70	KPHL Kota Jayapura	2015	Papua		

No	Nama KPH	Tahun Fasilitasi	Provinsi	Struktur Organisasi KPH	No SK KELEMBAGAAN
71	KPHP Tambrauw	2015	Papua Barat		
72	KPHP Bakau / KPHP Teluk Bintuni	2015	Papua Barat	UPTD	Perbup Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2015
73	KPHP Fakfak	2015	Papua Barat	UPTD	Perbup Fakfak Nomor 36 Tahun 2015
74	KPHL Raja Ampat	2015	Papua Barat	UPTD	Perbup Raja Ampat No. 4 Tahun 2014
75	KPHP Bengkalis	2015	Riau		
76	KPHP Siak	2015	Riau		
77	KPHP Rokan Hulu	2015	Riau		
78	KPHP Pelalawan XX	2015	Riau		
79	KPHP Pelalawan XXI	2015	Riau		
80	KPHP Indragiri Hulu	2015	Riau		
81	KPHL Kuantan Singingi	2015	Riau	UPTD	Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor. 20 Tahun 2014
82	KPHP Karossa	2015	Sulawesi Barat	UPTD	Perbup Mamuju Tengah No. 061 Tahun 2014
83	KPHP Karama	2015	Sulawesi Barat	UPTD	Perbup Mamuju No. 8 Tahun 2014
84	KPHP Kepulauan Selayar	2015	Sulawesi Selatan	UPTD	Perbup Kepulauan Selayar No. 1 Tahun 2014
85	KPHP Gunung Dako	2015	Sulawesi Tengah	UPTD	Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014
86	KPHP Banawa Lalundu	2015	Sulawesi Tengah	UPTD	Peraturan Bupati No 46 tahun 2014
87	KPHP Morowali	2015	Sulawesi Tengah	UPTD	Peraturan Bupati Morowali No.15 Tahun 2015
88	KPHP Peling	2015	Sulawesi Tengah	UPTD	Peraturan Bupati Bangkep Nomor 73 tahun 2014
89	KPHP Muna	2015	Sulawesi Tenggara		
90	KPHP Ladongi	2015	Sulawesi Tenggara	UPTD	Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor : 11 Tahun 2013
91	KPHL Mekongga Selatan	2015	Sulawesi Tenggara		
92	KPHL Ueesi	2015	Sulawesi Tenggara		
93	KPHP Bina Mahawana Sejuk	2015	Sulawesi Tenggara	UPTD	Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 410 Tahun 2014
94	KPHP Kota Baubau	2015	Sulawesi Tenggara		
95	KPHL Wakatobi	2015	Sulawesi Tenggara		
96	KPHP Mekongga Selatan	2015	Sulawesi Tenggara		
97	KPHL Lintas Sulut	2015	Sulawesi Utara	UPTD	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2016
98	KPHP Lalan Sembilang	2015	Sumatera Selatan	UPTD	Perbup Banyuasin No. 420 Tahun 2013
99	KPHL Ogan Ulu	2015	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2013
100	KPHP Suban Jeriji	2015	Sumatera Selatan	SKPD	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013
101	KPHL Bukit Nanti	2015	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor.31 tahun 2014
102	KPHL Dempo	2015	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Walikota Pagar Alam No: 41 Tahun 2014
103	KPHL Peraduan Gistang	2015	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No 4 Tahun 2015
104	KPHL UNIT XVI	2015	Sumatera Utara		
105	KPHP UNIT XVII	2015	Sumatera Utara		
106	KPHL UNIT XVIII	2015	Sumatera Utara		
107	KPHP UNIT XX	2015	Sumatera Utara		
108	KPHL UNIT XXIII	2015	Sumatera Utara		
109	KPHP UNIT XXIV	2015	Sumatera Utara		
110	KPHL UNIT XXV	2015	Sumatera Utara		
111	KPHL UNIT XXVI	2015	Sumatera Utara		
112	KPHP Tapanuli Selatan	2015	Sumatera Utara		
113	KPHP UNIT XXVIII	2015	Sumatera Utara		
114	KPHP UNIT XXXI	2015	Sumatera Utara		
115	UNIT II GORONTALO	2016	Gorontalo		
116	UNIT XVI JAMBI	2016	Jambi		
117	UNIT XV JAMBI	2016	Jambi		
118	UNIT XIV JAMBI	2016	Jambi		
119	UNIT XIII JAMBI	2016	Jambi		
120	UNIT XII JAMBI	2016	Jambi		
121	UNIT VIII JAMBI	2016	Jambi		
122	UNIT XXXIII KALBAR	2016	Kalimantan Barat		
123	UNIT XXXI KALBAR	2016	Kalimantan Barat		
124	UNIT XXX KALBAR	2016	Kalimantan Barat		
125	UNIT XVI KALBAR	2016	Kalimantan Barat		
126	UNIT XV KALBAR	2016	Kalimantan Barat		
127	UNIT XIII KALBAR	2016	Kalimantan Barat		
128	UNIT VIII KALBAR	2016	Kalimantan Barat		
129	UNIT I KALBAR	2016	Kalimantan Barat		
130	UNIT VIII KALSEL	2016	Kalimantan Selatan		
131	UNIT XXX KALTENG	2016	Kalimantan Tengah		
132	UNIT XXVIII KALTENG	2016	Kalimantan Tengah		
133	UNIT XXVII KALTENG	2016	Kalimantan Tengah		
134	UNIT XXV KALTENG	2016	Kalimantan Tengah	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2015
135	UNIT XXIV KALTENG	2016	Kalimantan Tengah		
136	UNIT XVIII KALTENG	2016	Kalimantan Tengah	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2015
137	UNIT XVII KALTENG	2016	Kalimantan Tengah	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2015
138	UNIT XIX KALTENG	2016	Kalimantan Tengah	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2015
139	UNIT XI KALTENG	2016	Kalimantan Tengah		
140	UNIT X KALTENG	2016	Kalimantan Tengah		
141	UNIT VII KALTENG	2016	Kalimantan Tengah		
142	UNIT IV KALTENG	2016	Kalimantan Tengah		
143	UNIT XXII KALTIM	2016	Kalimantan Timur		

No	Nama KPH	Tahun Fasilitasi	Provinsi	Struktur Organisasi KPH	No SK KELEMBAGAAN
144	UNIT VI KEP BABEL	2016	Kepulauan Bangka Belitung		
145	UNIT V KEPRI	2016	Kepulauan Riau		
146	UNIT II KEPRI	2016	Kepulauan Riau		
147	UNIT XIII LAMPUNG	2016	Lampung		
148	UNIT XI LAMPUNG	2016	Lampung	SKPD	Perda Kabupaten Tanggamus No 21 tahun 2011
149	UNIT XV MALUKU	2016	Maluku		
150	UNIT XII MALUKU	2016	Maluku		
151	UNIT V MALUKU	2016	Maluku		
152	UNIT XII MALUT	2016	Maluku Utara	UPTD	Peraturan Bupati Halmahera Selatan No. 11 Tahun 2013
153	UNIT XXII NTB	2016	Nusa Tenggara Barat	SKPD	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 tahun 2014
154	UNIT XV NTB	2016	Nusa Tenggara Barat	SKPD	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 tahun 2014
155	UNIT XIX NTB	2016	Nusa Tenggara Barat	SKPD	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 tahun 2014
156	UNIT XIII NTB	2016	Nusa Tenggara Barat		
157	UNIT XII NTB	2016	Nusa Tenggara Barat		
158	UNIT XI NTB	2016	Nusa Tenggara Barat		
159	UNIT X NTB	2016	Nusa Tenggara Barat		
160	UNIT VIII NTB	2016	Nusa Tenggara Barat		
161	UNIT VII NTB	2016	Nusa Tenggara Barat	UPTD	Peraturan Bupati Sumbawa Barat No.20 Tahun 2012
162	UNIT VI NTB	2016	Nusa Tenggara Barat	UPTD	Peraturan Bupati Sumbawa Barat No.20 Tahun 2012
163	UNIT XVII NTT	2016	Nusa Tenggara Timur		
164	UNIT XIV NTT	2016	Nusa Tenggara Timur		
165	UNIT XXV PAPUA	2016	Papua		
166	UNIT XXIII PAPUA	2016	Papua		
167	UNIT XLVIII PAPUA	2016	Papua		
168	UNIT XLVII PAPUA	2016	Papua		
169	UNIT XLIX PAPUA	2016	Papua		
170	UNIT LVI PAPUA	2016	Papua		
171	UNIT LIII PAPUA	2016	Papua		
172	UNIT III PAPUA	2016	Papua		
173	UNIT XII PAPUA BARAT	2016	Papua Barat		
174	UNIT VI PAPUA BARAT	2016	Papua Barat		
175	UNIT XXXII RIAU	2016	Riau		
176	UNIT XXVIII RIAU	2016	Riau		
177	UNIT XXVII RIAU	2016	Riau		
178	UNIT XXV RIAU	2016	Riau		
179	UNIT XXIX RIAU	2016	Riau		
180	UNIT XXIII RIAU	2016	Riau		
181	UNIT XV RIAU	2016	Riau		
182	UNIT XIX RIAU	2016	Riau		
183	UNIT XII RIAU	2016	Riau		
184	UNIT VI RIAU	2016	Riau		
185	UNIT IV RIAU	2016	Riau		
186	UNIT III RIAU	2016	Riau		
187	UNIT II RIAU	2016	Riau		
188	UNIT I RIAU	2016	Riau		
189	UNIT IX SULBAR	2016	Sulawesi Barat		
190	UNIT VII SULSEL	2016	Sulawesi Selatan		
191	UNIT VI SULSEL	2016	Sulawesi Selatan		
192	UNIT V SULSEL	2016	Sulawesi Selatan		
193	UNIT VIII SULTENG	2016	Sulawesi Tengah		
194	UNIT V SULTENG	2016	Sulawesi Tengah		
195	UNIT III SULTENG	2016	Sulawesi Tengah		
196	UNIT XXI SULTRA	2016	Sulawesi Tenggara		
197	UNIT XX SULTRA	2016	Sulawesi Tenggara		
198	UNIT XVI SULTRA	2016	Sulawesi Tenggara		
199	UNIT VIII SULTRA	2016	Sulawesi Tenggara		
200	UNIT VIII SULUT	2016	Sulawesi Utara	UPTD	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 24 Tahun 2016
201	UNIT V SULUT	2016	Sulawesi Utara	UPTD	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 24 Tahun 2016
202	UNIT IX SULUT	2016	Sulawesi Utara	UPTD	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 24 Tahun 2016
203	UNIT III SUMBAR	2016	Sumatera Barat		
204	UNIT I SUMBAR	2016	Sumatera Barat		
205	UNIT XXIV SUMSEL	2016	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 338 Tahun 2015
206	UNIT XXIII SUMSEL	2016	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 338 Tahun 2015
207	UNIT XXII SUMSEL	2016	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 338 Tahun 2015
208	UNIT XXI SUMSEL	2016	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 338 Tahun 2015
209	UNIT XX SUMSEL	2016	Sumatera Selatan		
210	UNIT XIX SUMSEL	2016	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No. 4 Tahun 2015
211	UNIT XV SUMUT	2016	Sumatera Utara		
212	UNIT XII SUMUT	2016	Sumatera Utara		
213	UNIT II SUMUT	2016	Sumatera Utara		
214	UNIT I SUMUT	2016	Sumatera Utara		

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D Desember 2016

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

DATA DAN INFORMASI
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

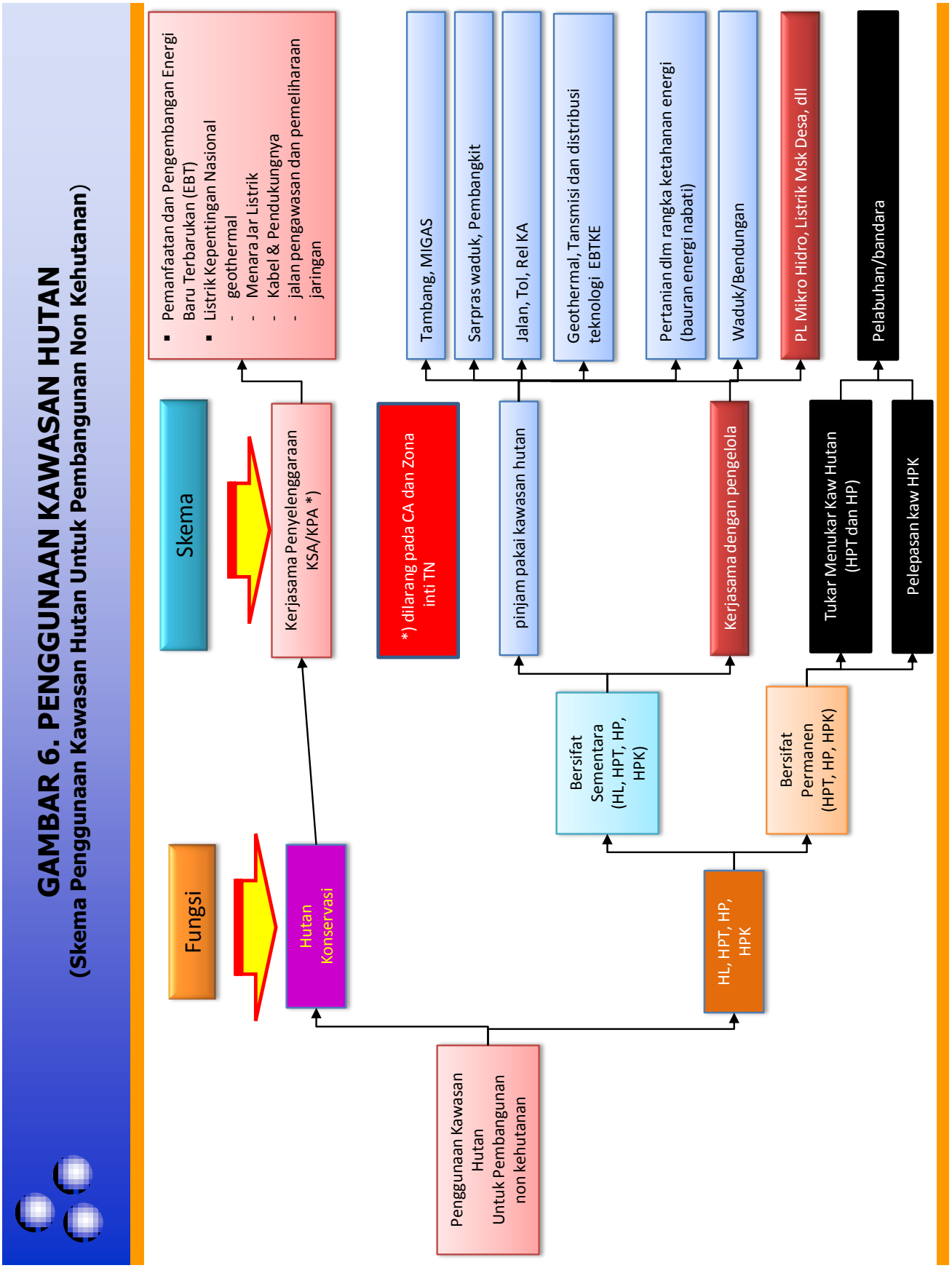
GAMBAR 6. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
(Skema Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Non Kehutanan)
Fungsi
Skema
Hutan Konservasi
Kerjasama Penyelenggaraan KSA/KPA *)
▪ Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
▪ Listrik Kepentingan Nasional
- geothermal
- Menara Jar Listrik
- Kabel & Pendukungnya
- jalan pengawasan dan pemeliharaan jaringan
*) dilarang pada CA dan Zona inti TN
Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan non kehutanan
HL, HPT, HP, HPK
Bersifat Sementara (HL, HPT, HP, HPK)
Bersifat Permanen (HPT, HP, HPK)
pinjam pakai kawasan hutan
Kerjasama dengan pengelola
Tukar Menukar Kaw Hutan (HPT dan HP)
Pelepasan kaw HPK
Tambang, MIGAS
Sarpras waduk, Pembangkit
Jalan, Tol, Rel KA
Geothermal, Tansmisi dan distribusi teknologi EBTKE
Pertanian dlm rangka ketahanan energi (bauran energi nabati)
Waduk/Bendungan
PL Mikro Hidro, Listrik Msk Desa, dll
Pelabuhan/bandara

GAMBAR 7. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
(Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)

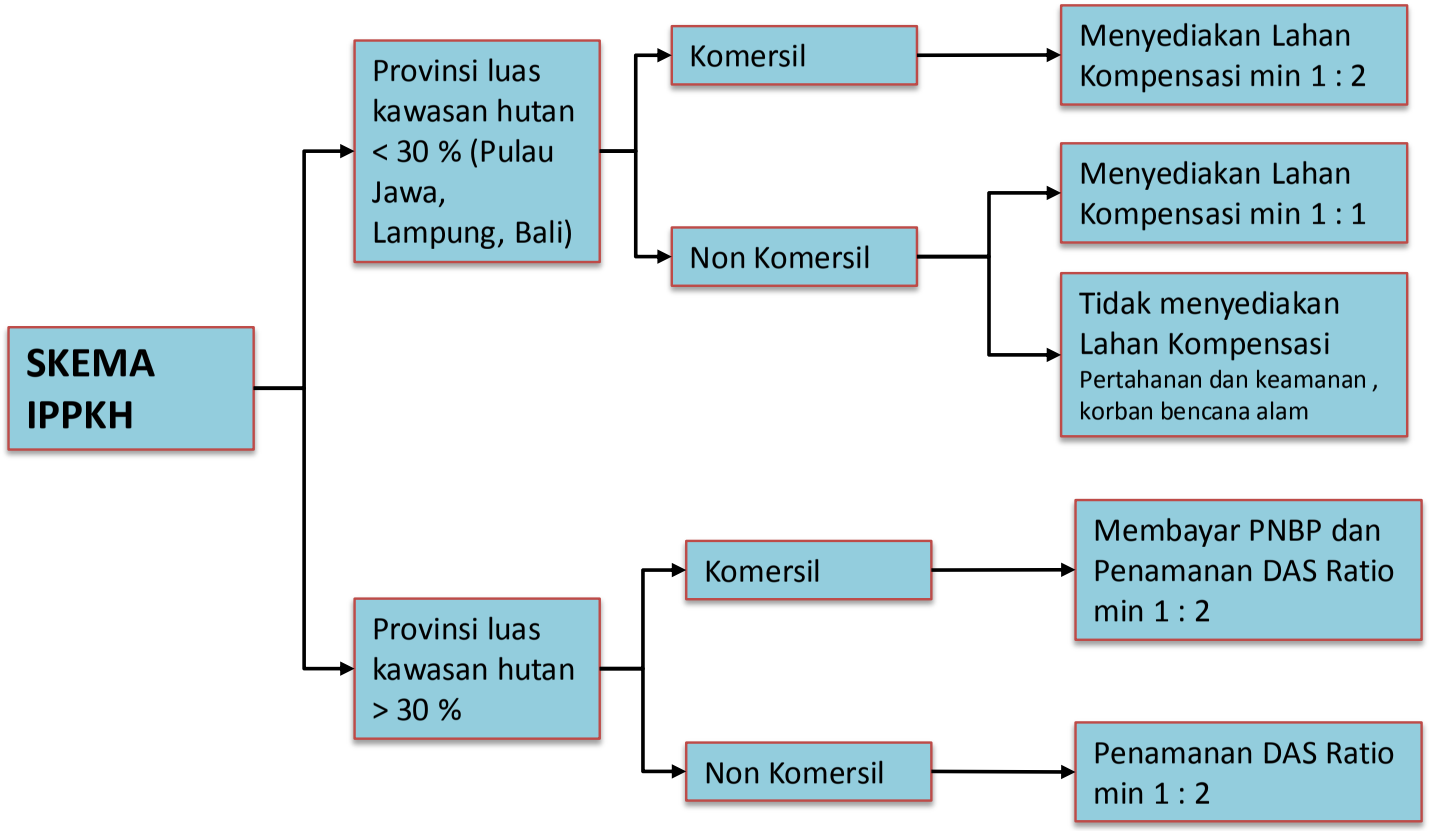

TABEL IV.1 PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN SURVEY/EKSPLORASI TAMBANG DAN NON TAMBANG

NO	PROVINSI	IPPKH-SE TAMBANG						IPPKH-SE NON TAMBANG					
		S/D 2015		2016		TOTAL S/D 2016		S/D 2015		2016		TOTAL S/D 2016	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ACEH	8	59.845,00	1	10,72	9	59.855,72	-	-	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	17	150.761,38	1	5,81	18	150.767,19	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	3	4.720,53	-	-	3	4.720,53	-	-	-	-	-	-
4	RIAU	8	413.967,37	-	-	8	413.967,37	-	-	-	-	-	-
5	JAMBI	49	230.742,09	2	4.826,26	51	235.568,35	-	-	-	-	-	-
6	SUMATERA SELATAN	41	146.852,64	2	61.620,02	43	208.472,66	-	-	-	-	-	-
7	BENGKULU	4	5.352,04	1	164,00	5	5.516,04	-	-	-	-	-	-
8	LAMPUNG	-	-	2	8.624,19	2	8.624,19	-	-	-	-	-	-
9	BANGKA BELITUNG	7	20.100,72	-	-	7	20.100,72	1	1.081,00	-	-	1	1.081,00
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	18	10.017,19	1	16,00	19	10.033,19	-	-	-	-	-	-
13	JAWA TENGAH	19	20.809,51	2	4.501,88	21	25.311,39	-	-	-	-	-	-
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	21	65.548,55	2	1.299,13	23	66.847,67	1	1,24	-	-	1	1,24
16	BANTEN	2	0,65	1	1.790,00	3	1.790,65	-	-	-	-	-	-
17	BALI	1	25,28	-	-	1	25,28	-	-	-	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	16	139.549,99	-	-	16	139.549,99	-	-	-	-	-	-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	7	28.289,00	1	11.254,26	8	39.543,26	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TENGAH	82	521.730,26	7	1.102.906,30	89	1.624.636,56	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN SELATAN	17	65.558,67	-	-	17	65.558,67	-	-	-	-	-	-
23	KALIMANTAN TIMUR	101	378.703,76	2	527,14	103	379.230,90	1	23.870,28	-	-	1	23.870,28
24	KALIMANTAN UTARA	24	116.379,23	-	-	24	116.379,23	-	-	-	-		
25	SULAWESI UTARA	7	45.659,00	-	-	7	45.659,00	-	-	-	-	-	-
26	SULAWESI TENGAH	13	84.935,98	2	15.286,75	15	100.222,73	-	-	-	-	-	-
27	SULAWESI SELATAN	5	25.413,95	1	28.389,50	6	53.803,45	-	-	-	-	-	-
28	SULAWESI TENGGARA	21	91.744,46	-	-	21	91.744,46	-	-	-	-	-	-
29	GORONTALO	7	30.357,24	-	-	7	30.357,24	-	-	-	-	-	-
30	SULAWESI BARAT	1	33,55	-	-	1	33,55	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	18	13.435,45	-	-	18	13.435,45	-	-	-	-	-	-
32	MALUKU UTARA	85	318.586,02	1	5.464,42	86	324.050,44	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	23	44.115,36	3	48.247,81	26	92.363,17	-	-	-	-	-	-
34	PAPUA	7	78.491,94	-	-	7	78.491,94	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**632**	**3.111.726,79**	**32**	**1.294.934,19**	**664**	**4.406.660,98**	**3**	**24.952,52**	**-**	**-**	**3**	**24.952,52**

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d November 2016

TABEL IV.2 PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI TAMBANG DAN NON TAMBANG

NO	PROVINSI	IPPKH-OP TAMBANG						IPPKH-OP NON TAMBANG					
		S/D 2015		2016		TOTAL S/D 2016		S/D 2015		2016		TOTAL S/D 2016	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ACEH	2	444,42	-	-	2	444,42	3	18,06	2	853,95	5	872,01
2	SUMATERA UTARA	3	69,01	1	485,00	4	554,01	49	6.002,39	12	771,58	61	6.773,97
3	SUMATERA BARAT	7	1.105,62	1	388,96	8	1.494,58	13	523,73	8	112,44	21	636,17
4	RIAU	13	7.093,40	3	660,19	16	7.753,59	4	12.366,07	1	561,72	5	12.927,79
5	JAMBI	47	6.260,79	1	45,67	48	6.306,46	2	157,46	1	90,33	3	247,79
6	SUMATERA SELATAN	26	8.492,18	10	5.274,39	36	13.766,57	14	1.178,90	2	28,83	16	1.207,73
7	BENGKULU	3	1.222,65	3	1.071,07	6	2.293,72	8	226,74	-	-	8	226,74
8	LAMPUNG	6	174,41	1	28,01	7	202,42	4	235,09	2	194,78	6	429,87
9	BANGKA BELITUNG	18	5.461,85	-	-	18	5.461,85	6	87,87	-	-	6	87,87
10	KEPULAUAN RIAU	1	1.834,47	1	56,66	2	1.891,13	1	27,00	5	398,72	6	425,72
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	2	1,97	1	14,25	3	16,22
12	JAWA BARAT	27	2.238,65	5	93,90	32	2.332,55	14	388,98	5	585,91	19	974,88
13	JAWA TENGAH	9	445,89	6	212,61	15	658,49	29	349,26	3	81,26	32	430,52
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	16	927,75	4	945,20	20	1.872,95	6	68,39	5	759,82	11	828,21
16	BANTEN	1	16,00	-	-	1	16,00	-	-	3	223,74	3	223,74
17	BALI	1	-	-	-	1	-	17	60,24	-	-	17	60,24
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	6.417,30	1	999,78	2	7.417,08	11	650,54	3	281,11	14	931,65
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4	805,61	-	-	4	805,61	5	75,55	2	39,80	7	115,35
20	KALIMANTAN BARAT	9	5.860,60	1	695,72	10	6.556,32	4	11.884,80	-	-	4	11.884,80
21	KALIMANTAN TENGAH	64	86.942,25	8	4.564,05	72	91.506,30	1	710,60	1	1.211,62	2	1.922,22
22	KALIMANTAN SELATAN	86	54.986,61	7	4.787,11	93	59.773,72	3	255,45	-	-	3	255,45
23	KALIMANTAN TIMUR	92	188.556,22	5	3.897,98	97	192.454,20	10	1.010,36	1	146,33	11	1.156,69
24	KALIMANTAN UTARA	7	7.080,97	2	3.171,17	9	10.252,14	3	719,84	2	2.541,48	5	3.261,32
25	SULAWESI UTARA	3	1.105,35	2	1.160,71	5	2.266,06	2	0,52	1	12,89	3	13,41
26	SULAWESI TENGAH	6	4.504,93	2	1.201,56	8	5.706,49	12	1.070,68	3	111,11	15	1.181,79
27	SULAWESI SELATAN	13	1.430,01	2	52,92	15	1.482,93	7	267,91	2	121,73	9	389,64
28	SULAWESI TENGGARA	29	21.824,31	5	2.706,04	34	24.530,35	5	138,97	-	-	5	138,97
29	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	3	274,40	1	38,13	4	312,53
30	SULAWESI BARAT	1	603,50	-	-	1	603,50	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	3	701,99	1	6,42	4	708,41	1	53,97	-	-	1	53,97
32	MALUKU UTARA	31	17.788,24	3	2.491,58	34	20.279,82	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	5	698,74	1	116,86	6	815,60	1	5.702,99	1	669,64	2	6.372,63
34	PAPUA	-	-	-	-	-	-	7	2.574,68	1	3,80	8	2.578,48
TOTAL		**534**	**435.093,70**	**76**	**35.113,56**	**610**	**470.207,26**	**247**	**47.083,38**	**68**	**9.854,96**	**315**	**56.938,34**

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D November 2016

TABEL IV.3 PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN SURVEY/EKSPLORASI KOMODITAS TAMBANG TAHUN 2016

NO	PROVINSI	KOMODITAS													
		Minyak dan Gas		Logam Mulia		Mineral Logam Lain		Batubara		Galian C		Panas Bumi		TOTAL	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,72	1	10,72
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,81	-	-	1	5,81
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	JAMBI	1	22,00	-	-	-	-	1	4.804,26	-	-	-	-	2	4.826,26
6	SUMATERA SELATAN	2	61.620,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61.620,02
7	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	164,00	1	164,00
8	LAMPUNG	-	-	1	8.574,19	-	-	-	-	-	-	1	50,00	2	8.624,19
9	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16,00	1	16,00
13	JAWA TENGAH	1	4.013,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	488,28	2	4.501,88
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	1	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.297,00	2	1.299,13
16	BANTEN	-	-	1	1.790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.790,00
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	-	-	1	11.254,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.254,26
21	KALIMANTAN TENGAH	3	1.029.598,31	-	-	-	-	4	73.307,99	-	-	-	-	7	1.102.906,30
22	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KALIMANTAN TIMUR	1	13,17	-	-	-	-	1	513,97	-	-	-	-	2	527,14
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	2	15.286,75	-	-	-	-	-	-	2	15.286,75
27	SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	1	28.389,50	-	-	-	-	-	-	1	28.389,50
28	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	MALUKU UTARA	-	-	1	5.464,42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.464,42
33	PAPUA BARAT	3	48.247,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	48.247,81
34	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**12**	**1.143.517,04**	**4**	**27.082,87**	**3,00**	**43.676,25**	**6,00**	**78.626,22**	**1**	**5,81**	**6**	**2.026,00**	**32**	**1.294.934,19**

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D November 2016

TABEL IV.4. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI/ SUB KEGIATAN NON TAMBANG TAHUN 2016

NO	PROVINSI	KEGIATAN		TOTAL	
		Jalan Umum dan Jalan Kereta Api, Tol			
		Unit	Luas	Unit	Luas
1	ACEH	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-
4	RIAU	-	-	-	-
5	JAMBI	-	-	-	-
6	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-
7	BENGKULU	-	-	-	-
8	LAMPUNG	-	-	-	-
9	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	-	-	-	-
13	JAWA TENGAH	-	-	-	-
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	-	-	-	-
16	BANTEN	-	-	-	-
17	BALI	-	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-
22	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-
23	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-
25	SULAWESI UTARA	-	-	-	-
26	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-
27	SULAWESI SELATAN	-	-	-	-
28	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-
29	GORONTALO	-	-	-	-
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-
31	MALUKU	-	-	-	-
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	-	-	-	-
34	PAPUA	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Ket: Tidak Ada IPPKH Untuk Kegiatan Kegiatan Survey Eksplorasi/ Sub Kegiatan Non Tambang Tahun 2016

TABEL IV.5 PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI KOMODITAS TAMBANG TAHUN 2016

NO	PROVINSI	KOMODITAS													
		Minyak dan Gas		Logam Mulia		Mineral Logam Lain		Batubara		Galian C		Panas Bumi		TOTAL	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	-	-	1	485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	485,00
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	1	388,96	-	-	-	-	1	388,96
4	RIAU	2	391,13	-	-	-	-	1	269,06	-	-	-	-	3	660,19
5	JAMBI	1	45,67	-	-	-	-			-	-	-	-	1	45,67
6	SUMATERA SELATAN	6	464,75	-	-	-	-	3	4.803,78	-	-	1	5,86	10	5.274,39
7	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	2	1.066,00	-	-	1	5,07	3	1.071,07
8	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28,01	-	-	1	28,01
9	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEPULAUAN RIAU	1	56,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56,66
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	4	58,64	1	35,26	5	93,90
13	JAWA TENGAH	2	65,76	-	-	-	-	-	-	4	146,85	-	-	6	212,61
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	2	137,23	1	798,14	-	-	-	-	1	9,83	-	-	4	945,20
16	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	1	999,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	999,78
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	1	695,72			-	-	-	-	1	695,72
21	KALIMANTAN TENGAH	-	-	1	906,97	2	470,01	5	3.187,07	-	-	-	-	8	4.564,05
22	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	2	3.659,21	5	1.127,90	-	-	-	-	7	4.787,11
23	KALIMANTAN TIMUR	1	62,98	-	-	-	-	4	3.835,00	-	-	-	-	5	3.897,98
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	2	3.171,17	-	-	-	-	2	3.171,17
25	SULAWESI UTARA	-	-	2	1.160,71	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.160,71
26	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	2	1.201,56	-	-	-	-	-	-	2	1.201,56
27	SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	2	52,92	-	-	2	52,92
28	SULAWESI TENGGARA	-	-	1	1.107,74	4	1.598,30	-	-	-	-	-	-	5	2.706,04
29	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	1	6,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,42
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	3	2.491,58	-	-	-	-	-	-	3	2.491,58
33	PAPUA BARAT	1	116,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	116,86
34	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**17**	**1.347,47**	**7**	**5.458,34**	**14**	**10.116,38**	**23**	**17.848,94**	**12**	**296,24**	**3**	**46,19**	**76**	**35.113,56**

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D November 2016

TABEL IV.6 PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI KOMODITAS/ SUB KEGIATAN NON TAMBANG TAHUN 2016

NO	PROVINSI	KOMODITAS/ SUB KEGIATAN													
		Pembangunan Ketenagalistrikan dan Instalasi Teknologi Terbarukan		Pembangunan Jaringan Telekomunikasi		Jalan Umum dan Jalan Kereta Api, Tol		Sumber Daya Air, Instalasi Air, Saluran Air Bersih dan atau Limbah		Sarpras Penunjang Keselamatan Lalin Laut, Udara, dan Sarana MKG		Transportasi Non Umum		TOTAL	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	ACEH	1	12,02	-	-	1	841,93	-	-	-	-	-	-	2	853,95
2	SUMATERA UTARA	10	351,27	1	0,31	-	-	1	420,00	-	-	-	-	12	771,58
3	SUMATERA BARAT	6	83,82	-	-	1	11,45	-	-	1	17,17	-	-	8	112,44
4	RIAU	-	-	-	-	1	561,72	-	-	-	-	-	-	1	561,72
5	JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90,33	1	90,33
6	SUMATERA SELATAN	1	1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27,00	2	28,83
7	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LAMPUNG	1	21,52	-	-	1	173,26	-	-	-	-	-	-	2	194,78
9	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEPULAUAN RIAU	2	90,82	-	-			1	294,00	-	-	2	13,90	5	398,72
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	1	14,25	-	-	-	-	-	-	1	14,25
12	JAWA BARAT	3	420,95	-	-	1	57,35	1	107,61	-	-	-	-	5	585,91
13	JAWA TENGAH	2	18,62	-	-	1	62,64	-	-	-	-	-	-	3	81,26
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	-	-	-	-	2	182,34	3	577,48	-	-	-	-	5	759,82
16	BANTEN	2	28,74	-	-	-	-	1	195,00	-	-	-	-	3	223,74
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	2	63,43	-	-	-	-	1	217,68	-	-	-	-	3	281,11
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2	39,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39,80
20	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	1	1.211,62	-	-	-	-	-	-	1	1.211,62
22	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	1	146,33	-	-	-	-	-	-	1	146,33
24	KALIMANTAN UTARA	1	1.772,00	-	-	1	769,48	-	-	-	-	-	-	2	2.541,48
25	SULAWESI UTARA	1	12,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,89
26	SULAWESI TENGAH	2	91,25	-	-	1	19,86	-	-	-	-	-	-	3	111,11
27	SULAWESI SELATAN	1	92,94	-	-	1	28,79	-	-	-	-	-	-	2	121,73
28	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	GORONTALO	-	-	-	-	1	38,13	-	-	-	-	-	-	1	38,13
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	-	-	-	-	1	669,64	-	-	-	-	-	-	1	669,64
34	PAPUA	1	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,80
TOTAL		**38**	**3.105,69**	**1**	**0,31**	**16**	**4.788,79**	**8**	**1.811,77**	**1**	**17,17**	**4**	**131,23**	**68**	**9.854,96**

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D November 2016

TABEL IV.7 PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)

PROVINSI	S/D 2015		2016		TOTAL S/D 2016	
	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
BALI	1	7,50	-	-	1	7,50
BANTEN	1	12,01	-	-	1	12,01
DKI JAKARTA	2	4,18	-	-	2	4,18
JAWA BARAT	65	5.631,59	1	38,43	66	5.670,02
JAWA TENGAH	29	1.221,38	2	26,50	31	1.247,88
JAWA TIMUR	36	2.359,91	3	258,37	39	2.618,28
LAMPUNG	8	458,20	2	80,46	10	538,66
SUMATERA UTARA	1	104,00	-	-	1	104,00
Grand Total	**143**	**9.798,77**	**8**	**403,76**	**151**	**10.202,53**

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D November 2016

TABEL IV.8 REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PENYETORAN PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

NO	PROVINSI	REALISASI PNBP-PKH													
		s/d tahun 2015				Tahun 2016						s/d tahun 2016			
		Jumlah WB	TAMBANG	NON TAMBANG	TOTAL (Rp.)	Jumlah WB			TAMBANG	NON TAMBANG	PNBP (Rp.)	Jumlah WB	TAMBANG	NON TAMBANG	TOTAL (Rp.)
			PNBP (Rp.)	PNBP (Rp.)		T	NT	Total	PNBP (Rp.)	PNBP (Rp.)			PNBP (Rp.)	PNBP (Rp.)	
1	Nangro Aceh D	3	362.232.129	18.765.768	380.997.897	2	2	4	271.317.900	83.837.666	355.155.566	4	633.550.029	102.603.434	736.153.463
2	Sumatera Utara	25	387.161.120	3.209.496.739	3.596.657.859	1	30	31	0	559.387.470	559.387.470	31	387.161.120	3.768.884.209	4.156.045.329
3	Sumatera Barat	9	3.808.927.920	450.967.764	4.259.895.684	7	2	9	1.175.266.023	104.556.035	1.279.822.058	9	4.984.193.943	555.523.799	5.539.717.742
4	Riau	15	13.068.860.667	1.346.096.000	14.414.956.667	14	1	15	5.057.055.602	350.000.000	5.407.055.602	15	18.125.916.269	1.696.096.000	19.822.012.269
5	Kepulauan Riau	1	1.996.714.615	0	1.996.714.615	1	4	5	0	0	0	5	1.996.714.615	0	1.996.714.615
6	Jambi	49	17.833.133.944	7.299.651.162	25.132.785.106	17	32	49	4.568.751.001	1.534.643.999	6.103.395.000	49	22.401.884.945	8.834.295.161	31.236.180.106
7	BENGKULU	11	6.189.698.769	635.469.199	6.825.167.968	5	7	12	1.500.030.000	253.203.492	1.753.233.492	12	7.689.728.769	888.672.691	8.578.401.460
8	Bangka Belitung	28	24.980.503.558	96.499.839	25.077.003.397	25	3	28	6.065.986.431	0	6.065.986.431	28	31.046.489.989	96.499.839	31.142.989.828
9	Sumatera Selatan	42	170.118.370.634	11.559.738.309	181.678.108.943	18	29	47	38.327.265.080	2.152.543.546	40.479.808.626	47	208.445.635.714	13.712.281.855	222.157.917.569
10	NTB	10	122.771.009.994	105.179.681	122.876.189.675	1	10	11	29.841.429.874	7.048.968	29.848.478.842	11	152.612.439.868	112.228.649	152.724.668.517
11	Nusa Tenggara Timur	4	171.218.677	236.726.441	407.945.118	2	2	4	64.405.969	121.743.200	186.149.169	4	235.624.646	358.469.641	594.094.287
12	Kalimantan Barat	11	58.515.004.310	27.872.993	58.542.877.303	10	1	11	9.054.465.000	1.920.000	9.056.385.000	11	67.569.469.310	29.792.993	67.599.262.303
13	Kalimantan Tengah	67	375.542.822.546	342.016.000	375.884.838.546	71	2	73	135.320.767.559	120.848.000	135.441.615.559	73	510.863.590.105	462.864.000	511.326.454.105
14	Kalimantan Selatan	101	1.018.003.358.652	95.355.971	1.018.098.714.623	101	2	103	315.874.620.860	1.532.400	315.876.153.260	103	1.333.877.979.512	96.888.371	1.333.974.867.883
15	Kalimantan Timur	96	1.727.075.861.234	692.036.985	1.727.767.898.219	94	3	97	407.878.667.921	210.504.000	408.089.171.921	97	2.134.954.529.155	902.540.985	2.135.857.070.140
16	Kalimantan Utara	4	4.818.986.427	0	4.818.986.427	6	1	7	14.842.850.672	460.448.400	15.303.299.072	7	19.661.837.099	460.448.400	20.122.285.499
17	Sulawesi Utara	3	6.516.652.996	3.048.048	6.519.701.044	4	1	5	4.940.581.919	101.510	4.940.683.429	5	11.457.234.915	3.149.558	11.460.384.473
18	Gorontalo	3	0	1.145.037.357	1.145.037.357	0	3	3	0	373.264.000	373.264.000	3	0	1.518.301.357	1.518.301.357
19	Sulawesi Tengah	14	26.850.685.925	1.519.706.718	28.370.392.643	8	10	18	17.706.708.015	403.553.725	18.110.261.740	18	44.557.393.940	1.923.260.443	46.480.654.383
20	Sulawesi Barat	1	1.534.754.718	0	1.534.754.718	1	0	1	0	0	0	1	1.534.754.718	0	1.534.754.718
21	Sulawesi Selatan	18	1.990.297.074	2.476.801.501	4.467.098.575	12	9	21	2.329.317.354	467.648.382	2.796.965.736	21	4.319.614.428	2.944.449.883	7.264.064.311
22	Sulawesi Tenggara	37	46.797.326.134	280.847.887	47.078.174.021	34	4	38	18.907.109.809	489.703.063	19.396.812.872	38	65.704.435.943	770.550.950	66.474.986.893
23	Maluku	2	1.629.176.418	15.967.661	1.645.144.079	1	2	3	570.762.500	18.176.000	588.938.500	3	2.199.938.918	34.143.661	2.234.082.579
24	Maluku Utara	31	120.105.061.929	0	120.105.061.929	33	0	33	39.667.563.051	0	39.667.563.051	33	159.772.624.980	0	159.772.624.980
25	Papua Barat	5	0	666.880.000	666.880.000	1	4	5	1.665.853.139	152.784.000	1.818.637.139	5	1.665.853.139	819.664.000	2.485.517.139
26	Papua	3	0	4.103.766.886	4.103.766.886	0	3	3	0	1.588.506.000	1.588.506.000	3	0	5.692.272.886	5.692.272.886
	TOTAL	**593**	**3.751.067.820.390**	**36.327.928.909**	**3.787.395.749.299**	**469**	**167**	**636**	**1.055.630.775.679**	**9.455.953.856**	**1.065.086.729.535**	**636**	**4.806.698.596.069**	**45.783.882.765**	**4.852.482.478.834**

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D November 2016

Catatan:

WB adalah Wajib Bayar

Data Penyampaian bukti Pembayaran PNBP s/d tgl. 30 September 2016

INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

DATA DAN INFORMASI
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

TABEL V.1 PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN HASIL PENAFSIRAN CITRA SATELIT PADA UNIT IUPHHK-HA

NO	KLASIFIKASI LAHAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	2	3	4
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.343.046,27	1.053.181,77
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.682.272,27	3.120.832,75
3	Hutan Primer Kerdil		
4	Hutan Bekas Tebangan Kerdil		
5	Hutan Karst		
6	Hutan Rawa Primer	97.888,00	47.406,00
7	Hutan Rawa Sekunder	103.176,48	165.731,35
8	Hutan Mangrove Primer	29.357,00	27.819,00
9	Hutan Mangrove Bekas Sekunder	66.516,66	63.263,18
10	Hutan Tanaman (Transmigrasi)	19.769,00	36.694,22
11	Belukar Tua	341.631,71	359.366,25
12	Belukar Tua Rawa	7.844,50	13.321,99
13	Belukar Muda dan Semak	396.967,71	377.379,67
14	Belukar Muda dan rawa	1.015,00	
15	Belukar Muda dan Semak rawa	16.213,09	36.905,87
16	Perkebunan	1.784,00	3.592.320,00
17	Transmigrasi		
18	Non Hutan		
19	Non Hutan Bekas Terbakar		
20	Karst		
21	Tanah Terbuka	46.485,84	538.080,68
22	Tertutup Awan/TAD	237.181,05	228.170,86
23	Pertanian Campuran	20.538,00	7.616,00
24	Tambang	752,00	1.711,00
25	Rawa		
26	Tubuh Air/Rawa/Danau	4.536,00	3.983,00
27	Karest primer	52.410,00	49.819,00
28	Karest sekunder	16.041,00	336,00
29	Pemukiman		188,00
JUMLAH LUAS PENAFSIRAN		**6.485.425,58**	**9.724.126,59**

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data S/D November 2016

TABEL V.2 PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN HASIL PENAFSIRAN CITRA SATELIT PADA UNIT IUPHHK-HTI

NO	KLASIFIKASI LAHAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	2	3	4
1	Hutan Lahan Kering Primer	49.227,00	7.156,00
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	306.274,22	248.467,62
3	Hutan Primer Kerdil		
4	Hutan Bekas Tebangan Kerdil		
5	Hutan Karst		
6	Hutan Rawa Primer	19.268,00	19.268,00
7	Hutan Rawa Sekunder	33.986,00	43.105,00
8	Hutan Mangrove Primer	3.210,00	5.765,00
9	Hutan Mangrove Sekunder		
10	Hutan Rawang		
11	Hutan Tanaman (Transmigrasi)	189.553,75	186.614,00
	Hutan Kars		4.257,00
12	Belukar Tua	161.727,50	168.622,00
13	Belukar Muda	38.778,70	
14	Belukar Tua Rawa	16.139,00	12.651,00
15	Belukar Muda Rawa		
16	Belukar Muda dan Semak	140.509,45	175.275,45
17	Belukar Muda dan Semak Rawa	41.449,00	40.484,00
18	Perkebunan	4.919,00	3.580,00
19	Transmigrasi		
20	Non Hutan		
21	Non Hutan Rawa		
22	Non Hutan Bekas Terbakar		
23	Karst	11.463,00	11.463,00
24	Tambak		
25	Pertanian Campuran		38.360,00
26	Tanah Terbuka/tambang	17.377,78	92.383,60
27	Tertutup Awan/TAD	48.862,44	48.234,99
28	Tambang	3.006,00	10.440,00
29	Tubuh Air/Rawa/Danau	2.551,00	3.146,00
JUMLAH LUAS PENAFSIRAN		**1.088.301,84**	**1.119.272,66**

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data S/D November 2016

TABEL V.3 PETA TEMATIK NON KEHUTANAN TAHUN 2016

NO.	PROVINSI	PETA TEMATIK UNTUK PEMBANGUNAN KEHUTANAN						LERENG
		TANAH		IKLIM		GEOLOGI		
		1:250.000	1:1.000.000	1:250.000	1:1.000.000	1:250.000	1:1.000.000	1:250.000
		Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	5	-	8	-	8	-	1
2	Sumatera Utara	8	1	10	1	8	1	1
3	Sumatera Barat	3	1	6	1	4	1	1
4	Riau	6	1	6	1	-	1	1
5	Kepulauan Riau	4	-	4	-	-	-	-
6	Jambi	3	1	3	1	-	1	1
7	Bengkulu	2	1	3	-	3	1	1
8	Kep.Bangka Belitung	2	-	5	-	2	-	-
9	Sumatera Selatan	4	1	5	1	4	1	1
10	Lampung	3	-	3	-	3	-	1
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	1
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	1
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	1
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	1
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	1
20	Kalimantan Barat	14	1	-	-	2	1	1
21	Kalimantan Tengah	10	1	-	-	12	-	1
22	Kalimantan Timur	18	1	-	-	2	-	-
23	Kalimantan Selatan	4	1	-	1	-	1	-
24	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	1
25	Sulawesi Utara	9	1	9	1	1	1	1
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	1	1	1	1
27	Sulawesi Selatan	10	1	10	1	1	1	-
28	Sulawesi Tenggara	6	1	6	1	1	-	1
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	1
30	Maluku	-	-	-	-	-	-	1
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	1
32	Papua	-	-	-	-	-	-	1
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**111**	**13**	**78**	**10**	**52**	**11**	**23**

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s/d Tahun 2016

TABEL V.4 PERKEMBANGAN PENDOKUMENTASIAN PETA DASAR TAHUN 2016

NO	PROVINSI	RUPA BUMI INDONESIA (RBI) (Lembar)										TOPOGRAFI (TOP) (Lembar)						JOG	TPC	ONC
		1:25000		1:50.000		1:100.000		1:250.000		1:1.000.000		1:50.000	1:100.000	1:200.000	1:250.000	1:500.000	1:1.000.000	1:250.000	1:500.000	1:1.000.000
		Cetakan	Digital	Cetakan	Digital	Cetakan	Digital	Cetakan	Digital	Cetakan	Duplikat	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan
1	Aceh	-	-	96	113	-	-	11	-	4	5	99	22	-	-	4	4	11	4	2
2	Sumatera Utara	-	-	71	154	-	-	12	9	2	5	102	22	-	7	2	1	9	2	2
3	Sumatera Barat	-	-	-	103	-	-	10	-	2	5	40	36	-	12	2	2	11	2	2
4	Riau	-	-	150	158	-	-	14	-	4	5	78	74	-	16	4	5	16	4	2
5	Kepulauan Riau	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	65	86	-	-	8	-	2	5	21	40	-	6	1	2	9	1	1
7	Bengkulu	-	-	32	51	-	-	5	-	3	5	52	21	-	3	3	3	5	3	1
8	Kep.Bangka Belitung	-	-	-	53	-	-	7	-	1	5	-	2	-	2	2	2	2	1	1
9	Sumatera Selatan	-	-	14	151	-	-	9	-	2	5	112	64	-	7	4	2	10	2	2
10	Lampung	6	-	-	70	-	-	3	-	2	5	77	38	-	7	4	2	6	2	1
11	DKI Jakarta	20	19	-	-	-	-	-	-	1	5	4	8	-	2	1	1	1	1	1
12	Jawa Barat	290	233	-	-	-	-	-	-	2	5	116	14	-	4	3	2	8	2	2
13	Banten	94	80	-	-	-	-	-	-	1	5	30	-	-	1	2	1	1	1	1
14	Jawa Tengah	231	233	-	-	-	-	-	-	1	5	113	26	-	6	2	3	8	1	2
15	D.I Jogjakarta	14	28	-	-	-	-	-	-	1	5	15	-	-	1	1	1	3	1	1
16	Jawa Timur	374	344	-	-	-	-	-	-	4	5	164	-	-	4	-	2	10	2	2
17	Bali	87	51	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	2	1	1
18	Nusa Tenggara Barat	213	180	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	6	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	498	426	-	-	-	-	-	-	2	5	-	21	-	-	-	2	14	2	2
20	Kalimantan Barat	-	-	84	260	-	-	4	-	3	5	170	-	53	-	3	2	12	3	2
21	Kalimantan Tengah	-	-	194	242	-	-	4	-	4	5	-	-	11	-	-	4	18	4	2
22	Kalimantan Timur	-	-	177	223	-	-	5	-	4	5	24	-	-	-	1	3	17	4	2
23	Kalimantan Selatan	-	-	125	83	-	-	6	-	2	5	34	31	-	-	-	1	9	1	1
24	Kalimantan Utara	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	32	35	-	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	1	2	1	1
26	Sulawesi Utara	-	-	70	42	-	-	9	-	2	5	-	-	-	-	-	2	9	1	1
27	Sulawesi Tengah	-	-	189	169	-	-	12	-	4	5	-	-	-	-	-	4	16	3	4
28	Sulawesi Selatan	-	-	98	104	-	-	13	-	4	5	-	22	-	-	-	4	13	4	1
29	Sulawesi Tenggara	-	-	77	76	-	-	6	-	2	5	-	-	-	-	-	2	7	2	1
30	Sulawesi Barat	-	-	1	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	298	-	-	174	-	-	-	-	4	5	-	42	-	-	-	2	6	2	1
32	Maluku Utara	-	-	38	117	-	10	-	-	3	5	-	47	-	-	-	3	15	2	2
33	Papua	-	-	-	458	10	-	-	-	8	5	27	100	-	-	-	7	44	7	3
34	Papua Barat	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**2125**	**1594**	**1513**	**3359**	**10**	**10**	**139**	**9**	**77**	**150**	**1278**	**670**	**64**	**78**	**39**	**72**	**300**	**67**	**48**

Sumber : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s/d Tahun 2016

Ket :

JOG : Joint Operations Graphic Ground

TPC : Tactical Pilotage Chart

TTC : Topographic Tactical Chart

ONC : Operational Navigation Chart

PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

DATA DAN INFORMASI
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

GAMBAR 8. PROSES PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL SERTA IZIN LINGKUNGAN (PP 27/2012)

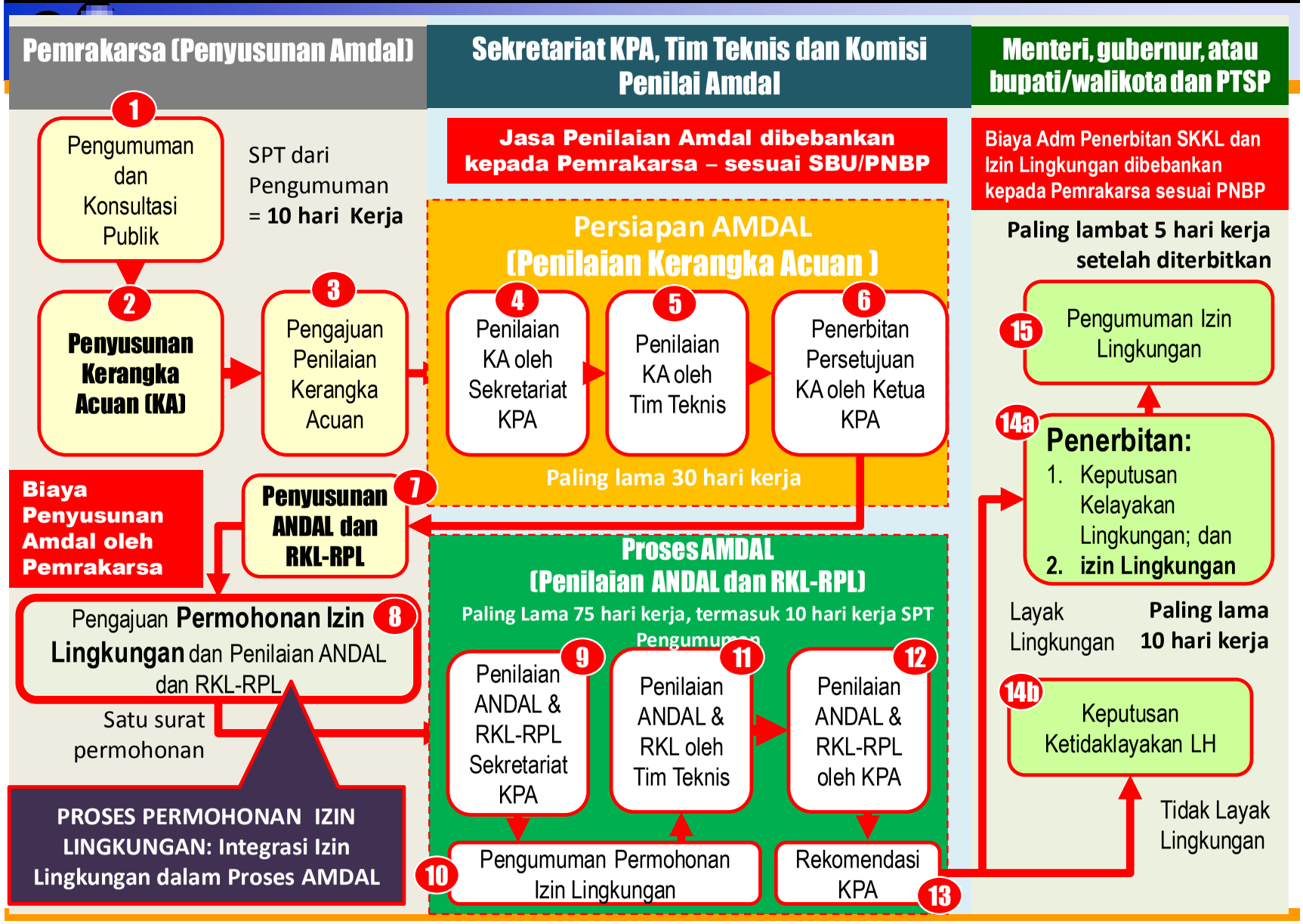

GAMBAR 9. PROSES PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL SERTA IZIN LINGKUNGAN (PP 27/2012)

Pemrakarsa

Penyusunan UKL-UPL

Biaya Penyusunan UKL-UPL oleh Pemrakarsa

Pemrakarsa

Catatan: Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL: paling lama **14 Hari Kerja**, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan **DAN** tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL

Pemeriksaan Administrasi

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Pemeriksaan Substansi UKL/UPL

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan

Pengumuman Izin Lingkungan

Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh:

a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
b. Kepala Instansi LH Provinsi; atau
c. Kepala Instansi LH Kab/Kota.

Pasal 40 PP 27/2012

Penerbitan Rekomendasi oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Penerbitan Izin Lingkungan oleh PTSP

TABEL VI.1 DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI DARI KEGIATAN AMDAL DAN UKL- UPL PADA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

No.	KEGIATAN	SURAT/SURAT KEPUTUSAN		
		JENIS	NOMOR	TANGGAL
1.	Surat Rekomendasi Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merakes-2 di Blok East Sepinggan Lepas Pantai Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur, oleh eni East Sepinggan Limited	Surat Rekomendasi	S.49/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	11 Januari 2016
2.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merakes-2 di Blok East Sepinggan Lepas Pantai Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur, oleh eni East Sepinggan Limited	Izin Lingkungan	SK.94/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	5 Februari 2016
3.	Surat Rekomendasi Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merem-1, Meliwis-1, Enggano-1, Cangak-1, Berusaha-1 dan Molah-2 di Lepas Pantai Selat Madura Blok Madura *Offshore*, Provinsi Jawa Timur oleh Santos (Madura *Offshore*) Pty. Ltd	Surat Rekomendasi	S.50/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	11 Januari 2016
4.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merem-1, Meliwis-1, Enggano-1, Cangak-1, Berusaha-1 dan Molah-2 di Lepas Pantai Selat Madura Blok Madura *Offshore*, Provinsi Jawa Timur oleh Santos (Madura *Offshore*) Pty. Ltd	Izin Lingkungan	SK.168/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	24 Februari 2016
5.	SK Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-bandung sepanjang ± 142,3 Km melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China	SK Kelayakan Lingkungan (SKKL)	SK.35/Menlhk-Setjen/PKTL.0/2016	20 Januari 2016
6.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-bandung sepanjang ± 142,3 Km melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China	Izin Lingkungan	SK.36/Menlhk-Setjen/PKTL.0/2016	20 Januari 2016
7.	Surat Rekomendasi Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Mustika-1, Mustika-2, Mustika-3 dan Mustika-4 di Blok Sakti, Lepas Pantai Laut Jawa, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur oleh KrisEnergy (Sakti) B.V.	Surat Rekomendasi	S.51/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	11 Januari 2016
8.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Mustika-1, Mustika-2, Mustika-3 dan Mustika-4 di Blok Sakti, Lepas Pantai Laut Jawa, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur oleh KrisEnergy (Sakti) B.V.	Izin Lingkungan	SK.14/Menlhk/Setjen/PKTL.4/1/2016	16 Januari 2016

No.	KEGIATAN	SURAT/SURAT KEPUTUSAN		
		JENIS	NOMOR	TANGGAL
9.	SK Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok Offshore North West Java Tahun 2015-2019 oleh PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	SKKL	SK.42/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/1/2016	26 Januari 2016
10.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok Offshore North West Java Tahun 2015-2019 oleh PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	Izin Lingkungan	SK.43/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/1/2016	26 Januari 2016
11.	SK Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan PUSPIPTEK-SERPONG dan BATAN secara khusus dalam Area Seluas 460 Hektar di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	SKKL	SK.62/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/1/2016	1 Februari 2016
12.	Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Kawasan PUSPIPTEK-SERPONG dan BATAN secara khusus dalam Area Seluas 460 Hektar di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Izin Lingkungan	SK.65/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/1/2016	1 Februari 2016
13.	Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Kawasan Nuklir dan Irradiator serta Fasilitas Lainnya di Kawasan Nuklir Serpong (KNS) – Batan, Puspiptek – Serpong, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Izin Lingkungan	SK.63/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/1/2016	1 Februari 2016
14.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Bali Lombok *Cable System* (Balok CS) sepanjang ±47,594 Km dari Seraya Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali ke Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. XL Axiata Tbk	Surat Rekomendasi	S.53/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	11 Januari 2016
15.	Izin Lingkungan Kegiatan Penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Bali Lombok *Cable System* (Balok CS) sepanjang ±47,594 Km dari Seraya Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali ke Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. XL Axiata Tbk	Izin Lingkungan	SK.171/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2016	15 Maret 2016
16.	Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Daerah Operasi Bagian Selatan, Blok East Kalimantan, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Chevron Indonesia Company	SKKL	SK.166/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2.2016	23 Februari 2016
17.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Daerah Operasi Bagian Selatan, Blok East Kalimantan, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Chevron Indonesia Company	Izin Lingkungan	SK.167/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	23 Februari 2016
18.	Perubahan Izin Lingkungan atas Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Duri *Steamflood* di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia	Perubahan Izin Lingkungan	SK.93/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	5 Februari 2016

No.	KEGIATAN	SURAT/SURAT KEPUTUSAN		
		JENIS	NOMOR	TANGGAL
19.	Perubahan Izin Lingkungan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.71.10 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengolahan Limbah Medis Dengan Incinerator di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur oleh CV Rojo Koyo	Perubahan Izin Lingkungan	SK.190/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	3 Maret 2016
20.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.36/ Menlhk/Setjen/PKTL.0/1/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-bandung sepanjang ± 142,3 Km melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)	Perubahan Izin Lingkungan	SK.192/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	4 Maret 2016
21.	SK Direktur Jendral tentang KA Andal Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan di Kampung KLayas Distrik Seget Kab. Sorong Prov. Papua Barat Oleh Pelindo II Persero	SK Kerangka Acuan (KA)	SK.6/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/2016	25 Februari 2016
22.	Surat Keputusan tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02.1.01 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Penerima untuk Pengolahan *Slop* dan *Sludge* menjadi Bahan Bakar Minyak dan Fasilitas Penunjangnya di Kawasan Sekupang *Logistic*, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Batam *Slop* dan *Sludge Treatment Centre*	Perubahan Izin Lingkungan	SK.219/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	15 Maret 2016
23.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Matenggeng di Wilayah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, oleh Satuan KErja Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy (BBWS Citanduy), Dirjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum	SKKL	SK.189/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/3/2016	3 Maret 2016
24.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Bendungan Matenggeng di Wilayah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, oleh Satuan KErja Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy (BBWS Citanduy), Dirjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum	Izin Lingkungan	SK.191/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/3/2016	3 Maret 2016
25.	Surat Rekomendasi tentang Ukl-Upl Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi SSO-01 di lapangan South Saubi Blok Kangean Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Kepada Kangean Energy Indonesia Limited	Surat Rekomendasi	S.190/Menlhk-PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/20216	26 Februari 2016
26.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi SSO-01 di lapangan South Saubi Blok Kangean Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Kepada Kangean Energy Indonesia Limited	Izin Lingkungan	SK.288/Menlhk/Setjen/PKTL.4/4/2016	11 April 2016
27.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan-Lapangan Minyak dan Gas Blok East Kalimantan pada Daerah Operasi Bagian Utara di Perairan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur oleh Chevron Indonesia Company	SKKL	SK.233/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/3/2016	21 Maret 2016
28.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan-Lapangan Minyak dan Gas Blok East Kalimantan pada Daerah Operasi Bagian Utara di Perairan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur oleh Chevron Indonesia Company	Izin Lingkungan	SK.236/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/3/2016	21 Maret 2016

No.	KEGIATAN	SURAT/SURAT KEPUTUSAN		
		JENIS	NOMOR	TANGGAL
29.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut SEA-ME-WE 5 Rute Dumai-BU1B-1 Sepanjang 97,998 Km dan Medan-BU1B-2 Sepanjang 89,776 Km di Perairan Selat Malaka Kepada PT. Telekomunikasi Indonesia *International* (TELIN)	Surat Rekomendasi	Rekom: S.207/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	4 Maret 2016
30.	Izin Lingkungan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut SEA-ME-WE 5 Rute Dumai_BU1B-1 Sepanjang 97,998 KM dan Medan-BU1B-2 Sepanjang 89,776 KM di Perairan Selat Malaka Kepada PT Telekomunikasi Indonesia *International* (TELIN)	Izin Lingkungan	SK.289/Menlhk/Setjen/PKTL.4/4/2016	11 April 2016
31.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemasangan Kabel Komunikasi Bawah Laut Proyek Sulawesi Maluku *Submarine Cable System* (SMPCS) Kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Surat Rekomendasi	S.206/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	4 Maret 2016
32.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemasangan Kabel Komunikasi Bawah Laut Proyek Sulawesi Maluku *Submarine Cable System* (SMPCS) Segmen 21.7, Segmen 22 dan Segmen 22.6 Sepanjang 54,086 KM, 434,327 KM dan 833,675 KM di Wilayah Perairan Kabupaten Fakfak, Kota Sorong, Provinsi Papu Barat dan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Marauke, Provinsi Papua yang Terintegrasi Dengan Kegiatan Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut Proyek Sulawesi Maluku Papua *Submarine Cable System,* Sepanjang 1.398,55 KM di Wilayah Peairan Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Kegiatan Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut Proyek Sulawesi Maluku Papua *Submarine Cable System Link*, Sepanjang 881,309 KM di Wilayah Kabupaten Fakfak, Timika, Tual, Kaimana Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	Izin Lingkungan	SK.292/MENLHK/Setjen/PLA.4/4/2016	11 April 2016
33.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja Ketapang, Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur kepada PC Ketapang II Ltd.	Surat Rekomendasi	S.208/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	4 Maret 2016
34.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja Ketapang, Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur kepada PC Ketapang II Ltd.	Izin Lingkungan	SK.293/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2016	11 April 2016
35.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 175 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Seluruh Kegiatan Produksi hingga 80.000.000 (Delapan Puluh Juta) Ton Pertahun Tambang Batubara di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh PT. Adaro Indonesia	Perubahan Izin Lingkungan	SK.246/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	29 Maret 2016
36.	Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Lapangan Minyak dan Gas Tambun, di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pertamina EP Asset 3 Tambun Field	Perubahan Izin Lingkungan	SK.290/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2016	11 April 2016
37.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pelabuhan Lembar dan Terminal Gilimas di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	SKKL	SK.247/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	29 Maret 2016

No.	KEGIATAN	SURAT/SURAT KEPUTUSAN		
		JENIS	NOMOR	TANGGAL
38.	Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Lembar dan Terminal Gilimas di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Izin Lingkungan	SK.248/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	29 Maret 2016
39.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja North Madura II, Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur kepada PC North Madura II Ltd.	Surat Rekomendasi	S.209/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	4 Maret 2016
40.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja North Madura II, Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur kepada PC North Madura II Ltd	Izin Lingkungan	SK. 328/Menlhk/Setjen/PKTL.4/4/2016	27 April 2016
41.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 301 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok *West Madura Offshore* di Lepas Pantai Utara Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur oleh PT. Pertamina Hulu Energi *West Madura Offshore* (PHE WMO)	Perubahan Izin Lingkungan	SK.309/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2016	20 April 2016
42.	SK Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660/K.827/2012 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi PT. Indika Logistic Support Services yang berlokasi di Kota Balikpapan	Perubahan Izin Lingkungan	SK.318/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2016	20 April 2016
43.	SK Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 105 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak Ande-Ande Lumut blok West Natuna oleh Genting Oil Natuna Pte, Ltd.	SKKL	SK.294/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/4/2016	11 April 2016
44.	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 106 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak Ande Ande Lumur Blok *Northwest* Natuna oleh Genting Oil Natuna Pte, Ltd	Izin Lingkungan	SK.295/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/4/2016	11 April 2016
45.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, KemenHub	SK KA	SK.19/PKTL/PKTL.4/3/2016	29 Maret 2016
46.	SK Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kawasan Industri Candi, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, oleh PT. Wastec International	SK KA	SK.21/PKTL/PDLUK/PKTL.4/5/2016	17 Mei 2016
47.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan CPO Maloy di Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	SK KA	SK.20/PKTL/PDLUK/PKTL.4/5/2016	25 April 2016
48.	Surat Rekomendasi tentang UKL-UPL Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Sorolangun-Muara Rupit dan Gardu Induk Terkait, di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara,Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	Surat Rekomendasi	S.52/Menlhk-PKTL/2016	11 Januari 2016

No.	KEGIATAN	SURAT/SURAT KEPUTUSAN		
		JENIS	NOMOR	TANGGAL
49.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Sorolangun-Muara Rupit dan Gardu Induk Terkait, di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara,Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	Izin Lingkungan	SK. 429/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	9 Juni 2016
50.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Rencana Pembangunan SUTT dan USC/Kabel Laut 150 kV Interkoneksi Sumatera Selatan-Bangka (GI Tanjung Api-Api - GI Muntok) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sebagian melintasi Hutan Lindung), oleh PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan III)	SK KA	S.27/PKTL/PDLUK/PLA.4/6/2016	13 Juni 2016
51.	Perubahan IL Total E&P Indonesia Mentawai B.V Kegiatan Survei Seismik (Dua Dimensi) di Perairan Lepas Pantai Blok Bengkulu I-Mentawai, Provinsi Bengkulu	Perubahan Izin Lingkungan	SK. 448/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016`	17 Juni 2016
52.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi oleh PT. Hexindo Gemilang Jaya	SK KA	SK.28/PKTL/PDLUK/PLA.4/6/2016	14 Juni 2016
53.	Kelayakan Lingkungan Rencana Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kepada PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	SKKL	SK.493/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
54.	Rencana Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kepada PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	Izin Lingkungan	SK.503/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
55.	Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Karaha Bodas Unit 2 dan 3 (2 x 55 MW) di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pertamina Geothermal Energy	SKKL	SK.495/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
56.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Karaha Bodas Unit 2 dan 3 (2 x 55 MW) di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pertamina Geothermal Energy	Izin Lingkungan	SK.505/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
57.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 189 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok B Natuna, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau oleh ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd	perubahan Izin Lingkungan	SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
58.	Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penempatan Coridore Storage Tanker (CST) di Perairan Selat Bangka, Kabupaten Bangka Barat, kepulauan Bangka Belitung kepada ConocoPhillips (Grissik) Ltd	SKKL	SK.494/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
59.	Izin Lingkungan Kegiatan Penempatan Coridore Storage Tanker (CST) di Perairan Selat Bangka, Kabupaten Bangka Barat, kepulauan Bangka Belitung kepada ConocoPhillips (Grissik) Ltd	Izin Lingkungan	SK.504/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016

No.	KEGIATAN	SURAT/SURAT KEPUTUSAN		
		JENIS	NOMOR	TANGGAL
60.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Kegiatan Pabrik Pengolahan Limbah B3 secara Insinerasi di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh PT. Liebe Green Standard Technology	SK KA	SK.37/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	8 Agustus 2016
61.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Penambangan Pasir Laut di Wilayah Perairan Laut Jawa di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten kepada An. PT. Purnama Gemilang	SK KA	SK.34/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	3 Agustus 2016
62.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Bungkutoko (Kendari New Port) di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh PT. Pelindo IV (Persero)	SK KA	SK.35/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	4 Agustus 2016
63.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Pengembangan Lapangan Gas MAC, di Perairan Selat Madura, Provinsi Jawa Timur kepada Husky Cnooc Madura Limited	SK KA	SK.36/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	4 Agustus 2016
64.	Kelayakan Lingkungan Rencana Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)	SKKL	SK.647/ Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016 SK	16 Agustus 2016
65.	Izin Lingkungan Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Izin Lingkungan	SK.648/Menlh/Setjen/PLA.4/8/2016	16 Agustus 2016
66.	Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Pipa Gas SPBG di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Surat Rekomendasi	S.662/Menlh-PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016	26 Juli 2016
67.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Pipa Gas SPBG di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Izin Lingkungan	SK.655/Menlh/Setjen/PLA.4/8/2016	26 Agustus 2016
68.	Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 185 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Senoro dan Pemipaan Gas Senoro-Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah oleh JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	perubahan Izin Lingkungan	SK.657/Menlh/Setjen/PLA.4/8/2016	26 Agustus 2016
69.	Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/66/II/BAPEDALDA Tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Peningkatan dan Optimalisasi Produksi Penambangan dan Pengolahan Bijih Nikel PT. Inco hingga mencapai 225 Juta Pon Nikel dalam Matte Per Tahun di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan	Perubahan Izin Lingkungan	SK.533 /Menlh/Setjen/PLA.4/7/2016	13 Juli 2016

No.	KEGIATAN	SURAT/SURAT KEPUTUSAN		
		JENIS	NOMOR	TANGGAL
70.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Emas DMP dalam Wilayah Kontrak Karya KW 96PK105 di Blok Timburu, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh PT. Pelsart Tambang Kencana	SK KA	SK.38/PKTL/PLA.4/8/2016	8 Agustus 2016
71.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Lepas Pantai di Blok South Sesulu, Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. SAKA Indonesia Sesulu	Surat Rekomendasi	S.235/Menlhk-PKTL/PDLUK/PKTL.4/3/2016	24 Maret 2016
72.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Lepas Pantai di Blok South Sesulu, Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. SAKA Indonesia Sesulu	Izin Lingkungan	SK.399/Menlhk/Setjen/PKTL.4/6/2016	2 Juni 2016
73.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Deliniasi di Blok Tuna, Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau oleh Premier Oil Tuna B.V.	Surat Rekomendasi	S.445/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2016	26 April 2016
74.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Deliniasi di Blok Tuna, Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau oleh Premier Oil Tuna B.V.	Izin Lingkungan	SK.689/Menlhk/Setjen/PKTL.4/9/2016	2 September 2016
75.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Survei Seismik 2D Blok Offshore North X-Ray di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat kepada Conrad Petroleum (V) Limited	Surat Rekomendasi	S.652/Menlhk-PKTL/PDLUK/PKTL.4/7/2016	21 Juli 2016
76.	Izin Lingkungan Kegiatan Survei Seismik 2D Blok Offshore North X-Ray di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat kepada Conrad Petroleum (V) Limited	Izin Lingkungan	SK.688/Menlhk/Setjen/PKTL..4/9/2016	2 September 2016
77.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarna-Hatta (Pengembangan Terminal 4 Tahap I, Landas Pacu 3 dan *Automatic People Mover System*), di Cengkareng, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)	SK KA	SK.46/PKTL/PDLUK/PLA.4/9/2016	14 September 2016
78.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh PT. Supreme Energy Rantau Dedap (SERD)	SK KA	SK.42/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	26 Agustus 2016
79.	Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Supadio – Pontianak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Angkasa Pura II (Persero)	SKKL	SK MELHK Nomor SK.717/ Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	15 September 2016
80.	Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Supadio – Pontianak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Angkasa Pura II (Persero)	Izin Lingkungan	SK.718/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	15 September 2016

No.	KEGIATAN	SURAT/SURAT KEPUTUSAN		
		JENIS	NOMOR	TANGGAL
81.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Lapangan Migas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, oleh PT. Hexindo Gemilang Jaya	SKKL	SK. 750/ Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	21 September 2016
82.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, oleh PT. Hexindo Gemilang Jaya	Izin Lingkungan	SK. 751/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	21 September 2016
83.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Lengo Blok Bulu, Provinsi Jawa Timur, oleh KrisEnergy (Satria) Ltd.	SKKL	SK.713/ Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 dan	15 September 2016
84.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Lengo Blok Bulu, Provinsi Jawa Timur, oleh KrisEnergy (Satria) Ltd.	Izin Lingkungan	SK.714/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	15 September 2016
85.	Surat Keputusan Direktur Jenderal PLanologi Kehutanan dan Tata lingkungan tentang Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan Penyimpanan Sementara Limbah B3) dan Limbah non B3 di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pengolahan LImbah Industri Bekasi (PLIB)	SK KA	SK.51/PKTL/PDLUK/PLA.4/11/2016	10 November 2016
86.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Blok Rokan Wilayah Operasi Bekasap-Rokan, di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia	Perubahan Izin Lingkungan	SK.792/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016	17 Oktober 2016
87.	Perubahan atas Keputusan Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02.7.02 Tahun 2015 Tentang Izin LIngkungan kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi Blok Rokan wilayah Operasi Minas-Siak di KAbupaten Siakm Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia	Perubahan Izin Lingkungan	SK.785/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016	12 Oktober 2016
88.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan Nomor SK.94/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2016 tentang Izin LIngkungan kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merakes-2 di Blok East Sepinggan,Lepas Pantai Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur oleh Eni EAST SEPINGGAN LIMITED	Perubahan Izin Lingkungan	SK.814/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016	27 Oktober 2016
89.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ LIght Rail Transit (LRT) Terintegrasi, di wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi, Lintas Pelayanan Cawang-Cibubur, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, Cawang-Bekasi Timur kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementeria Perhubungan.	SKKL	SK.855/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2016	10 November 2016
90.	Izin LIngkungan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Tarnsit (LRT) terintegrasi, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi kepada Direktorat Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	Izin Lingkungan	SK.857/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2016	10 November 2016
91.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi wilayah kerja Siak di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.	Perubahan Izin Lingkungan	SK.868/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2016	11 November 2016

Sumber : Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data S/D November 2016

TABEL VI.2 PERKEMBANGAN PENERBITAN SK DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP

No	NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN	LOKASI	SK DELH	Izin Lingkungan
1	PT. Indonesia Multipurpose Terminal	Kegiatan kepelabuhan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) di wilayah perairan pelabuhan banjarmasin	Perairan Taboneo, Provinsi Kalimantan Selatan	Keputusan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Dokumen Evaluasi LIngkungan Hidup Kegiatan Kepelabuhanan Terminal Terapung Badan Usaha Pelabuhan PT Indonesia Multipurpose Terminal di Perairan Taboneo Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 Mei 2015	SK.432/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 13 Oktober 2015
2	PT.Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Lembar	Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Keputusan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Dokumen Evaluasi LIngkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT Pelabuhan Indonesia III tanggal 28 Mei 2015	SK.434/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 13 Oktober 2015
3	PT. Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Ahmad Yani Ternate	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.51/PKTL-PDLUK/2015 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 23 November 2015	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.453/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Ternate Kota ternate Provinsi Maluku Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ternate tanggal 17 Juni 2016
4	PT. Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Ambon	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.53/PKTL-PDLUK/2015 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Ambon, KotaAmbon, Provinsi Maluku oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 23 November 2015	KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.421/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 Tentang Izin LIngkungan Kegiatan Pelabuhan Ambon, KotaAmbon, Provinsi Maluku oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon Tanggal 7 Juni 2015
5	PT. Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Biak	Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Barat	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.2/PKTL-PDLUK/2016 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Biak di Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Biak	Keputusan MENLHK Nomor SK.99/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Biak di Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Biak Tanggal 9 Agustus 2016
6	PT. Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Merauke	Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Barat	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.11/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Merauke Oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 25 Februari 2016	Keputusan MENLHK Nomor : Sk.392/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Merauke Kab Merauke Provinsi Papua Oleh PT Pelabuhan Indonesia IV Tanggal 23 mei 2016
7	PT. Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Parepare	Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.12/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Parepare, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 25 Februari 2016	KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 690/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Parepare, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 2 September 2016
8	PT. Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Paotere	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.52/PKTL-PDLUK/2015 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Paotere, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) cabang Makassar Tanggal 23 November 2015	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.404/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Paotere, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) Cabang Makassar tanggal 2 Juni 2016
9	PT. Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Tarakan (Malundung)	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Tarakan di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) cabang Tarakan Tanggal 18 November 2015	Keputusan MENLHK Nomor : SK.430/Menlhk/Setjen/PLA.4/06/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Tarakan di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) Cabang Tarakan Tanggal 9 Juni 2016

No	NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN	LOKASI	SK DELH	Izin Lingkungan
10	PT. Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Nunukan (Tunon Taka)	Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Nunukan di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) cabang Nunukan Tanggal 18 November 2015	Keputusan MENLHK Nomor : Sk.391/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Nunukan di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) Tanggal 23 mei 2016
11	PT. Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Samarinda	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.5/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/2016 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 25 Februari 2016	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.402/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Samarinda Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 2 Juni 2016
12	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo	Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 18 November 2015	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.691/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 2 September 2016
13	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.10/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Pasuruan, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 25 Februari 2016	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.628/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Pasuruan, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 9 Agustus 2016
14	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Sampit Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Keputusan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Dokumen Evaluasi LIngkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 28 Mei 2015	SK.544/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Terminal Sampit, Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 19 November 2015
15	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Keputusan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dokumen Evaluasi LIngkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 28 Mei 2015	SK.542/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 19 November 2015
16	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Bima di Kota Bima	Kota Bima, Provinsi NTB	Keputusan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Dokumen Evaluasi LIngkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Bima Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 27 Mei 2015	SK.549/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Bima, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 19 November 2015
17	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Badas di Kab. Sumbawa Besar	Kab. Sumbawa Besar, Provinsi NTB	Keputusan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Dokumen Evaluasi LIngkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Badas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 27 Mei 2015	SK.433/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Badas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
18	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Stagen Kab. Kotabaru	Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.42/PKTL-SET/2015 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Stagen, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 9 November 2015	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.630/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Kotabaru Terminal Stagen, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 9 Agustus 2016

No	NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN	LOKASI	SK DELH	Izin Lingkungan
19	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Batulicin di Kab. Tanah Bumbu	Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.43/PKTL-SET/2015 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Kotabaru Terminal Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 9 November 2015	Keputusan MENLHK Nomor SK.234/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Kotabaru Terminal Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 21 maret 2016
20	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Kotabaru (panjang) kab. Kotabaru	Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Nomor: SK.2/PKTL/SETDIT/KUM.1/2/2016 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuuhan Kotabaru Terminal Panjang, Kabupaten kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 4 februari 2016	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.637/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016 tentang IZin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Kotabaru Terminal Panjang,Di Desa Siring Laut, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 12 Agustus 2016
21	PT. Pelabuhan Indonesia III	Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Keputusan Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Tata Lingkungan Nomor : SK.7/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Pulang Pisau di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 25 Februari 2016	KeputusanMenteri Lingkungan Hidup Nomor : Sk.771/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Pulang Pisau di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanggal 3 Oktober 2016
22	Camar Resources Canada INC	Migas	Blok Bawean, Laut Jawa, Provinsi Jawa Timur	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.40/PKTL-SET/2015 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Area CAMAR di Blok Bawean, Laut Jawa, Provinsi Jawa Timur oleh Camar Resources Canada INC Tanggal 23 Oktober 2015	Keputusan MENLHK Nomor SK.287/Menlhk/Setjen/PKTL.4/4/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Area CAMAR di Blok Bawean, Laut Jawa, Provinsi Jawa Timur oleh Camar Resources Canada INC Tanggal 11 April 2016
23	PT Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Manokwari, Jl. Banjarmasin No.3, Kec. Manokwari Barat, Kab. Maokwari, Papua Barat	Kec. Manokwari Barat, Kab. Maokwari, Papua Barat	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.22/PKTL/PDLUK/PKTL.4/5/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pelabuhan Manokwari oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tanggal 17 Mei 2016	Keputusan MENLHK Nomor SK.626/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pelabuhan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tanggal 9 Agustus 2016
24	PT Pelabuhan Indonesia IV	Pelabuhan Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong	Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Sorong oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 18 November 2015	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 772/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Sorong oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 3 Oktober 2016
25	PLN Beban Jawa-Bali	Kegiatan Transmisi (500 kV sepanjang 5.660.2 Kms; 150 kV sepanjang 13.280,06 Kms;70 kV sepanjang 3.007,26 Kms), gardu induk sejumlah 489 buah dan kantor sejumah 9 gedung di wilayah area penyaluran dan pusat pengaturan Beban Jawa Bali	Jawa - Bali	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.14/PDLUK/PKTL.4/3/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Oleh PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Tanggal 4 Maret 2016	Keputusan Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan Nomor : SK.709/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Oleh PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Tanggal 13 September 2016
26	PT PINDAD (Persero) Bandung		Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.3/PKTL/PDLUK.4/2/2016 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perubahan dan Penambahan Divisi Kendaraan (DIV KK) dan Divisi Bahan Peledak Komersial (DIV HANDAKKOM) serta Perubahan Jenis Produk Menjadi Aneka Jenis Produk dan Kapasitas Plan Per Tahun Kegiatan Divisi PT Pindad (Persero) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat oleh PT Pindad (Persero) tanggal 10 Februari 2016	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.645/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perubahan dan Penambahan Divisi Kendaraan (DIV KK) dan Divisi Bahan Peledak Komersial (DIV HANDAKKOM) serta Perubahan Jenis Produk Menjadi Aneka Jenis Produk dan Kapasitas Plan Per Tahun Kegiatan Divisi PT Pindad (Persero) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat oleh PT Pindad (Persero) tanggal 16 Agustus 2016

No	NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN	LOKASI	SK DELH	Izin Lingkungan
27	PT Pelabuhan Indonesia II	Pelabuhan Tanjung pandan	Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung	Keputusan Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Tata Lingkungan Nomor : SK.8/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Kepelabuhan Tanjung Pandan di Dermaga 04,05,08, Terminal Penumpang, dan Gudang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitungu Provinsi Bangka Belitung oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjungpandan Tanggal 3 Februari 2016	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.806/MEnlhk/Setjen/PLA.4/10/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Kepelabuhan Tanjung Pandan di Dermaga 04,05,08, Terminal Penumpang, dan Gudang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjungpandan Tanggal 20 Oktober 2016
28	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana	Pelabuhan Kaimana	Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: SK.15/PKTL/PDLUK/PKTL.4/3/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tanggal 4 Maret 2016	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.398/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
29	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana	Pelabuhan Kaimana	Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: SK.15/PKTL/PDLUK/PKTL.4/3/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tanggal 4 Maret 2016	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.398/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
30	PT Pelabuhan Indonesia II	Pelabuhan Banten	Kota Cilegon, Provinsi Jawa Barat	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.16/PKTL/PDLUK/PKTL.4/3/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Kepelabuhan Banten di Dermaga 005, Reception Facilitiesdan Pengerukan oleh PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten Tanggal 4 Maret 2016	
31	PT Perkebunan Nusantara III	Kebun kelapa sawit sei meranti seluas 7.520 Hs dan pabrik pengolahannya dengan kapasitas 60 ton TBS/jam	Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.9/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Kebun Sei Meranti, Sei Daun, Torgamba, Bukit Tujuh, Sei Kebara, dan Sei Bauhur serta Pabrik Pengolahannya di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh PT Perkebunan Nusantara III(Persero) Tanggal 25 Februari 2016	
32	PT Pelabuhan Indonesia II	Pelabuhan Palembang (Terminal Boom Baru dan Terminal Sungai Lais)	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.13/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Kepelabuhan Terminal Boom Baru dan Terminal Sungai Lais Palembangn di Kecamatan Ilir Timur II dan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Pelindo II (Persero) Tanggal 25 Februari 2016	
33	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan PT Pelabuhan Indonesia II	Pelabuhan Tanjung Priok	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.30/PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan PT Pelindo II (Persero) Tanggal 15 Juli 2016	

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data S/D November 2016

(Hasil Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Surat Edaran Nomor S.446/Menlhk-PKTL/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH))

PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

DATA DAN INFORMASI
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

TABEL VII.1 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	URAIAN	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH					
		INVENTARISASI LH	DRAFT DOKUMEN RPPLH	DRAFT PP/PERMEN	RANCANGAN DRAFT PERDA	PP/PERMEN	PERDA
A	**DOKUMEN RPPLH NASIONAL**						
		√	Draft RPPLH Nasional Tahun 2015-2035	- Draft PP Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH - Draft Permen PPPLH - Draft Permen Pedoman Penyusunan RPPLH	x	-	x
B	**DOKUMEN RPPLH PROVINSI**						
B.1.	**Ekoregion Jawa**						
1.	DKI Jakarta	√	√	x	√	x	-
2.	Jawa Barat	√	√	x	√	x	-
3.	Jawa Timur	√	√	x	√	x	-
4.	Banten	√	√	x	-	x	-
5.	Jawa tengah	-	-	x	-	x	-
6.	D.I. Yogyakarta	-	-	x	-	x	-
B.2.	**Ekoregion Sumatera**						
7.	Sumatera Selatan	√	√	x	-	x	-
8.	Bengkulu	-	-	x	-	x	-
9.	Jambi	-	-	x	-	x	-
10.	Riau	-	-	x	-	x	-
11.	Sumatera Barat	-	-	x	-	x	-
12.	Sumatera Utara	√	-	x	-	x	-
13.	Aceh	√	-	x	-	x	-
14.	Lampung	√	√	x	-	x	-
B.3.	**Ekoregion Kalimantan**						
15.	Kalimantan Selatan	√	√	x	√	x	-
C	**DOKUMEN RPPLH KAB/KOTA**						
C.1.	**Ekoregion Jawa**						
1.	Kab. Bandung - Jabar	-	-	X	-	X	-
2.	Kab. Sukabumi - Jabar	√	√	X	-	X	-

NO	URAIAN	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH					
		INVENTARISASI LH	DRAFT DOKUMEN RPPLH	DRAFT PP/PERMEN	RANCANGAN DRAFT PERDA	PP/PERMEN	PERDA
3.	Kota Semarang - Jateng	√	-	X	-	X	-
4.	Kab. Pemalang - Jateng	√	-	x	-	x	-
5.	Kab. Wonogiri - Jateng	-	-	x	-	x	-
6.	Kab. Klaten - Jateng	-	-	x	-	x	-
7.	Kota Yogyakarta - DIY	-	-	x	-	x	-
8.	Kota Surabaya - Jatim	-	-	x	-	x	-
9.	Kota Blitar - Jatim	-	-	x	-	x	-
10.	Kab. Malang - Jatim	-	-	x	-	x	-
11.	Kota Depok	√	√	x	√	x	√
C.2.	**Ekoregion Sumatera**						
12.	Kota Bandar Lampung	√	√	x	-	x	-
13.	Kab. Ogan Komering Ulu	√	√	x	-	x	-

Sumber: Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data S/D Oktober 2016

TABEL VII.2 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS S/D BULAN OKTOBER 2016

No	Jenis Dokumen KLHS	Hirarki					Keterangan
		Nas	Prov	Kab	Kota	Jumlah	
I	**Review KLHS**						-
1	RPJMP						-
2	RPJMD	-	3	9	-	12	Kab. Belu, Kab Indramayu, Kab Tangerang, Kab Semarang, Kab Belu, Kab.Purworejo, Kab Belu, Kab Tasikmalaya, Prov. Kalimantan Utara, Kab Tana Tidung, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat
3	KRP	-	-			-	
4	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	1	4	3	8	Malaka, Tapanuli Selatan, Kota Semarang, Kota Tidore, Prop Banten, Kab. Mandailing Natal, Kab. Katingan, Kota Serang
5	Rencana Rinci (RDTR)	-	-	5	1	6	Kota Denpasar,Kab. Muaratami, Kab. Sukamara, Kab. Kutai Kertanegara, Kab Kuningan, Kab Natuna,
6	Kawasan Strategis Nasional	-	-	-	-	-	
7	Kawasan Strategis Provinsi	-		-	-	-	
8	Kawasan Strategis Kabupaten	-	-	-	-	-	
9	Kawasan Strategis Kota	-	-	-	-	-	
10	Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	
11	Laut Nasional	-	-	-	-	-	
12	Zonasi	-	-	-	-	-	
13	Reklamasi	-	-	-	-	-	
14	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	
J U M L A H I		-	**4**	**18**	**4**	26	
						-	
II	**Bintek KLHS**					-	
1	RPJMP	-	6	-	-	6	Jawa Tengah, Rakor KLHS RPJMD Prop Jawa Barat, prop Kalsel, Kab Kota Prop Jawa Barat, 21 Kab Kota Prop Jateng , Prop Gorontalo

No	Jenis Dokumen KLHS	Hirarki					Keterangan
		Nas	Prov	Kab	Kota	Jumlah	
2	RPJMD	-	5	21	5	31	Kab Tasikmalaya, Kota Batam, Prop Jateng, Kab balangan, Klinik Konsultasi KLHS (Kab Padang Panjang, Kota Solok, Kab Tanah Datar, Prop Sumbar, Kab Padang Pariaman, Kab 50 Kota, Kota Solok Selatan, Kab Sijunjung, Kab Pasaman Barat), klinik konsultasi KLHS (Belu, Prop. Kaltim, Kab Sidoarjo, Kota Tidore, Prop Gorontalo, Kota Tojo Una Una, Kab Bone Bolango), Klinik KLHS (Kota Bukittinggi, Kab Bima, Kab Belu, Kota Jayapura, Prop Sumsel), Kab Nagekeo, Kab Semarang, Kab Bone Bolango, Prop Sulteng, Kab Gowa, Kab Berau, Kab Bontang, Kab Gorontalo, DKI Jakarta, Kab Manokwari,
3	KRP	-		-	-	-	
4	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	2	5	-	7	Prop Jatim, Prop Sumut, Kab Manokwari, Kab Fak-fak, Kab Temanggung, Kab Magelang, Kab Sukoharjo,
5	Rencana Rinci (RDTR)	-	4	2		6	Kab Kuningan, Kab Natuna, Wilayah Jawa, Maluku, NTT, Papua
6	Kawasan Strategis Nasional	-	-	-	-	-	
7	Kawasan Strategis Provinsi	-	-	-	-	-	
8	Kawasan Strategis Kabupaten	-	-	-	-	-	
9	Kawasan Strategis Kota	-	-	-	-	-	
10	Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	
11	Laut Nasional	-	-	-	-	-	
12	Zonasi	-		-	-	-	
13	Reklamasi	-	-	-	-	-	
14	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	
J U M L A H II		-	**11**	**28**	**5**	44	
III	**Peraturan Terkait KLHS**					-	
	Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cata Penyelenggaraan KLHS					-	Telah ditetapkan PP No 46 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS

Sumber: Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Keterangan :
√ : Sudah disusun/sudah selesai
- : Belum disusun/belum selesai
x : Tidak perlu disusun

TABEL VII.3 VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
A	***EKOSISTEM HUTAN***									
1	Taman Hutan Raya (per 22 Ha)									
		Daun Pakan Ternak	Nilai Produksi	3.581.529.620,00	Rp./Tahun	461.418,40	Rp/Ekor/Tahun	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Propinsi Lampung	Agus Setiawan, 2000, Tesis Program Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung	Luas 22,244 Ha
		Biomasa Kayu Bakar	Nilai Produksi	10.329.411.216,00	Rp./Tahun	91.402,63	Rp/Org/Tahun			
		Air Rumah Tangga	Nilai Produksi	487.530.594,00	Rp./Tahun	3.385,30	Rp/Org/Tahun			
		Air Sawah	Nilai Produksi	149.083.495,00	Rp./Tahun	35.420,17	Rp/Ha/Tahun			
		Perladangan Tanaman Semusim	Nilai Produksi	381.235.682,00	Rp./Tahun	157.609,00	Rp/Ha/Tahun			
		Perladangan Tanaman Tahunan	Nilai Produksi	1.389.565.000,00	Rp./Tahun	157.609,00	Rp/Ha/Tahun			
		Wisata	Nilai Produksi	9.357.513,00	Rp./Tahun	9.275,21	Rp/1000 Penduduk/Tahun			
	Total Nilai (valuasi) dari beberapa variable sumberdaya alam			*16.327.713.120,00*	*Rp./Tahun*					
2	Fungsi Hidrologis Hutan Taman Nasional									
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Musim Hujan)	CVM (WTP)	2.469.012.192,00	Rp./Tahun	3.810.204,00	Rp./KK/Tahun		Herlianto,2005, Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Nilai Ekonomi Fungsi Hidrologis Hutan Taman Nasional Gunung Halimun (Studi Kasus di desa Cisarua Kecamatan Sukajaya dan Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor)	Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Musim Hujan)	CVM (WTP)	1.986.029.280,00	Rp./Tahun	3.064.860,00	Rp./KK/Tahun			Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Musim Hujan)	CVM (WTP)	1.767.873.600,00	Rp./Tahun	2.728.200,00	Rp./KK/Tahun			Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	3.259.958.400,00	Rp./Tahun	5.030.800,00	Rp./KK/Tahun			Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	2.680.096.248,00	Rp./Tahun	4.135.951,00	Rp./KK/Tahun		Tipe A = Air Mineral	Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	1.856.267.280,00	Rp./Tahun	2.864.610,00	Rp./KK/Tahun		Tipe B = Air Keruh	Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Musim Hujan)	CVM (WTP)	8.251.397.750,00	Rp./Tahun	4.460.215,00	Rp./KK/Tahun		Tipe C = Air Sangat Keruh	Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Musim Hujan)	CVM (WTP)	6.153.895.500,00	Rp./Tahun	3.326.430,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Musim Hujan)	CVM (WTP)	4.241.565.300,00	Rp./Tahun	2.292.738,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	1.007.060.265,00	Rp./Tahun	5.443.569,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	7.601.681.450,00	Rp./Tahun	4.109.017,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	4.475.462.650,00	Rp./Tahun	2.419.169,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Pertanian (Musim Hujan)	CVM (WTP)	10.710.914.630,00	Rp./Musim	16.302.762,00	Rp/Petani/Musim			Desa Cisarua
		Nilai Air Pertanian (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	11.192.321.090,00	Rp./Musim	17.035.542,00	Rp/Petani/Musim			Desa Cisarua
		Nilai Air Pertanian (Musim Hujan)	CVM (WTP)	4.914.524.860,00	Rp./Musim	6.921.866,00	Rp/Petani/Musim			Desa Curug Bitung
		Nilai Air Pertanian (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	5.591.190.360,00	Rp./Musim	7.874.916,00	Rp/Petani/Musim			
	Total Nilai			**78.159.250.855,00**	Rp/Tahun					

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
2	Valuasi Ekonomi Satwa Liar di Sekitar Hutan									
		Nilai Babi	CVM (WTP)	9.702.677,00	Rp./Tahun/KK				Dini Rahmanita, 2006,Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Nilai Ekonomi Satwa Liar Berdasarkan Preferensi Masyarakat Di Sekitar Hutan : Studi Kasus di Hutan Produksi PT.Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah.	
		Nilai Kancil	CVM (WTP)	1.029.581,00	Rp./Tahun/KK					
		Nilai Kijang	CVM (WTP)	1.867.297,00	Rp./Tahun/KK					
		Nilai Rusa	CVM (WTP)	8.566.929,00	Rp./Tahun/KK					
		Nilai Trenggiling	CVM (WTP)	11.132.063,00	Rp./Tahun/KK					
	Total Nilai			**32.298.547,00**	**Rp./Tahun/KK**					
3	Valuasi Ekonomi Hutan Pendidikan									
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	683.338.887,40	Rp./Tahun	1.903.450,94	Rp/Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Hutan Pendidikan Gunung Walat	Emi Roslinda, 2002, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Hutan Pendidikan Gunung Walat dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar	
		Nilai Getah Damar	Nilai Produksi	102.000.000,00	Rp./Tahun	816.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan = 359 Ha
		Nilai Bibit Alami	Nilai Produksi	75.000.000,00	Rp./Tahun	600.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Damar = 125 Ha
		Nilai Pakan Ternak	Nilai Produksi	229.354.144,80	Rp./Tahun	638.869,48	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tanaman Obat	Nilai Produksi	32.000.000,00	Rp./Tahun	3.200.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Obat = 10 Ha
		Nilai Tanaman Hias	Nilai Produksi	30.000.000,00	Rp./Tahun	150.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Hias = 200 Ha
		Nilai Tanaman Pangan Liar	Nilai Produksi	10.800.000,00	Rp./Tahun	43.200,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Pangan Liar = 250 Ha
		Nilai Air untuk Rumah Tangga	Nilai Produksi	2.084.018.810,00	Rp./Tahun	5.805.066,32	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Air Untuk Pertanian	Nilai Produksi	190.227,85	Rp./Tahun	3.111,81	Rp/Ha/Tahun			Luas Sawah 61.131 Ha
		Nilai Perladangan	Nilai Produksi	1.725.407,95	Rp./Tahun	21.595,13	Rp/Ha/Tahun			Luas Ladang 79.898 Ha
		Nilai Kesejukan	Nilai Barang Pengganti	581.580.000.000,00	Rp./Tahun	1.620.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Serapan Karbon	Nilai Produksi	3.521.014.560,00	Rp./Tahun	9.807.840,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**588.349.442.038,00**	**Rp./Tahun**					
4	Valuasi Ekonomi Hutan Kota, Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan									
		Nilai Hutan Kota	Nilai Kesehatan	1.519.475.000,00	Rp./Tahun	11.255.370,37	Rp/Ha/Tahun		Asyrafy, 2008, Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Valuasi Ekonomi Hutan Kota Berdasarkan Pendektan Biaya Kesehatan (Studi Kasus Taman Margasatwa Ragunan Jakarta)	
	Total Nilai			**1.519.475.000,00**	**Rp./Tahun**					Luas = 135 Ha
5	Valuasi Ekonomi Total Hutan Kayu Putih, Provinsi Maluku,Kabupaten Seram Bagian Barat, Desa Piru									
		Nilai Daun Kayu Putih	Nilai Produksi	757.574.000,00	Rp./Tahun	378.787,00	Rp/Ha/Tahun		Evelin Parera, 2005, Tesis Sekolah Pasca Sarjana IPB, Nilai Ekonomi Total Hutan Kayu Putih: Kasus Di Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku	
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	226.730.000,00	Rp./Tahun	113.365,00	Rp/Ha/Tahun			Luas 2000 Ha
		Nilai Air (Rumah Tangga dan Industri Kayu Putih)	Nilai Produksi	2.076.970.000,00	Rp./Tahun	1.038.485,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Flora	Nilai Barang Pengganti	4.988.000,00	Rp./Tahun	2.494,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Fauna	Nilai Barang Pengganti	47.176.000,00	Rp./Tahun	23.588,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**6.152.388.000,00**	**Rp./Tahun**					

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
17	Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang Di Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara	Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	21.027.933.840,00	Rp./Tahun	19.012.598.409,49	Rp/Ha/Tahun		Erni Sisca Dewi, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara	Luas Terumbu Karang = 1,11 Ha
	Total Nilai Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang Di Pulau Ternate			**21.027.933.840,00**	**Rp./Tahun**					
6	Valuasi ekonomi Kawasan Yang Di Rehabilitasi Hutan dan Lahan Studi Kasus Proyek RHL, Provinsi DI Yogyakarta, Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul									
		Nilai Kayu Pertukangan	Nilai Produksi	3.933.294.737,00	Rp./Tahun	3.070.487,69	Rp/Ha/Tahun		Fitri Nurfatriani, 2005, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai ekonomi Kawasan Yang Di Rehabilitasi (Hutan dan Lahan) Studi Kasus Proyek RHL Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta	Luas= 1281 Ha
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	809.745.067,00	Rp./Tahun	632.199,50	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pakan Ternak	Nilai Produksi	13.129.705.023,00	Rp./Tahun	10.249.574,57	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tanaman Obat	Nilai Produksi	8.779.250,00	Rp./Tahun	2.595,88	Rp/Kg/Tahun			Total Produksi= 3382 kg
		Nilai Kayu Putih	Nilai Produksi	734.573.861,00	Rp./Tahun	830.871,92	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Kayu Putih= 884.1 Ha
		Nilai Air Rumah Tangga	CVM (WTP)	1.007.483.598,00	Rp./Tahun	28.745,82	Rp/Org/Tahun			
		Nilai Pencagahan Erosi	CVM (WTP)	1.228.756.480,00	Rp./Tahun	959.216,61	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Flora	CVM (WTP)	349.956.923,00	Rp./Tahun	273.190,42	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Fauna	CVM (WTP)	1.619.044.848,00	Rp./Tahun	1.263.891,37	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	73.064.742.642,00	Rp./Tahun	57.037.269,82	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**95.886.082.429,00**	**Rp./Tahun**					
7	Valuasi Ekonomi Konservasi Hutan Sekunder Ke Usahatani Lahan Kering di Kecamatan Gelumbang Muara Enim Sumatera Selatan									
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	476.900.000,00	Rp./Tahun	50.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan Sekunder 9538 Ha
		Nilai Kayu Gelondongan Campuran	Nilai Produksi	749.209.000,00	Rp./Tahun	78.549,91	Rp/Ha/Tahun		Elisa Wildayana, 1999, Tesis Program Pascasarjana, Valuasi Ekonomi Konservasi Hutan Sekunder Ke Usahatani Lahan Kering di Kecamatan Gelumbang Muara Enim Sumatera Selatan	
		Nilai Durian	Nilai Produksi	1.080.000,00	Rp./Tahun	113,23	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pisang	Nilai Produksi	240.000,00	Rp./Tahun	25,16	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	1.296.000,00	Rp./Tahun	135,88	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pencegah Erosi	Nilai Penggantian	234.800.000,00	Rp./Tahun	24.617,32	Rp/Ha/Tahun			Terukur dari biaya rehabilitasi lahan dengan *Mucuna sp* yang tererosi sebanyak 15 ton/ha/thn @ Rp.1641/Ha
		Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengganti	3.815.200.000,00	Rp./Tahun	400.000,00	Rp/Ha/Tahun			Terukur dari 20 ton/ha/th serasah setara dengan kompos @Rp 200/kg
		Nilai Habitat Flora dan Fauna	Nilai Barang Pengganti	7.543.500.000,00	Rp./Tahun	790.889,08	Rp/Ha/Tahun			Terukur dari biaya penghijauan Rp.1.5 juta/ha dan potensi turisme 10 orang/minggu @Rp.75000
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	2.324.900.000,00	Rp./Tahun	243.751,31	Rp/Ha/Tahun			Ministry of State for Population and environmental (1993) US$ 32.5/ha/tahun
		Nilai Manfaat Kebanggaan	Nilai Barang Pengganti	1.125.000.000,00	Rp./Tahun	117.949,26	Rp/Ha/Tahun			Biaya Pembuatan Jalan Sepanjang 75 km
		Nilai Bibit Tanaman	Nilai Produksi	2.002.980.000,00	Rp./Tahun	210.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	32.429.200.000,00	Rp./Tahun	3.400.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**50.704.305.000,00**						

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
B	*EKOSISTEM PESISIR*									
1	Valuasi Ekonomi Kawasan Pesisir Dalam Pengembangan Budidaya Tambak Prov Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai	Nilai Budidaya Udang+Bandeng	Nilai Produksi	2.794.995.612,00	Rp./Tahun	8.078.022,00	Rp/Ha/Tahun		Asbar, 2007, Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB, Optimasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	
		Nilai Budidaya Rumput Laut	Nilai Produksi	3.929.899.451,40	Rp./Tahun	11.358.090,90	Rp/Ha/Tahun			Luas Mangrove 346 Ha
		Nilai Penangkapan Kepiting Bakau	Nilai Produksi	4.733.597.167,82	Rp./Tahun	13.680.916,67	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kelelawar	Nilai Produksi	794.505.960,00	Rp./Tahun	2.296.260,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Benur	Nilai Produksi	2.416.334.250,00	Rp./Tahun	6.983.625,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Nener	Nilai Produksi	1.978.428.000,00	Rp./Tahun	5.718.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Bibit Bakau	Nilai Produksi	108.125.000,00	Rp./Tahun	312.500,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	49.539.588,00	Rp./Tahun	143.178,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kerang	Nilai Produksi	49.305.000,00	Rp./Tahun	142.500,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	7.650.000.000,00	Rp./Tahun	22.109.826,59	Rp/Ha/Tahun			PT.Diagram (1994) dalam Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (1995) biaya Pembangunan Break Water = Rp.100000/m3, Volume bangunan 180000m3
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	1.169.268,75	Rp./Tahun	3.379,39	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	49.312.125,00	Rp./Tahun	142.500,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9500/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	1.009.677.698,00	Rp./Tahun	2.917.722,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu	Benefit Transfer	1.358.000,00	Rp./Tahun	150.888,89	Rp/Ha/Tahun	Kajian Ekonomi Ekosistem Mangrove Bagi Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali	Arief Waluyo Hadi, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi Ekosistem Mangrove Bagi Pengembangan Bandara Ngurah Rai - Bali	Luas 9 ha, Santoso. Et al (1998) 12.3-26.5 m3/ha/tahun atau rata-rata 19.4 m3/ha/tahun
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	14.317.500,00	Rp./Tahun	1.590.833,33	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Arang	Nilai Produksi	15.675.000,00	Rp./Tahun	3.918.750,00	Rp/Ha/Tahun			Pengambilan Arang pada Luas Mangrove 4 Ha
		Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	69.534.720,00	Rp./Tahun	46.356.480,00	Rp/Ha/Tahun			Pengambilan Daun Nipah pada Luas = 1.5 Ha
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	384.181.714,00	Rp./Tahun	42.686.857,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	213.480.000,00	Rp./Tahun	23.720.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	134.736.000,00	Rp./Tahun	14.970.667,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kerang	Nilai Produksi	166.230.000,00	Rp./Tahun	20.778.750,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Burung	Nilai Produksi	22.950.000,00	Rp./Tahun	2.550.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak	Nilai Produksi	32.000.000,00	Rp./Tahun	21.333.333,33	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak 1.5 Ha
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	1.374.552.000,00	Rp./Tahun	152.728.000,00	Rp/Ha/Tahun			Dahuri (1995) biaya Rp.3000000 P=1m, L=5m, T=6m, ketahanan 10 tahun
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	603.117,00	Rp./Tahun	67.013,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1.134.000,00	Rp./Tahun	126.000,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8400/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	25.627.500,00	Rp./Tahun	2.847.500,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**2.456.379.551,00**	**Rp./Tahun**					
	Total Optimasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan			**25.564.889.120,97**	**Rp./Tahun**					

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
C	***EKOSISTEM MANGROVE SULAWESI***									
1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Utara									
	Hutan Mangrove Sulawesi Utara	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	30.544.200,00	Rp./Tahun	492.648,39	Rp/Ha/Tahun	Hutan Mangrove Di Desa Talise, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	Adnan Sjaltout Wantasen, 2002, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekologi-ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove Di Desa Talise, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	
	Total Nilai Hutan Mangrove			*30.544.200,00*	*Rp./Tahun*					Luas 62 Ha, Harga Kayu Rp.7500/M3
2	Valuasi Ekonomi Mangrove Di Provinsi Sulawesi Selatan									
		Budidaya Tambak Udang dan Bandeng	Nilai Produksi	292.501.886,80	Rp./Tahun	8.410.060,00	Rp/Ha/Tahun		Rusdianah, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi dan Ekologi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Pesisir Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan	
		Budidaya Rumput Laut	Nilai Produksi	695.600.000,00	Rp./Tahun	20.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas 34.78 Ha
		Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	486.920.000,00	Rp./Tahun	14.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Penangkapan Kelelawar	Nilai Produksi	142.273.363,48	Rp./Tahun	4.090.666,00	Rp/Ha/Tahun			
		Kayu Bakar	Nilai Produksi	4.979.730,84	Rp./Tahun	143.178,00	Rp/Ha/Tahun			
		Penahan Abrasi Pantai	Biaya Perbaikan	4.434.450.000,00	Rp./Tahun	127.500.000,00	Rp/Ha/Tahun			Harga Break Water Rp.425000/M3 (L = 5 m, Kedalaman = 6 M, Daya Tahan 10 Tahun
		Penyedia Pakan	Biaya Barang Pengganti	4.434.816.711,00	Rp./Tahun	127.510.543,73	Rp/Ha/Tahun			Harga Pakan Udang Rp. 1500/Kg, Kebutuhan pakan udang per Kg Udang = 1,5 Kg
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	4.434.450,00	Rp./Tahun	127.500,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8500/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	101.478.371,00	Rp./Tahun	2.917.722,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Total			**10.658.542.913,12**	**Rp./Tahun**					
3	Valuasi ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Tenggara, Tinanggea									
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	9.504.000,00	Rp./Tahun	1.441,00	Rp/Ha/Tahun	Valuasi ekonomi Hutan Mangrove untuk Budidaya Tambak di Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara	Muhammad Alfian, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Valuasi ekonomi Konversi Hutan Mangrove Untuk Budidaya Tambak di Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara	Luas 6596 Ha
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	340.998.000,00	Rp./Tahun	51.695,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Rajungan	Nilai Produksi	1.795.377.400,00	Rp./Tahun	272.180,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	101.640.000,00	Rp./Tahun	15.409,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	1.747.245.000,00	Rp./Tahun	264.895,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak Tradisional	Nilai Produksi	601.118.800,00	Rp./Tahun	2.051.600,00	Rp/Ha/Tahun			Luas 294 Ha Tambak Tradisional
		Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak Tradisional Plus	Nilai Produksi	1.021.844.460,00	Rp./Tahun	7.298.889,00	Rp/Ha/Tahun			Luas 140 Ha Tambak Tradisional Plus
		Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak Semi Intensif	Nilai Produksi	557.757.084,00	Rp./Tahun	14.677.818,00	Rp/Ha/Tahun			Luas 38 Ha Tambak Semi Intensif
		Nilai Fungsi Pencegahan Interusi Air Laut	Nilai Oportunitas	11.728.219.620,00	Rp./Tahun	1.778.080,60	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyedia Unsur Hara	Benefit Transfer	5.105.007.722,00	Rp./Tahun	773.955,08	Rp/Ha/Tahun			

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	973.613.732,40	Rp./Tahun	147.600,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9141.57/US$
4	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi tenggara, Parigi Mutong									
		Fuel Wood	Production Value	8.793.500,00	Rp./Year	19.971,11	Rp/Ha/Year	Economic Assessment For Mangrove Ecosystem in Malakosa Coastal Zone, Parigi Moutong District, Central sulawesi Province	Normawati M.Said, 2006, Thesis Post Graduate School IPB, Economic Assessment For Mangrove Ecosystem in Malakosa Coastal Zone, Parigi Moutong District, Central sulawesi Province	Luas 440.311 Ha
		House Construction	Production Value	3.035.472,22	Rp./Year	6.893,93	Rp/Ha/Year			
		Nypa-Roof	Production Value	3.079.667,00	Rp./Year	6.994,30	Rp/Ha/Year			
		Fishing material	Production Value	11.683.638,89	Rp./Year	26.534,97	Rp/Ha/Year			
		mollusk collecting	Production Value	25.012.167,00	Rp./Year	56.805,68	Rp/Ha/Year			
		Crab collecting culturing, and seeds	Production Value	230.257.833,33	Rp./Year	522.943,63	Rp/Ha/Year			
		Shrimp ponds	Production Value	1.382.741.526,33	Rp./Year	3.140.374,70	Rp/Ha/Year			
		Milkfish ponds	Production Value	3.113.128,53	Rp./Year	7.070,29	Rp/Ha/Year			
		Milksfish and shrimp ponds	Production Value	1.409.809.667,92	Rp./Year	3.201.849,76	Rp/Ha/Year			
		Bats	Production Value	708.827.500,00	Rp./Year	1.609.833,73	Rp/Ha/Year			
		Birds	Production Value	2.233.000,00	Rp./Year	5.071,42	Rp/Ha/Year			
		Breakwater	Replecement Cost	30.870.873.596,00	Rp./Year	70.111.520,26	Rp/Ha/Year			Aprilwati (2001) cost Rp.4,153,880 L = 1m, W= 11m, H=2.5m, resistance= 10 tahun
		Biodiversity Value	Benefit Transfer	61.555.477,80	Rp./Year	139.800,00	Rp/Ha/Year			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9320/US$
		Existence Value	CVM (WTP/WTA)	7.923.840.370,95	Rp./Year	17.996.008,21	Rp/Ha/Year			
	Nilai Total			**42.644.856.545,97**	**Rp./Year**					
5	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Tenggara, Donggala									
		Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	268.234.050,00	Rp./Tahun	1.207.500,00	Rp/Ha/Tahun		Arman Lalo, 2003, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekologi-Ekonomi Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Lestari di Kawasan Pesisir Banawa Selatan Kabupaten Donggala	
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	238.578.360,00	Rp./Tahun	1.074.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Mangrove 222.14 Ha
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	177.712.000,00	Rp./Tahun	800.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	595.335.200,00	Rp./Tahun	2.680.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak	Nilai Produksi	2.913.844.000,00	Rp./Tahun	7.450.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak 391.12 Ha
		Nilai Penahan Abrasi	Benefit Transfer	28.322.850.000,00	Rp./Tahun	127.500.000,00	Rp/Ha/Tahun			PT.Diagram (1994) dalam Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (1995) biaya Pembangunan Break Water = Rp.100000/m3, asumsi inflasi 4.25%
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	306.835,31	Rp./Tahun	1.381,27	Rp/Ha/Tahun			Nilai Pakan Udang
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	28.322.850,00	Rp./Tahun	127.500,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8500/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	211.391.289,61	Rp./Tahun	951.612,90	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai Ekonomi Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara			**32.756.574.584,92**	**Rp./Tahun**					
D	*EKOSISTEM HUTAN MANGROVE JAWA*									
6	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Jawa Barat, Subang									
		Nilai Kayu	Nilai Produksi	385.952.364,00	Rp./Tahun	1.711.920,00	Rp/Ha/Tahun		Djoko Santoso, 2005, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan Magrove di Kawasan Pondok Bali Desa Legonwetan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, Jawa Barat	

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	106.362.350,10	Rp./Tahun	471.778,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 225.45 Ha
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	948.234.583,80	Rp./Tahun	4.205.964,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	356.583.894,30	Rp./Tahun	1.581.654,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	191.331.749,70	Rp./Tahun	848.666,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ular	Nilai Produksi	160.781.020,20	Rp./Tahun	713.156,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Lahan Pertambakan Pola Empang Parit	Nilai Produksi	174.904.239,30	Rp./Tahun	1.159.458,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Pola Empang Parit = 150.85 Ha
		Nilai Lahan Pertambakan Pola Tradisional	Nilai Produksi	454.801.888,80	Rp./Tahun	7.034.832,00	Rp/Ha/Tahun			lUas Tambak Pola Tradisional = 64.65 Ha
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	423.891.330,00	Rp./Tahun	4.153.880,00	Rp/27.5m3/tahun			Aprilwati (2001) biaya Rp.4,153,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Biaya Barang Pengganti	129.137.760,00	Rp./Tahun	572.800,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 225.45 Ha
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	36.789.156,00	Rp./Tahun	144.000,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9600/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	980.707.500,00	Rp./Tahun	4.350.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Total Ekonomi			**4.349.477.836,20**	**Rp./Tahun**					
7	Kajian Ekonomi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah									
		Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	7.666.783.000,00	Rp./Tahun	970.000,00	Rp/Ha/Tahun		Trie Joko Paryono, 1999, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	339.807.947,00	Rp./Tahun	42.992,44	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 7903.9 Ha
		Nilai Arang	Nilai Produksi	81.270.000,00	Rp./Tahun	10.282,27	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	63.140.000,00	Rp./Tahun	9.665,70	Rp/Ha/Tahun			Luas Nipah 6532.38 Ha
		Nilai Bibit Mangrove	Nilai Produksi	7.884.899.024,40	Rp./Tahun	997.596,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	213.512.760,00	Rp./Tahun	27.013,60	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemanfaatan Udang	Nilai Produksi	1.943.223.291,00	Rp./Tahun	245.856,26	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	2.029.646.220,00	Rp./Tahun	256.790,47	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kerang	Nilai Produksi	510.078.000,00	Rp./Tahun	64.534,98	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Burung	Nilai Produksi	40.400.000,00	Rp./Tahun	6.184,58	Rp/Ha/Tahun			Luas penangkapan Burung 6532.38 Ha
		Nilai Penangkapan Biawak	Nilai Produksi	20.854.167,00	Rp./Tahun	3.192,43	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kera	Nilai Produksi	8.100.000,00	Rp./Tahun	1.239,98	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pengambilan *Kroto*	Nilai Produksi	89.454.000,00	Rp./Tahun	13.693,94	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Wisata	Pengeluaran Wisatawan di Tempat	223.766.400,00	Rp./Tahun	18.508,40	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Nilai Penggantian	38.628.739.140,00	Rp./Tahun	3.195.101,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	903.956.462,00	Rp./Tahun	74.769,00	Rp/Ha/Tahun			Memakai harga Pupuk
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1.773.601.533,00	Rp./Tahun	146.700,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9780/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	43.338.056.220,00	Rp./Tahun	3.584.623,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**105.759.288.164,40**	**Rp./Tahun**					
8	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Jawa Barat, Indramayu									
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	27.470.000.000,00	Rp./Tahun	3.423.672,00	Rp/Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Hutan Mangroe di Muara Cimanuk Indramayu	Agustono, 1996, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Hutan Mangrove Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Muara Cimanuk Indramayu)	Luas =8023.55 Ha
		Nilai Tambak Tumpangsari	Nilai Produksi	10.610.000.000,00	Rp./Tahun	1.322.357,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak = 4.255 Ha
		Nilai Pemburuan dan Pemancingan	Nilai Produksi	2.440.000.000,00	Rp./Tahun	304.105,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	71.740.000.000,00	Rp./Tahun	8.941.180,00	Rp/Ha/Tahun			

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Nilai Penahan Abrasi	Benefit Transfer	5.030.000.000,00	Rp./Tahun	626.904,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.2300/US$
	Total Nilai			**117.290.000.000,00**	**Rp./Tahun**					
9	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Jawa Barat,Karawang									
		Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	3.554.040.000,00	Rp./Tahun	2.100.000,00	Rp/Ha/Tahun	Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Karawang Jawa Barat		Luas Mangrove = 1692.4 Ha
		Nilai Ranting kayu	Nilai Produksi	220.012.000,00	Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak	Nilai Produksi	5.793.085.200,00	Rp./Tahun	3.423.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Udang Alam	Nilai Produksi	1.931.451.500,00	Rp./Tahun	1.141.250,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	220.012.000,00	Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Belut	Nilai Produksi	132.007.200,00	Rp./Tahun	78.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan Lainnya	Nilai Produksi	686.437.440,00	Rp./Tahun	405.600,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Burung	Nilai Produksi	32.155.600,00	Rp./Tahun	19.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	6.646.208.000,00	Rp./Tahun	3.927.090,52	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Barru 16000 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4,153,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	111.207.197,82	Rp./Tahun	65.709,76	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	228.918.255,00	Rp./Tahun	135.262,50	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9017.5/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	205.203.500,00	Rp./Tahun	121.250,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pewarisan	Nilai Barang Pengganti	101.544.000,00	Rp./Tahun	60.000,00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Benih Bakau
	Total Nilai			**19.862.281.892,82**	**Rp./Tahun**					
10	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Subang,Desa Muara Kecamatan Blanakan (dari satuan ukur Tambak Tumpangsari)									
		Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	384.459.075,00	Rp./Tahun	1.072.500,00	Rp/Ha/Tahun		Yuana Dwi Handayani, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Hutan Mangrove Menjadi Tambak Tumpangsari (studi Kasu: Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang	Luas Mangrove 358.47 Ha
		Nilai Ranting Kayu	Nilai Produksi	407.062.759,32	Rp./Tahun	1.135.556,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang Windu	Nilai Produksi	3.548.853.000,00	Rp./Tahun	9.900.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang Bandeng	Nilai Produksi	1.461.213.337,50	Rp./Tahun	4.076.250,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	1.157.947.717,50	Rp./Tahun	3.230.250,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Benur	Nilai Produksi	228.524.625,00	Rp./Tahun	637.500,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Nener	Nilai Produksi	141.595.650,00	Rp./Tahun	395.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	172.065.600,00	Rp./Tahun	480.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ular	Nilai Produksi	23.659.020,00	Rp./Tahun	66.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Belut	Nilai Produksi	91.284.385,50	Rp./Tahun	254.650,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	1.177.573.950,00	Rp./Tahun	3.285.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	2.081.940.000,00	Rp./Tahun	5.807.850,03	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Barru 5000 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4,153,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	2.082.005.145,40	Rp./Tahun	5.808.031,76	Rp/Ha/Tahun			Nilai Pakan Udang Rp 2000/kg
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	45.570.499,00	Rp./Tahun	127.125,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8450/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	571.786.147,00	Rp./Tahun	1.595.073,92	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pewarisan	Nilai Barang Pengganti	1.344.262,50	Rp./Tahun	3.750,00	Rp/Ha/Tahun			Pembenihan bakau
	Total Nilai			**13.576.885.173,72**	**Rp./Tahun**					

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
11	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Jawa Barat, Ciamis									
		Nilai Penggarap Nipah	Nilai Produksi	70.000.000,00	Rp./Tahun	10.000.000,00	Rp/Ha/Tahun		Dian Sukmawan, 2004, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Penilaian Ekonomi Manfaat Hutan Mangrove di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	Luas Mangrove 7 Ha
		Nilai Pemancingan Ikan	Nilai Produksi	80.640.000,00	Rp./Tahun	11.520.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	26.880.000,00	Rp./Tahun	3.840.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang Vaname	Nilai Produksi	2.400.000.000,00	Rp./Tahun	800.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Udang Vaname 3 Ha
		Nilai Tambak Udang Windu	Nilai Produksi	2.000.000.000,00	Rp./Tahun	1.000.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Udang Windu 2 Ha
		Nilai Tambak Kepiting	Nilai Produksi	45.000.000,00	Rp./Tahun	22.500.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Kepiting 2 Ha
		Nilai Sawah	Nilai Produksi	30.780.000,00	Rp./Tahun	12.312.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Sawah 2.5 Ha
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	41.638.800,00	Rp./Tahun	5.948.400,00	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Barru 100 m, Aprilwati (2002) biaya Rp.4,163,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang	293.211,65	Rp./Tahun	41.887,38	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyedia Atap Rumah	Nilai Produksi	910.000,00	Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penerimaan Sewa Lahan Nipah	Nilai Produksi	15.434.300,00	Rp./Tahun	2.204.900,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	947.625,00	Rp./Tahun	135.375,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9025/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	41.800.500,00	Rp./Tahun	5.971.500,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**4.754.324.436,65**	**Rp./Tahun**					
12	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Muara Angke, Jakarta									
		Nilai Ikan Bandeng	Nilai Produksi	488.000.000,00	Rp./Tahun	7.450.382,00	Rp/Ha/Tahun		Teguh Suryono, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Penilaian Ekonomi Lingkungan Terhadap Konversi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan Pemukiman (Studi kasus di Hutan Angke Kapuk Jakarta Utara)	
		Nilai Ikan Mujair	Nilai Produksi	5.600.000,00	Rp./Tahun	89.600,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Benih Bandeng	Nilai Produksi	133.330.000,00	Rp./Tahun	2.978.776,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Cacing Laut	Nilai Produksi	87.600.000,00	Rp./Tahun	1.957.105,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemancingan	Nilai Produksi	4.344.000,00	Rp./Tahun	97.051,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	136.383.200,00	Rp./Tahun	2.605.965,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	2.277.887.294,00	Rp./Tahun	50.891.137,00	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai 5000 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4,153,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Penyerap Carbon	Benefit Transfer	103.722.011,00	Rp./Tahun	1.486.415,00	Rp/Ha/Tahun			Hilmi (2003) potensi karbon untuk Rhizophora mucronata = 3258.34 kg/ha-3957.44kg/ha
		Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengganti	8.164.026,00	Rp./Tahun	45.328,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	115.744.089,00	Rp./Tahun	642.630,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9300/US$
		Nilai Pewarisan	Nilai Produksi	35.000.000,00	Rp./Tahun	780.500,00	Rp/Ha/Tahun			Nilai dari Produksi Pembibitan Mangrove
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	791.311.418,20	Rp./Tahun	4.393.489,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**4.187.086.038,20**	**Rp./Tahun**					

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
13	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove dalam Perubahan institusi untuk mengatasi kerusakan, Prov Jawa Barat, Kabupaten Bekasi									
		Nilai Tambak	Nilai Produksi	212.250.835,00	Rp./Tahun	1.199.157,26	Rp/Ha/Tahun		Suhaeri, 2005, Disertasi Sekolah Pascasarjana, Perubahan Institusi untuk Mengatasi Kerusakan Hutan Mangrove (Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Luas Tambak 177 Ha
		Nilai Tempat Pemijahan	Nilai Produksi	1.474.215.672,00	Rp./Tahun	140.654,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Mangrove 10481.15 Ha
		Nilai Kayu	Nilai Produksi	5.111.093.898,00	Rp./Tahun	487.646,29	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pengendali Banjir dan Badai	Nilai Kerugian Akibat Banjir	66.019.898.902,00	Rp./Tahun	6.298.917,48	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Air	Nilai Produksi	13.519.417.500,00	Rp./Tahun	1.289.879,21	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Karbon	Benefit Transfer	153.679.861.875,00	Rp./Tahun	14.662.500,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	64.702.339.991,00	Rp./Tahun	6.173.210,00	Rp/Ha/Tahun			Dahuri (1995) Penahan Abrasi Rp.US$ 726.26/Ha/Tahun (setaraRp.6173210/Ha/Tahun)
		Nilai Konservasi	CVM (WTA)	220.256.053.307,00	Rp./Tahun	21.014.493,00	Rp/Ha/Tahun			Kesediaan Masyarakat menjual tambaknya
	Total Nilai			**524.975.131.980,00**	**Rp./Tahun**					
E	***EKOSISTEM HUTAN MANGROVE KALIMANTAN***									
14	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kalimantan Barat, Batu Ampar Pontianak									
		Nilai Kayu	Nilai Produksi	42.481.912.300,00	Rp./Tahun	3.056.252,68	Rp/Ha/Tahun		Salmah Aprilwati, 2001, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Kawasan Batu Ampar Kabupaten Pontianak	Luas = 13900 Ha
		Nilai Arang	Nilai Produksi	855.141.900,00	Rp./Tahun	61.521,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	81.330.832,00	Rp./Tahun	5.851,14	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Bibit Mangrove	Nilai Produksi	79.695.300,00	Rp./Tahun	5.733,47	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	1.036.258.900,00	Rp./Tahun	74.551,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Udang	Nilai Produksi	7.701.906.600,00	Rp./Tahun	554.094,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	2.091.449.600,00	Rp./Tahun	150.464,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penahan Abrasi	Biaya Perbaikan	56.812.885.800,00	Rp./Tahun	4.087.257,97	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pakan Alami	Biaya Produksi	69.269.283.228,00	Rp./Tahun	4.983.401,67	Rp/Ha/Tahun			Pendekatan mengunakan produksi kepiting dan pakan kepiting secara alami
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1.720.125.000,00	Rp./Tahun	123.750,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8250/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	83.068.717.803,00	Rp./Tahun	5.976.166,75	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**265.198.707.263,00**	**Rp./Tahun**					
15	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Barru									
		Nilai Tambak Ikan Bandeng	Nilai Produksi	433.337.249,90	Rp./Tahun	69.556.540,91	Rp/Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Ekosistem Mangrove Kecamatan Barru Kabupaten Barru		Luas Hutan Mangrove = 6.23 Ha
		Nilai Kayu Bangunan	Nilai Produksi	313.185,98	Rp./Tahun	50.270,62	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	975.004,16	Rp./Tahun	156.501,47	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai bibit alam (Nener)	Nilai Produksi	1.032.004,02	Rp./Tahun	165.650,73	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	121.899.578,40	Rp./Tahun	19.566.545,49	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kerang	Nilai Produksi	2.460.850,00	Rp./Tahun	395.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Bibit Bakau	Nilai Produksi	1.889.247,50	Rp./Tahun	303.250,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	8.955.765.280,00	Rp./Tahun	143.752.251,00	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Barru 2156 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4,153,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	7.916.290.852,00	Rp./Tahun	23.097.576,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	870.486,75	Rp./Tahun	139.725,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9315/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP/WTA)	21.805.000,00	Rp./Tahun	3.500.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**17.456.638.738,71**	**Rp./Tahun**					
F	***HUTAN MANGROVE SUMATERA***									
16	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Bangka, Kecamatan Merawang									
		Nilai Bibit Bakau	Nilai Produksi	14.512.095,26	Rp./Tahun	1.160.967,62	Rp/Ha/Tahun		Ferawati Maedar, 2008, Tesis Sekolah Pascasarjana, Analisis Ekonomi Pengelolaan Mangrove di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka	Luas Mangrove = 12.50 Ha
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	28.699.499,17	Rp./Tahun	2.295.959,93	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	226.530.887,13	Rp./Tahun	18.122.470,97	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang	Nilai Produksi	343.962,77	Rp./Tahun	25.478,72	Rp/Ha/Tahun			Luas= 13.5 Ha
		Nilai Tambak Ikan Bandeng+Udang	Nilai Produksi	9.273.166,37	Rp./Tahun	441.579,35	Rp/Ha/Tahun			Luas= 21 Ha
		Nilai Tambak Ikan Bandeng	Nilai Produksi	285.889.510,79	Rp./Tahun	2.552.584,92	Rp/Ha/Tahun			Luas= 112 Ha
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	97.624.404.682,00	Rp./Tahun	804.419.946,30	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Barru 23501.98 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4,153,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Produksi	3.031.000.000,00	Rp./Tahun	242.480.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1.756.125,00	Rp./Tahun	140.490,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9366/US$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	109.687.500,00	Rp./Tahun	8.775.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Niai			**101.332.097.428,49**	**Rp./Tahun**					
17	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Lampung, Kabupaten Lampung Timur									
		Nilai Kayu Log	Nilai Produksi	9.994.521,00	Rp./Tahun	136.900,00	Rp/Ha/Tahun		Rahadi Ariyanto, 2007, Tesis Sekolah Pascasarjana, Model Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove di Kabupaten Lampung Timur	Luas Mangrove = 73.006 Ha
		Nilai Kayu Bakar (Ranting)	Nilai Produksi	193.086.268,00	Rp./Tahun	2.644.799,99	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	543.602.676,00	Rp./Tahun	7.446.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Udang	Nilai Produksi	431.684.478,00	Rp./Tahun	5.913.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	465.259.937,00	Rp./Tahun	6.372.899,99	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kerang	Nilai Produksi	207.848.082,00	Rp./Tahun	2.847.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Belut	Nilai Produksi	274.999.000,00	Rp./Tahun	3.766.799,99	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ular	Nilai Produksi	399.707.850,00	Rp./Tahun	5.475.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Burung	Nilai Produksi	97.769.635,00	Rp./Tahun	1.339.200,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Sayuran	Nilai Produksi	56.769.446,00	Rp./Tahun	777.599,73	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Bahan Obat/Makanan	Nilai Produksi	525.906.021,00	Rp./Tahun	7.203.599,99	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Fungsi Biologi	Nilai Barang Pengganti	1.093.018.376,00	Rp./Tahun	14.971.623,92	Rp/Ha/Tahun			Hasil Tangkapan Ikan
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	5.999.999.600,00	Rp./Tahun	82.185.020,41	Rp/Ha/Tahun			Dahuri (1995) biaya Rp.3000000 P=1m, L=5m, T=6m, ketahanan 10 tahun kurs Rupiah Rp.2800, saat penelitian Kurs Rupiah 10000 jadi biaya sebesar Rp.10714285, Panjang Pantai 5600 m
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	10.950.900,00	Rp./Tahun	150.000,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1992)= US$ 1500/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp 10000
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	459.937.800,00	Rp./Tahun	6.300.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pewarisan	CVM (WTP)	735.900.480,00	Rp./Tahun	10.080.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**11.506.435.070,00**	**Rp./Tahun**					

NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
18	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Sumatera Selatan, Kecamatan Tulung Selatan									
		Nilai Kayu Arang	Nilai Produksi	2.015.000,00	Rp./Tahun	244,78	Rp/Ha/Tahun		Maryadi, 1998, Tesis Program Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove Untuk Berbagai Macam Kegiatan Pertanian di Pesisir Pantai Timur Kecamatan Tulung Selapan Provinsi Sumatera Selatan	Luas Mangrove 8232 Ha
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	1.273.800.000,00	Rp./Tahun	154.737,61	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Nipah	Nilai Produksi	2.798.000,00	Rp./Tahun	339,89	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Udang	Nilai Produksi	1.868.750.000,00	Rp./Tahun	227.010,45	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	10.080.000,00	Rp./Tahun	1.224,49	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengganti	28.252.224.000,00	Rp./Tahun	3.432.000,00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Kompos
		Nilai Flora dan Fauna Langka	Nilai Barang Pengganti	52.000.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Kunjungan wisatawan
		Nilai Manfaat Opsional (Option Values)	Nilai Produksi	250.000.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Produksi Bibit Bakau
		Nilai Kebanggaan (Bequest Values)	Nilai Barang Pengganti	800.000.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp/Ha/Tahun			Biaya Pembuatan Jalan Sepanjang 80 km
		Manfaat Keberadaan	CVM (WTP)	33.956.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			**32.545.623.000,00**	**Rp./Tahun**					
19	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove terhadap Nilai udang di Kepulauan Riau, Pulau Belakang Kota Batam									
		Nilai Tegakan Pohon	Market Price	433.160.000,00	Rp./Tahun	3.920.000,00	Rp/Ha/Tahun		Peggy Ratna Marlianingrum, 2007, Tesis Sekolah Pascasarjana, Analisis Ekonomi Keterkaitan Sumberdaya Mangrove dan Udang di Pulau Belakang Padang Kota Batam Kepulauan Riau	Luas Mangrove 110.5 Ha
		Nilai Arang Kayu	Market Price	500.000.000,00	Rp./Tahun	4.524.886,88	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Market Price	696.150.000,00	Rp./Tahun	6.300.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Perikanan Mangrove (penyedia umpan)	Market Price	3.488.010.000,00	Rp./Tahun	31.565.701,36	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pendidikan	Surrogate Market Price	10.860.000,00	Rp./Tahun	98.280,54	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Rekreasi	Surrogate Market Price	81.000.000,00	Rp./Tahun	733.031,67	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Replecement Cost	861.000.000,00	Rp./Tahun	7.791.855,20	Rp/Ha/Tahun			1 m x 10 m x 2.5 m daya tahan 10 tahun biaya Rp.4100000, panjang pantai 6.3 kilometer
		Nilai Tempat Pemijahan	Production Function Approach	318.630.000,00	Rp./Tahun	2.883.529,41	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyimpan Karbon	Damage Avoided Cost	221.000.000,00	Rp./Tahun	2.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	16.575.000,00	Rp./Tahun	150.000,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.10000/US$
	Total nilai			**6.626.385.000,00**	**Rp./Tahun**					

Sumber: Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

DUKUNGAN MANAJEMEN

DATA DAN INFORMASI
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2016

TABEL VIII.1 KEGIATAN POKOK DAN INDIKATOR PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019

NO	KEGIATAN PRIORITAS
1	2
A	**Kegiatan Pokok**
1.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
3.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
4.	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
7.	Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan
B	**Indikator Program**
1.	• Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)
	• Jumlah konflik di dalam kawasan hutan turun setiap tahun
2.	Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi
3.	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100%
4.	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019

TABEL VIII.2. ALOKASI DAN SERAPAN ANGGARAN DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2015-2016

NO	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2015			TAHUN ANGGARAN 2016		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PROGRAM PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	474.309.223.000	395.707.429.000	83,43	323.973.949.000	247.336.091.973	76,34

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d November 2016

TABEL VIII.3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TENTANG
1	2	3	4
1	Undang-undang	Nomor 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
		Nomor 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		Nomor 41 Tahun 1999	Kehutanan
		Nomor 25 Tahun 2000	Program Pembangunan Nasional
		Nomor 19 Tahun 2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang
		Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
		Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
		Nomor 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
		Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Nomor 41 Tahun 2009	Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
		Nomor 18 Tahun 2013	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
		Nomor 1 Tahun 2014	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
		Nomor 6 Tahun 2014	Desa
		Nomor 9 Tahun 2015	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2	Peraturan Pemerintah	Nomor 18 Tahun 1994	Pengusahaan Pariwisata Alam Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan PP No 36 Tahun 2010
		Nomor 10 Tahun 2000	Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
		Nomor 35 Tahun 2002	Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 58 Tahun 2007
		Nomor 44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan
		Nomor 45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Th 2009
		Nomor 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Nomor 6 Tahun 2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008
		Nomor 26 Tahun 2008	Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
		Nomor 3 Tahun 2008	Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan
		Nomor 11 Tahun 2010	Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
		Nomor 15 Tahun 2010	Penyelenggaraan penataan ruang
		Nomor 24 Tahun 2010	Penggunaan Kawasan Hutan
		Nomor 72 Tahun 2010	Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Nasional
		Nomor 32 Tahun 1990	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
		Nomor 41 Tahun 2004	Perijinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan
		Nomor 28 Tahun 2011	Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah
		Nomor 61 Tahun 2012	Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan
		Nomor 12 Tahun 2014	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
		Nomor 33 Tahun 2014	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
		Nomor 43 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TENTANG
1	2	3	4
		Nomor 104 tahun 2015	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
		Nomor 105 tahun 2015	Perubahan Kedua atas PP nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan KH
		Nomor 46 tahun 2016	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3	Keputusan/ Peraturan Presiden	Inpres Nomor 10 Tahun 2011	Tentang Desa
		Inpres Nomor 6 Tahun 2013	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
		Inpres Nomor 8 Tahun 2015	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
4	Keputusan/Peraturan Menteri Kehutanan	**Ketentuan tentang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**	
		Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2010	Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan.
		Permenhut Nomor P.25/Menhut-II/2014	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
		Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2011	Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan
		Permenhut Nomor P. 44/Menhut-II/2012	Pengukuhan Kawasan Hutan
		Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 44/Menhut-II/2012
		Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2013	Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
		Permenhut Nomor P.93/MenLHK/SETJEN/Kum.1/12/2016	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
		Perdirjen Planhut No. P.9/VII-SET/2012	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan menggunakan GPS
		Perdirjen Planhut No. P.4/VII-SET/2012	Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan
		Perdirjen Planhut No.P.2/VII-SET/2013	Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Tata Batas/Penetapan Kawasan Hutan
		Perdirjen Planhut No.P.3/VII-SET/2013	Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
		Perdirjen Planhut No.P.4/PKTL-SET/2015	Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan
		Perdirjen No. P.3/PKTL/PLA.2/9/2016	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
		Ketentuan tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	
		Permenhut Nomor P.32/Menhut-II/2010	Tukar Menukar Kawasan Hutan
		Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2012	Perubahan atas Permenhut nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang tukar menukar kawasan hutan
		SK.12/VII-SET/2012	Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Atas Permohonan Pelepasan KH, TMKH dan Izin Pinjam Pakai KH yang terlanjur digunakan sebelum diperoleh izin dari Menhut
		P.27/Menhut-II/2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
		Ketentuan tentang Perpetaan	
		Permenhut P. 20/Menhut-II2011	Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota
		Permenhut Nomor P.48/Menhut-II/2009	Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250,000
		Permenhut Nomor P.02/Menhut-II/2010	Sistem Informasi Kehutanan
		Permenhut Nomor P.10/Menhut-II/2010	Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan
		SK Menhut Nomor 323/Menhut-II/2011	Penetapan Peta indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain.
		SK Menhut Nomor 7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	Penetapan Peta indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain.
		SK Menhut Nomor 6315/Menhut-II/IPSDH/2012	Penetapan peta indikatif penundaan izin baru pemanfaatan hutan (revisi III)

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TENTANG
1	2	3	4
	Keputusan/Peraturan Menteri Kehutanan	SK.16/VII-SET/2012	Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Peta Kawasan Hutan Skala Minimal 1:50.000 di Kabupaten Model
		Perdirjen P.10/VII-SET/2012	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota
		SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi III)
		SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi II)
		SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi IV)
		SK. 6018/Menhut-VII/IPSDH/2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi V)
		SK. 3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi VI)
		SK.6982/Menhut/VII/IPSDH/2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi VII)
		SK.2312/menLHK-VII/IPSDH/2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi VIII)
		SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi IX)
		SK. 2300/MenLHK -PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi X)
		SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi XI)
		Perdirjen Nomor P.3/VII-IPSDH/2014	Petunjuk Teknis Penggambaran Dan Penyajian Peta Kehutanan
		Ketentuan tentang Inventarisasi	
		Permenhut Nomor P.10/Menhut-II/2006	Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan
		Permenhut Nomor P.67/Menhut-II/2006	Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
		Ketentuan tentang Perencanaan Kehutanan	
		P.49/Menhut-II/2011	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2010-2030
		Permenhut Nomor P. 42/Menhut-II/2010	Sistem Perencanaan Kehutanan
		Permenhut Nomor P.02/Menhut-II/2010	Sistem Informasi Kehutanan
		Ketentuan tentang Penggunaan Kawasan Hutan	
	tanggal 29 September 2014	Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2008	Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
		Permenhut Nomor P.84/Menhut-II/2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
		P.50/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2016	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
		P.81/MenLHK/SETJEN/Kum.1/10/2016	Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan untuk Mendukung Ketahan Pangan

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TENTANG
1	2	3	4
	Keputusan/Peraturan Menteri Kehutanan	**Ketentuan tentang Perubahan Fungsi dan Pelepasan Kawasan Hutan**	
		P.29/Menhut-II/2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
		P.16/mengLHK-II/2015	Perubahan Kedua Atas Permenhut No P.34/menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
		P.51/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2016	Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
		Ketentuan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan	
		Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
		Permenhut Nomor P.6-Menhut II/2010	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
		SK.509/Menhut-II/2010	Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau
		P.41/Menhut-II/2011	Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model
		P.54/Menhut-II/2011	Perubahan Atas Permenhut NomorP.41/MENHUT-II/2011 tentang standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model
		Permenhut Nomor P.46/Menhut-II/2013	Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
		Permenhut Nomor P.47/Menhut-II/2013	Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
		Ketentuan tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan	
		Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2007	Tata Cara Pemberian Ijin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2008
		Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2007	Tata Cara pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui permohonan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2008

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkunga, Data S/D November 2016

TABEL VIII.4. PROYEK BANTUAN LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2012-2016

NO	NAMA PROYEK/KODE PROYEK/JANGKA WAKTU	LOKASI	TOTAL		TUJUAN PELAKSANAAN		KEGIATAN POKOK		PELAKSANA		TAHUN
			BLN	GOI					Executing Agency	Implementing Agency	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	UN-REDD (United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) (2009 - 2012)	Indonesia	USD 5.644.250		1	Mendukung kesiapan Pemerintah Indonesia dalam mencapai REDD	1. 2. 3.	Memperkuat partisipasi dan konsesi multi stakeholder pada level nasional. Menyusun Demonstrasi yang sukses dalam membangun REL (Reference Emissions Level), MRV (Measurement, Reporting and Verification System) dan sistem pembayaran yang adil (fair) didasarkan pada arsitektur REDD Nasional. Mengembangkan kapasitas dalam mengimplementasikan REDD pada level yang terdesentralisasi.	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	2009-2012
2	Implementation Agreement Environmental Support Programme, Phase III (2013-2018)	Indonesia	55.250.000 DKK		1	Memperbaiki dampak lokal dari implementasi kebijakan dan pengelolaan lingkungan serta di bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 2	KLHK secara efektif mengelola portfolionya untuk hasil lingkungan yang positif SEA diaplikasikan pada program terpilih, kebijakan dan rencana, menghasilkan rekomendasi praktis yang memperbaiki lingkungan dan kinerja pembangunan berkelanjutan	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3.	10 Desember 2012 - 9 Desember 2017 akan diperpanjang sampai 2018
3	A Joint Cooperation for Strengthening the Capacity of the Forest Management Unit Including Preparation for REDD+ Implementation at Tasik Besar Serkap (April 2013 – Desember 2015)	Indonesia	USD 3,000,000		1	Memperkuat kapasitas KPH dalam menerapkan praktek terbaik pengelolaan hutan dan mempersiapkan pelaksanaan REDD+ di hutan gambut.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Melakukan survei sosial ekonomi, survei biofisik, penginderaan jauhdan GIS, pemodelan, pemetaan empiris perubahan lahan di Semenanjung Kampar. Memfasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan jangka panjang dan jangka pendek KPH Tasik Besar Serkap dan memformulasikan rencana bisnis untuk KPH Tasik Besar Serkap. Pelatihan personil dari KPH dan pemangku kepentingan terkait tentang pencegahan kebakaran, dan pelaksanaan teknik pengelolaan lahan gambut, pengukuran penyerapan dan keseimbangan emisi/karbon. Memilih aktivitas demonstrasi (DA). Mendokumentasikan baseline dan trayek sekuestrasi. Mengembangkan Kegiatan Demonstrasi REDD+. Memprediksi trayek baseline dari stok karbon di Semenanjung Kampar di bawah skenario "business-as-usual", menganalisis additionality karbon di Semenanjung Kampar di bawah beberapa skenario REDD+. Memformulasikan rencana bisnis untuk perdagangan karbon. Mempersiapkan pembentukan lembaga untuk pengaturan perdagangan karbon REDD+.	Direktorat Wilayah Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	Direktorat Wilayah Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	25 Januari 2012 - 31 Desember 2015 diperpanjang sampai 30 September 2016

NO	NAMA PROYEK/KODE PROYEK/JANGKA WAKTU	LOKASI	TOTAL		TUJUAN PELAKSANAAN		KEGIATAN POKOK		PELAKSANA		TAHUN
			BLN	GOI					Executing Agency	Implementing Agency	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persiapan Pelaksanaan Proyek Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan (Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development)	Indonesia	USD 500,000		1	Disetujuinya proyek Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan (Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development) oleh FIP Sub Committee dan World Bank Board.	1. Pemetaan dan analisa struktur institusi dan organisasi Kementerian Kehutanan terkait hubunganya dengan KPH. 2. Identifikasi dan analisa berbagai produk hukum, kebijakan dan regulasi terkait KPH. 3. Penyiapan Kerangka Kerja Partisipatif Masyarakat (Community Participatory Framework) 4. Penyiapan Kerangka Kerja Lingkungan dan Manajemen Sosial. 5. Rancangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi. 6. Rancangan Pengelolaan Pengetahuan dan Sistem Informasi. 7. Rancangan Komunikasi dan Partisipasi. 8. Persiapan Dokumen Proyek dan Rencana Implementasi Program. 9. Lokakarya Penulisan Dokumen Proyek. 10. FGD dengan para ahli dan praktisi terkait 11. Lokakarya Multipihak/Konsultasi Desain Proyek. 12. Pertemuan Berkala. 13. Lokakarya Penulisan Berkala 14. Formulasi Rancangan Manual Operasional Proyek 15. Pengelolaan Proyek	Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	Februari 2014 diperpanjang sampai Februari 2015
5	FIP-II Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development	Indonesia	USD 17.350.000		1	Mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH).	1 Penguatan Peraturan, kebijakan serta administrasi kelembagaan dan kapasitas teknis pada tingkat nasional dan sub nasional dalam desentralisasi pengelolaan hutan 2 Pembangunan portal (Platform) pengetahuan 3 Meningkatkan praktek pengelolaan hutan pada 10 KPH	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Pusat Data dan Informasi, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	5 tahun (2016-2021)

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data S/D November 2016

TABEL VIII.5. REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN															KET
		IV			III			II			I			JUMLAH			
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Sekretariat Ditjen. Planologi Kehutanan	8	3	11	38	30	68	5	3	8	1	0	1	52	36	88	
II	Dit. Rencanaan Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	11	3	14	56	38	94	3	3	6	0	0	0	70	44	114	
III	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	6	4	10	28	22	50	7	4	11	0	0	0	41	30	71	
IV	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	8	4	12	43	30	73	8	7	15	2	0	2	61	41	102	
V	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5	8	13	19	9	28	3	1	4	0	0	0	27	18	45	
VI	Dit. Wil. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4	4	8	17	8	25	2	2	4	0	0	0	23	14	37	
	JUMLAH	**42**	**26**	**68**	**201**	**137**	**338**	**28**	**20**	**48**	**3**	**0**	**3**	**274**	**183**	**457**	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d November 2016

Keterangan:
IV L = Gol. IV Laki-laki
IV P = Gol. IV Perempuan
III L = Gol. III Laki-laki
III P = Gol. III Perempuan
II L = Gol. II Laki-laki
II P = Gol. II Perempuan
I L = Gol. I Laki-laki
I P = Gol. I Perempuan

TABEL VIII.6 REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH)

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN															KET
		IV			III			II			I			JUMLAH			
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	BPKH Wil. I Medan	1	0	1	41	13	54	14	6	20	0	0	0	56	19	75	
2.	BPKH Wil. II Palembang	1	0	1	36	13	49	10	5	15	0	0	0	47	18	65	
3.	BPKH Wil. III Pontianak	1	1	2	36	14	50	3	2	5	1	0	1	41	17	58	
4.	BPKH Wil. IV Samarinda	1	0	1	37	14	51	11	3	14	1	0	1	50	17	67	
5.	BPKH Wil. V Banjarbaru	0	1	1	40	17	57	10	5	15	1	0	1	51	23	74	
6.	BPKH Wil. VI Manado	2	1	3	30	13	43	10	1	11	0	0	0	42	15	57	
7	BPKH Wil. VII Makasar	1	3	4	35	20	55	7	6	13	0	0	0	43	29	72	
8.	BPKH Wil. VIII Denpasar	2	0	2	29	12	41	12	5	17	0	0	0	43	17	60	
9.	BPKH Wil. IX Ambon	2	0	2	28	6	34	16	2	18	0	0	0	46	8	54	
10.	BPKH Wil. X Irian Jaya	1	0	1	31	8	39	14	2	16	0	0	0	46	10	56	
11.	BPKH Wil. XI Yogyakarta	4	6	10	26	28	54	9	4	13	1	0	1	40	38	78	
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	2	0	2	12	6	18	8	5	13	0	0	0	22	11	33	
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	1	0	1	12	3	15	7	8	15	0	0	0	20	11	31	
14	BPKH Wil. XIV Kupang	1	0	1	18	8	26	6	4	10	0	0	0	25	12	37	
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	4	0	4	9	4	13	8	0	8	0	0	0	21	4	25	
16	BPKH Wil. XVI Palu	3	0	3	17	8	25	8	2	10	0	0	0	28	10	38	
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	1	0	1	22	1	23	12	1	13	0	0	0	35	2	37	
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	1	0	1	10	6	16	1	2	3	0	0	0	12	8	20	
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	1	0	1	15	1	16	5	2	7	0	0	0	21	3	24	
20	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	2	0	2	27	9	36	5	1	6	1	0	1	35	10	45	
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	2	1	3	19	2	21	2	1	3	0	0	0	23	4	27	
22	BPKH Wil. XXII Kendari	1	0	1	13	5	18	2	1	3	0	0	0	16	6	22	
	Jumlah	**35**	**13**	**48**	**543**	**211**	**754**	**180**	**68**	**248**	**5**	**0**	**5**	**763**	**292**	**1055**	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d November 2016

TABEL VIII.7 SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SMP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I	Sekretariat Direktorat Jenderal	PNS	1	1	2	10	3	13	21	23	44	3	6	9	15	3	18	1	0	1	1	0	1	88	52	36	
		Upah	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	0	1	8	1	9	0		0	0		0	15	14	1	
II	Direktorat Rencana,Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	PNS	0	0	0	12	7	19	29	19	48	6	8	14	22	8	30	0	2	2	1	0	1	114	70	44	
		Upah	0	0	0	0	1	1	5	2	7	0	1	1	3	1	4	0	0	0	0		0	13	8	5	
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	PNS	3	0	3	7	8	15	15	10	25	2	4	6	13	8	21	0	0	0	1	0	1	71	41	30	
		Upah	0		0	0	0	0	2	4	6	0	0	0	2	0	2	0		0	0		0	8	4	4	
IV	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PNS	0	0	0	9	8	17	19	11	30	3	6	9	26	16	42	1	0	1	3	0	3	102	61	41	
		Upah	0		0	0		0	6	3	9	4	0	4	13	0	13	0		0	0		0	26	23	3	
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PNS	0	2	2	7	6	13	9	9	18	1	1	2	9	0	9	1	0	1	0	0	0	45	27	18	
		Upah	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0		0	4	2	2	
VI	Direktorat Pecegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	PNS	0	0	0	7	4	11	8	9	17	1	0	1	6	1	7	1	0	1	0	0	0	37	23	14	
		Upah	0		0	1	0	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0		0	8	4	4	
JUMLAH		**PNS**	**4**	**3**	**7**	**52**	**36**	**88**	**101**	**81**	**182**	**16**	**25**	**41**	**91**	**36**	**127**		**2**			**0**		**457**	**274**	**183**	
		Upah/magang	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**19**	**12**	**31**	**6**	**2**	**8**	**29**	**3**	**32**		**0**			**0**		**72**	**55**	**19**	
TOTAL			**4**	**3**	**7**	**53**	**36**	**89**	**120**	**93**	**213**	**22**	**27**	**49**	**120**	**39**	**159**		**2**			**0**		**480**	**329**	**202**	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d November 2016

TABEL VIII. 8 SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			D2/DI/ SLTA			SMP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I	BPKH Wil. I Medan	PNS	0	0	0	4	1	5	16	0	16	3	5	8	31	13	44	2	0	2	0	0	0	75	56	19	
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	3	1	4	11	9	2	
II	BPKH Wil. II Palembang	PNS	0	0	0	1	0	1	9	4	13	6	5	11	30	9	39	1	0	1	0	0	0	65	47	18	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	6	1	7	0	0	0	1	0	1	10	9	1	
III	BPKH Wil. III Pontianak	PNS	0	0	0	5	4	9	8	5	13	3	2	5	23	6	29	1	0	1	1	0	1	58	41	17	
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	11	2	13	1	0	1	0	0	0	18	14	4	
IV	BPKH Wil. IV Samarinda	PNS	0	0	0	3	0	3	15	10	25	4	2	6	27	5	32	0	0	0	1	0	1	67	50	17	
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	13	3	16	0	0	0	0	0	0	18	15	3	
V	BPKH Wil. V Banjarbaru	PNS	0	0	0	5	3	8	11	4	15	1	2	3	33	14	47	0	0	0	1	0	1	74	51	23	
		Upah	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	1	3	9	1	10	1	0	1	2	0	2	20	17	3	
VI	BPKH Wil. VI Manado	PNS	0	0	0	8	1	9	9	7	16	0	1	1	25	6	31	0	0	0	0	0	0	57	42	15	
		Upah	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	0	0	6	3	9	0	0	0	0	0	0	16	10	6	
VII	BPKH Wil. VII Makasar	PNS	0	0	0	2	5	7	18	9	27	4	2	6	18	13	31	0	0	0	1	0	1	72	43	29	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	0	8	2	10	0	0	0	0	0	0	15	10	5	
VIII	BPKH Wil. VIII Denpasar	PNS	*0*	*0*	0	*4*	*2*	6	9	*4*	13	*4*	*3*	7	*26*	*8*	*34*	*0*	0	0	*0*	0	0	60	43	17	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	6	1	7	1	0	1	0	0	0	11	10	1	
IX	BPKH Wil. IX Ambon	PNS	0	0	0	2	0	2	12	4	16	3	1	4	29	3	32	0	0	0	0	0	0	54	46	8	
		Upah	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	11	3	14	0	0	0	0	0	0	17	14	3	
X	BPKH Wil. X Irian Jaya	PNS	0	0	0	3	0	3	17	4	21	6	2	8	20	4	24	0	0	0	0	0	0	56	46	10	
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	0	0	0	0	0	0	15	10	5	
XI	BPKH Wil. XI Yogyakarta	PNS	0	0	0	7	8	15	12	17	29	5	7	12	15	6	21	1	0	1	0	0	0	78	40	38	
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	1	11	1	0	1	0	0	0	13	12	1	
XII	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	PNS	1	0	1	1	0	1	7	3	10	3	8	11	10	0	10	0	0	0	0	0	0	33	22	11	
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	10	1	11	0	0	0	0	0	0	14	12	2	
XIII	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	PNS	0	0	0	3	1	4	7	1	8	7	7	14	3	2	5	0	0	0	0	0	0	31	20	11	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	4	6	3	1	4	10	2	12	0	0	0	0	0	0	22	15	7	

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			D2/DI/ SLTA			SMP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
XIV	BPKH Wil. XIV Kupang	PNS	0	0	0	3	0	3	11	5	16	4	4	8	7	3	10	0	0	0	0	0	0	37	25	12	
		Upah	0	0	0	0	0	0	4	2	6	2	0	2	10	0	10	0	0	0	0	0	0	18	16	2	
XV	BPKH Wil. XV Gorontalo	PNS	0	0	0	4	1	5	6	2	8	5	1	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	25	21	4	
		Upah	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	0	0	14	4	18	0	0	0	0	0	0	25	18	7	
XVI	BPKH Wil. XVI Palu	PNS	0	0	0	6	0	6	12	5	17	4	5	9	6	0	6	0	0	0	0	0	0	38	28	10	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	1	14	2	16	0	0	0	0	0	0	21	17	4	
XVII	BPKH Wil. XVII Manokwari	PNS	0	0	0	2	0	2	15	1	16	3	1	4	14	0	14	0	0	0	1	0	1	37	35	2	
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	1	9	2	11	2	0	2	1	0	1	22	12	10	
XVIII	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	PNS	0	0	0	4	1	5	6	5	11	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	20	12	8	
		Upah	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	0	0	9	2	11	0	0	0	0	0	0	17	14	3	
XIX	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	PNS	0	0	0	5	0	5	9	1	10	1	1	2	6	1	7	0	0	0	0	0	0	24	21	3	
		Upah	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	0	2	9	3	12	0	0	0	0	0	0	20	14	6	
XX	BPKH Wil. XX Bandar lampung	PNS	0	0	0	4	2	6	15	4	19	1	0	1	12	4	16	1	0	1	2	0	2	45	35	10	
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	1	3	6	1	7	0	0	0	0	0	0	15	9	6	
XXI	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	PNS	0	0	0	3	1	4	15	1	16	1	0	1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	27	23	4	
		Upah	0	0	0	0	0	0	5	2	7	1	0	1	10	5	15	2	0	2	0	0	0	25	18	7	
XXII	BPKH Wil. XXII Kendari	PNS	0	0	0	3	0	3	12	5	17	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	22	16	6	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	1	2	10	0	10	0	0	0	0	0	0	20	13	7	
JUMLAH		**PNS**	**1**	**0**	**1**	**82**	**30**	**112**	**251**	**101**	**352**	**68**	**60**	**128**	**348**	**101**	**449**	**6**		**6**	**7**	**0**	**7**	**1055**	**763**	**292**	
		Upah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**44**	**91**	**19**	**6**	**25**	**207**	**44**	**251**	**8**	**0**	**8**	**7**	**1**	**8**	**383**	**288**	**95**	
TOTAL PNS + UPAH			**1**	**0**	**1**	**82**	**30**	**112**	**298**	**145**	**443**	**87**	**66**	**153**	**555**	**145**	**700**	**14**	**0**	**14**	**14**	**1**	**15**	**1438**	**1051**	**387**	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data S/D November 2016

TABEL VIII.9. SARANA DAN PRASARANA

NO	INSTANSI	KELOMPOK ASET (DALAM NILAI RUPIAH)									
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP DALAM RENOVASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP	ASET TAK BERWUJUD	ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN	TOTAL ASET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**KANTOR PUSAT (KP)**	**14.119.210.000**	**72.283.027.280**	**3.282.263.650**	**56.181.285**	**184.800.000**	**32.364.862.878**	**-**	**11.602.311.613**	**1.567.130.000**	**135.459.786.706**
1	Sekretariat Ditjen Planologi	14.119.210.000	19.829.632.941	3.244.033.650	6.681.285	-	-	-	41.400.000	1.567.130.000	38.808.087.876
2	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	16.627.743.905	-	-	-	515.000.000	-	2.504.420.530	-	19.647.164.435
3	Dit Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	-	18.159.916.973	38.230.000	49.500.000	184.800.000	-	-	2.028.049.000	-	20.460.495.973
4	Dit Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	-	15.457.305.419	-	-	-	31.849.862.878	-	7.028.442.083	-	54.335.610.380
5	Dit. Pembentukan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	-	1.409.678.042	-	-	-	-	-	-	-	1.409.678.042
6	Dit. Pembentukan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	-	798.750.000	-	-	-	-	-	-	-	798.750.000
II	**KANTOR DAERAH (KD)**	**109.339.809.605**	**205.011.420.307**	**104.268.617.210**	**3.252.905.750**	**-**	**499.615.564**	**223.970.000**	**8.237.033.345**	**98.482.638.766**	**529.316.010.547**
1	BPKH Wilayah I Medan	4.155.925.800	12.245.193.871	2.298.448.846	-	-	-	-	823.361.553	8.918.180.230	28.441.110.300
2	BPKH Wilayah II Palembang	9.165.113.094	11.111.428.749	4.329.232.000	85.125.000	-	-	-	328.908.000	10.612.260.150	35.632.066.993
3	BPKH Wilayah III Pontianak	25.950.010.000	9.772.650.329	8.429.599.479	-	-	-	-	18.475.000	1.507.079.675	45.677.814.483
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	2.754.451.107	10.397.706.581	5.674.312.450	260.416.700	-	39.600.000	-	174.140.200	11.010.739.062	30.311.366.100
5	BPKH Wilayah V Banjarbaru	2.062.626.000	10.719.574.086	6.097.219.861	186.270.000	-	12.795.500	223.970.000	26.125.000	1.506.540.117	20.835.120.564
6	BPKH Wilayah VI Manado	3.989.336.000	12.726.615.434	7.207.925.200	-	-	5.200.000	-	609.239.000	2.876.220.508	27.414.536.142
7	BPKH Wilayah VII Makassar	5.635.944.000	10.552.342.727	6.086.616.000	50.000.000	-	-	-	421.034.000	18.216.203.284	40.962.140.011
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	23.898.650.000	10.520.779.745	7.208.195.947	251.352.500	-	-	-	1.849.341.900	4.160.072.204	47.888.392.296
9	BPKH Wilayah IX Ambon	1.137.500.000	13.028.024.275	3.238.816.375	260.545.000	-	48.312.000	-	439.653.000	4.154.058.762	22.306.909.412
10	BPKH Wilayah X Jayapura	1.030.000.000	9.404.726.273	4.172.476.150	126.430.200	-	148.278.300	-	68.942.000	6.685.501.815	21.636.354.738
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	3.626.796.520	10.749.113.992	4.034.571.998	-	-	16.575.300	-	352.806.400	1.340.697.240	20.120.561.450
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	1.282.722.000	7.899.533.665	5.315.017.624	-	-	21.770.000	-	345.637.032	621.636.550	15.486.316.871
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	980.483.629	9.619.825.860	4.837.408.278	469.943.550	-	-	-	-	6.059.388.671	21.967.049.988

NO	INSTANSI	KELOMPOK ASET (DALAM NILAI RUPIAH)									
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP DALAM RENOVASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP	ASET TAK BERWUJUD	ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN	TOTAL ASET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	1.222.380.000	11.072.561.697	4.632.109.833	199.821.000	-	27.071.000	-	250.025.000	5.853.213.860	23.257.182.390
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	979.330.000	10.324.849.049	5.998.813.398	49.760.000	-	-	-	346.100.000	1.518.826.450	19.217.678.897
16	BPKH Wilayah XVI Palu	1.602.400.000	11.104.623.315	4.849.111.755	41.900.000	-	180.013.464	-	437.015.000	416.205.850	18.631.269.384
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	1.468.417.855	11.873.743.999	10.649.076.894	1.232.555.644	-	-	-	482.032.600	1.535.189.184	27.241.016.176
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	7.561.454.400	4.493.593.336	1.970.751.824	-	-	-	-	153.499.500	1.512.911.025	15.692.210.085
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	4.761.374.400	5.084.605.898	2.630.982.100	-	-	-	-	650.199.660	-	13.127.162.058
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	3.228.768.000	3.117.380.612	1.021.191.798	38.786.156	-	-	-	153.499.500	3.213.001.581	10.772.627.647
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	873.526.800	5.518.921.212	1.503.570.000	-	-	-	-	153.499.500	6.764.712.548	14.814.230.060
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	1.972.600.000	3.673.625.602	2.083.169.400	-	-	-	-	153.499.500	-	7.882.894.502
JUMLAH I + II		**123.459.019.605**	**277.294.447.587**	**107.550.880.860**	**3.309.087.035**	**184.800.000**	**32.864.478.442**	**223.970.000**	**19.839.344.958**	**100.049.768.766**	**664.775.797.253**

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data S/D Semester I (30 Juni 2016)

Ket : Nilai Aset per 30 Juni 2016 -

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2016

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto
PO. Box 3506, Jakarta 10270, Telp. (021) 5730289, Fax. (021) 5734632